



**KERJASAMA INDIA-VIETNAM DALAM EKSPLORASI
MINYAK SEBAGAI RESISTENSI ATAS KLAIM CHINA DI
LAUT CHINA SELATAN**

***INDIA-VIETNAM COOPERATION IN OIL EXPLORATION AS
RESISTANCE OF CHINA'S CLAIMS IN SOUTH CHINA SEA***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

NURUL ADI PRASETYO

NIM 100910101014

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2015

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Alm. Slamet Sugiyono dan Ibunda Dwi Retnowati, , terima kasih atas perjuangan, nasehat tanpa henti, do'a serta pengorbanan yang tak akan pernah bisa ternilai dengan apapun di dunia ini. Tidak ada kata yang mampu menguraikan betapa kerasnya perjuanganmu untuk menempatkan anakmu ke dalam segmen kehidupan yang telah menjadi impian dan harapanmu.
2. Kakak saya Doni Nur Kusuma Bakti, S. H, terima kasih atas motivasi yang selalu jadi pencerah dalam kehidupan.
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi
4. Almamater tercinta Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menempa diri serta memperbaiki kualitas ilmu dan pengetahuan yang saya miliki.

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, bila ia baik maka akan baik seluruh tubuh, bila ia buruk maka akan rusak seluruh tubuh, dialah *qalb* (hati).” (HR. Bukhari Muslim)¹



¹ Aguk Irawan MN. 2012. *Penakluk Badai (Novel Biografi KH. Hasyim Asy'ari)*. Depok: Global Media Utama. Hal xvii

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Adi Prasetyo

NIM : 100910101014

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kerjasama India-Vietnam dalam Eksplorasi Minyak sebagai Resistensi atas Klaim China di Laut China Selatan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Maret 2015

Yang menyatakan

Nurul Adi Prasetyo
NIM 100910101014

SKRIPSI

**KERJASAMA INDIA-VIETNAM DALAM EKSPLORASI MINYAK
SEBAGAI RESISTENSI ATAS KLAIM CHINA DI LAUT CHINA SELATAN**

Oleh:

**NURUL ADI PRASETYO
100910101014**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma, MA., Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Muhammad Iqbal, S. Sos, M. Si

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kerjasama India-Vietnam dalam Eksplorasi Minyak sebagai Resistensi atas Klaim China di Laut China Selatan” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Maret 2015
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua

Agus Tri Hartono., S.Sos, MA, Ph.D
196908151995121001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Sugiyanto E. Kusuma, MA, Ph.D
195004281979031001

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si
197212041999031004

Anggota I

Anggota II

Fuat Albayumi, S.IP, MA
197404242005011002

Honest Dody Molasy, S.Sos, MA
197404242005011002

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Harry Yuswadi M.A.
195207271981031003

RINGKASAN

Kerjasama India-Vietnam dalam Eksplorasi Minyak sebagai Resistensi atas Klaim China di Laut China Selatan; Nurul Adi Prasetyo, 100910101014; 2014: 127 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laut China Selatan merupakan kawasan potensial yang memiliki kekayaan alam melimpah serta posisinya yang strategis sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Barat dengan Asia Timur. Oleh karena itu, segala upaya penguasaan dalam kawasan ini akan dapat mengganggu sirkulasi perekonomian negara-negara di Asia. Fenomena inilah yang sedang dialami oleh tiga negara yang berseteru dalam kawasan Laut China Selatan yaitu China, India serta Vietnam. Konflik dimulai ketika China dengan sengaja melakukan klaim wilayah dengan mengambil 80 persen kawasan Laut China Selatan sebagai wilayahnya. Klaim dari China dalam kawasan ini juga mengambil sebagian wilayah dari Vietnam yang di dalamnya terdapat aset-aset minyak yang sedang dikelola oleh India. Kejadian ini kemudian memantik reaksi dari Vietnam maupun India yang merasa terancam dan dirugikan dengan munculnya klaim China dalam kawasan Laut China Selatan. Baik India maupun Vietnam bereaksi cepat menyikapi klaim dari China yang semakin mengancam kedaulatan energi maupun perekonomian dari kedua negara ini. Agresivitas China dalam kawasan Laut China Selatan kemudian ditanggapi India dengan Vietnam dengan semakin memperkuat jalinan kerjasama mereka terutama dalam bidang perminyakan yang memiliki keterkaitan dengan Laut China Selatan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama eksplorasi minyak India-Vietnam dapat berfungsi sebagai resistensi terhadap klaim China di Laut China Selatan.

Untuk meneliti respon India penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan penulis untuk dapat menganalisis data

dengan sifat deduktif karena hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data-data yang ada di dapat dari data sekunder.

Hasil peneltian menunjukkan bahwa beberapa kepentingan strategis India yang berada dalam kawasan Laut China Selatan menjadi dasar bagi India untuk menyetujui permohonan kerjasama minyak dari Vietnam. India menyetujui permohonan dari kerjasama dari Vietnam sebagai upaya India dalam mengimplementasikan kebijakan *“look east”* mereka. India juga menyetujui kerjasama eksplorasi minyak dengan Vietnam sebagai jalan untuk melindungi aset yang dimilikinya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam yang berada dalam kawasan Laut China Selatan. Selain itu, India juga memiliki kepentingan dalam membebaskan jalur perdagangannya dari penguasaan sepenuhnya oleh China yang dapat mengganggu aksesibilitas perdagangan dari India. Upaya India dengan Vietnam dalam melakukan kerjasama tersebut untuk memberikan resistensi kepada China atas klaimnya di Laut China Selatan selalu berlandaskan pada payung hukum internasional yaitu UNCLOS serta kebijakan luar negeri India maupun Vietnam.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerjasama India-Vietnam dalam Eksplorasi Minyak sebagai Resistensi atas Klaim China di Laut China Selatan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma, MA, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Iqbal, S. Sos, M. Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Agus Trihartono, S.Sos, MA, Ph.D., selaku Ketua Penguji dan Fuat Albayumi, S.IP, MA., serta Honest Dody Molasy, S.Sos, MA., selaku Anggota Penguji yang telah berkontribusi melalui kritik dan saran bagi penulisan skripsi ini.
3. Suyani Indriastuti, S. Sos, M.Si dan Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik atas dorongan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Alm. Ayahanda Slamet Sugiyono dan Ibunda Dwi Retnowati yang telah banyak memberikan pelajaran hidup tentang moralitas, perjuangan hidup, dan pengorbanan yang menjadi landasan perjuangan penulisan skripsi ini. Dony Nur Kusuma Bakti, S.H., yang telah menuntun penulisan skripsi ini secara akademis dapat mengalir kepada muaranya. Sahabat hatiku Ditha Nuril Pramudyawati dan Hanik Nur Azizah, Amd. Keb., yang telah menjadi harmoni dan semangat utama penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Irfantoni Listiyawan dan Krisna Raditya yang telah berkompetisi dan berkontestasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Dimas Bagus K. H, Totok Agung Prasetyo, Rizky Dian Erfani, Susetya Tegar, Andenis Surya J., Aldiansyah Riski P., Adrian Sujiwo, Dhani Saputra, Wildan Faisol atas kontemplasi tengah malam yang selalu memberikan cakrawala baru bagi penulisan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman-teman di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember angkatan 2010 yang tidak mengurangi hormat saya tidak dapat sebutkan satu-persatu disini yang telah menjadi teman untuk berbagi dan diskusi dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 16 Februari 2015

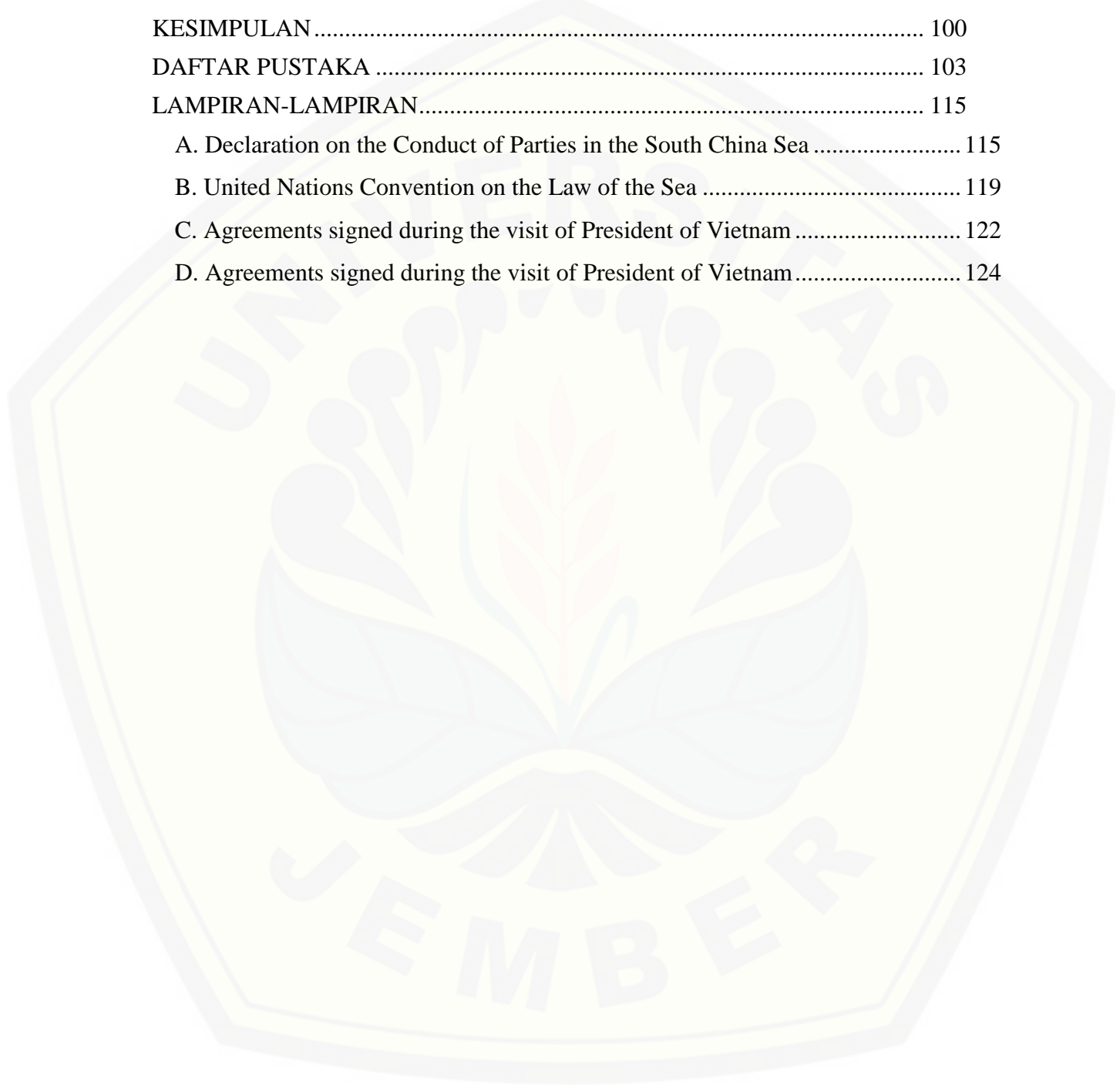
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
SKRIPSI.....	x
HALAMAN PENGESAHAN.....	xi
RINGKASAN	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	8
1.2.1 Batasan Materi	9
1.2.2 Batasan Waktu	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Dasar Pemikiran.....	10
1.5.1 Konsep Resistensi	12
1.5.2 Konsep <i>Hedging</i>	13
1.5.3 Konsep Kerjasama Internasional	14
1.5.4 Konsep Ekonomi Politik Internasional.....	15
1.5.5 Konsep <i>Energy Security</i>	17
1.5.6 Konsep Geopolitik	19

1.6 Argumen Utama	22
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.7.2 Teknik Analisis Data	23
1.8 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II.....	26
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN ENERGI INDIA	26
2.1 India.....	26
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi India	26
2.1.2 Kebijakan Melihat ke Timur India (<i>India Look East Policy</i>)	29
2.1.3 Konsumsi dan Permasalahan Energi India	32
2.1.4 Kebijakan Energi India	39
2.1.4 Tujuan Kebijakan.....	41
BAB III	43
KERJASAMA EKSPLORASI MINYAK ANTARA INDIA DAN VIETNAM. 43	
3.1 Laut China Selatan sebagai kawasan strategis bagi India dan Vietnam.....	43
3.2 Pengaruh India dalam Regional Asia Pasifik.	49
3.3 Posisi Tawar antara India dalam Kerjasama Eksplorasi Minyak.	52
3.4 Upaya India dalam mencapai akses keamanan energi	56
3.5 Kerjasama Eksplorasi Minyak India dengan Vietnam	60
3.6 Legalitas Ekplorasi Minyak India dengan Vietnam menurut Hukum Laut Internasional.	70
BAB IV	81
RESISTENSI INDIA TERHADAP KLAIM CHINA DI LAUT CHINA SELATAN	81
4.1 Inisiatif Vietnam dalam mengajukan penawaran kerjasama eksplorasi minyak dengan India.	81
4.2 Persetujuan India dalam penawaran kerjasama Eksplorasi Minyak di wilayah Vietnam	85
4.3 Prospek Kerjasama Eksplorasi Minyak India-Vietnam di Laut China Selatan dalam fungsinya sebagai resistensi atas klaim China di Laut China Selatan.....	94

4.4 Sikap Politik China atas kerjasama India-Vietnam.....	96
BAB V.....	100
KESIMPULAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	115
A. Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea.....	115
B. United Nations Convention on the Law of the Sea.....	119
C. Agreements signed during the visit of President of Vietnam.....	122
D. Agreements signed during the visit of President of Vietnam.....	124



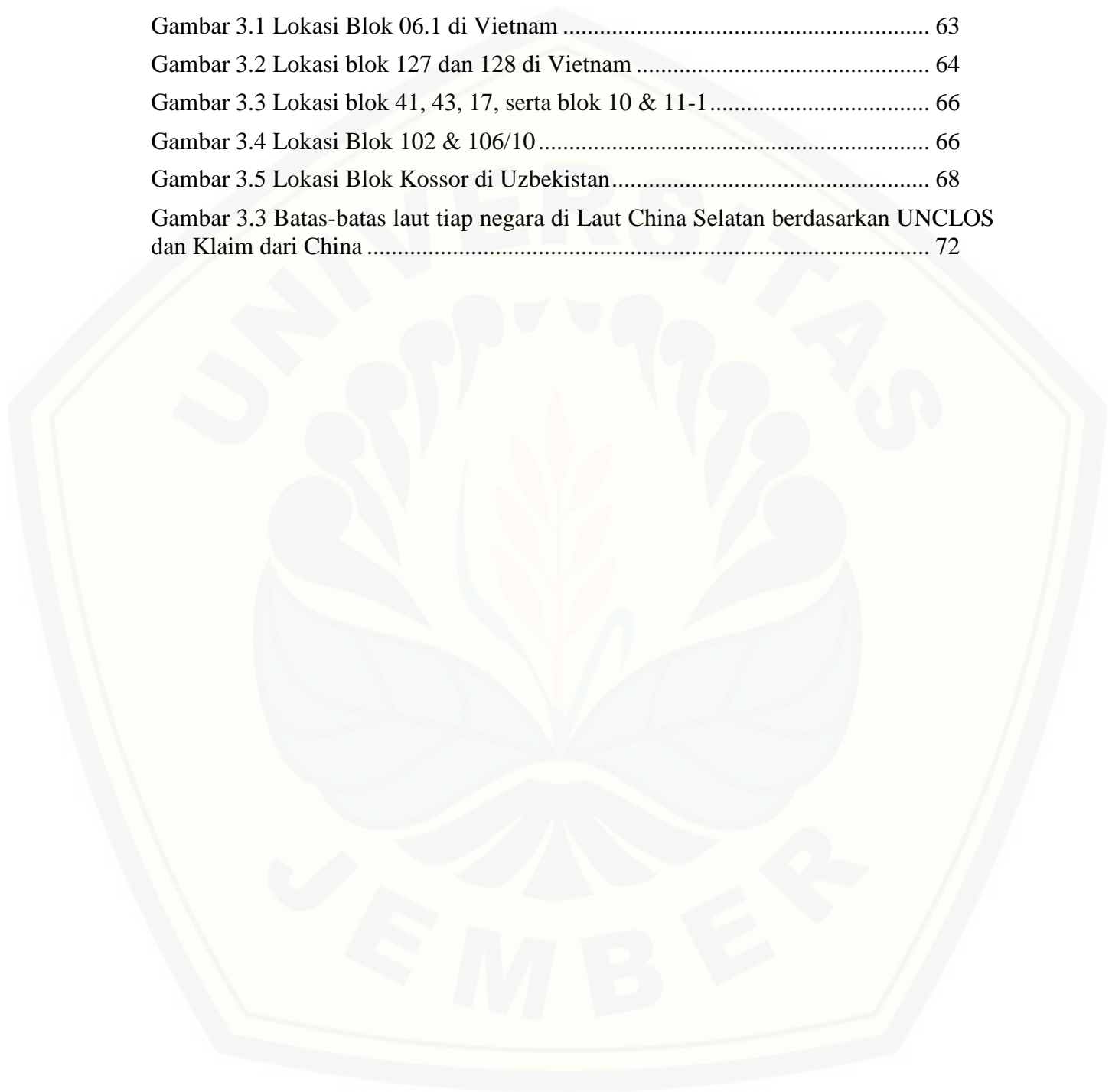
DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Bagan Analisis Kerjasama India dengan Vietnam..... 21



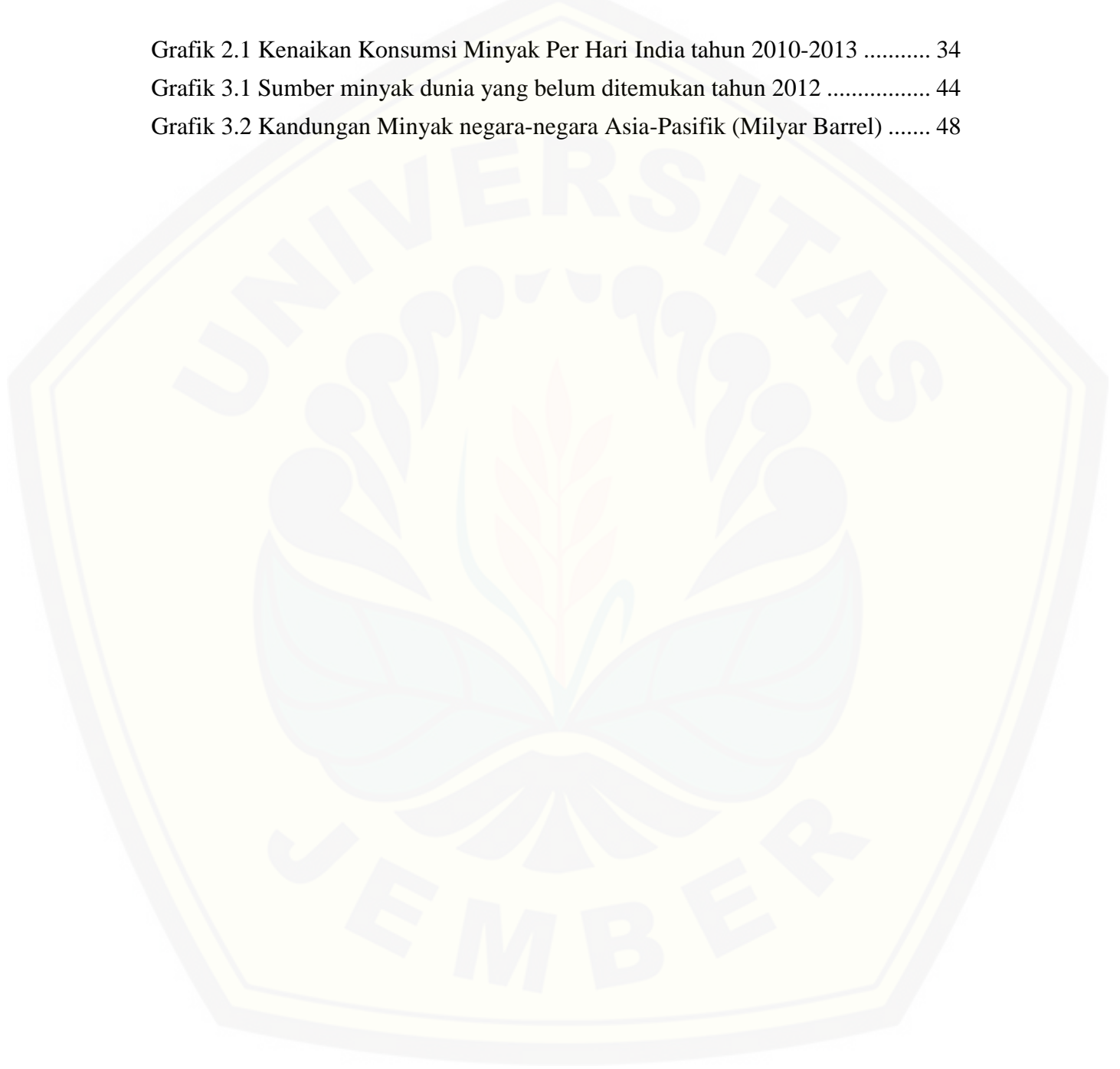
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Blok 06.1 di Vietnam	63
Gambar 3.2 Lokasi blok 127 dan 128 di Vietnam	64
Gambar 3.3 Lokasi blok 41, 43, 17, serta blok 10 & 11-1	66
Gambar 3.4 Lokasi Blok 102 & 106/10	66
Gambar 3.5 Lokasi Blok Kossor di Uzbekistan	68
Gambar 3.3 Batas-batas laut tiap negara di Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS dan Klaim dari China	72



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Kenaikan Konsumsi Minyak Per Hari India tahun 2010-2013	34
Grafik 3.1 Sumber minyak dunia yang belum ditemukan tahun 2012	44
Grafik 3.2 Kandungan Minyak negara-negara Asia-Pasifik (Milyar Barrel)	48



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Total Konsumsi Energi India Tahun 2011 38

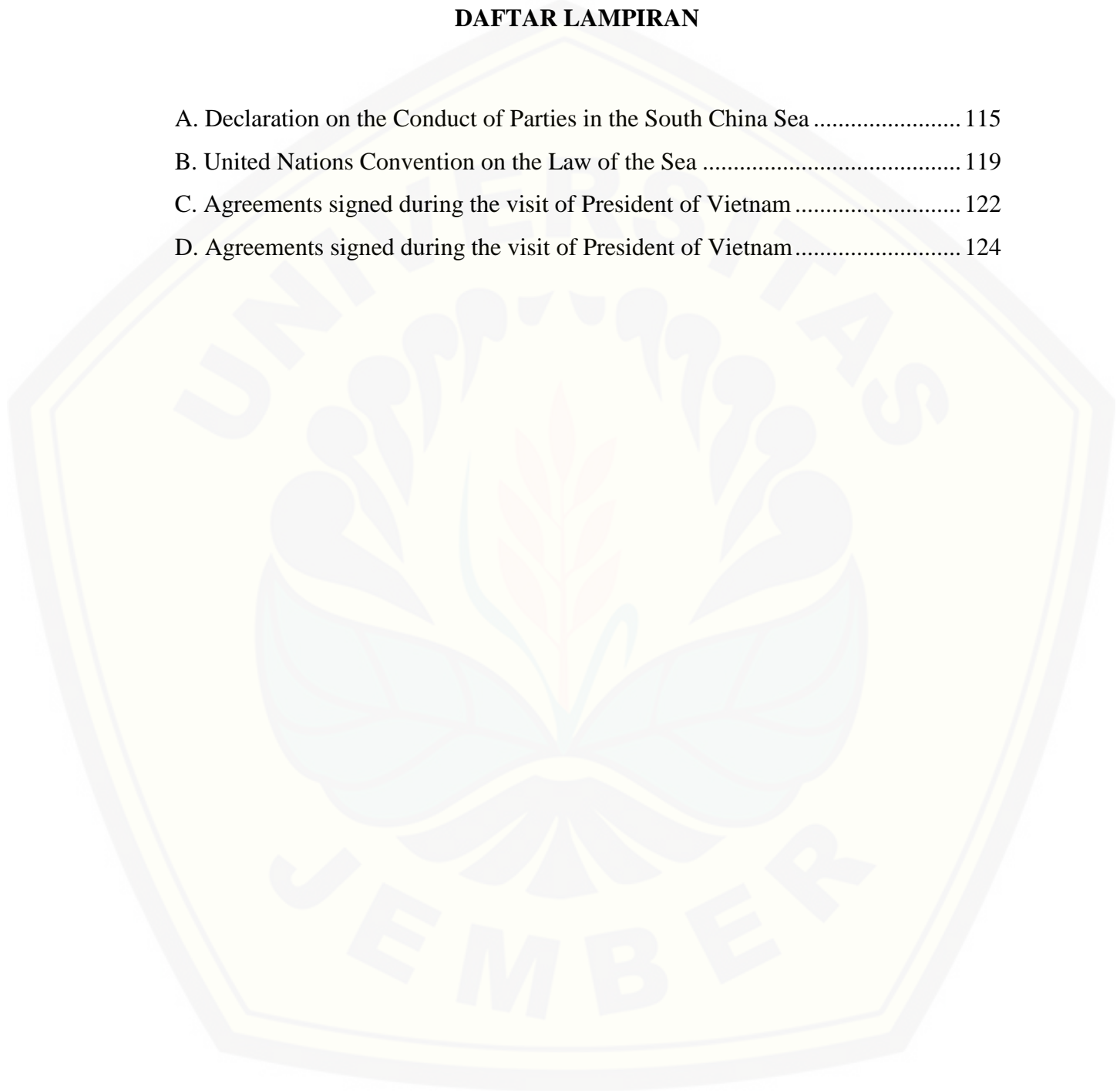


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kandungan minyak negara-negara Asia-Pasifik (Milyar Barrel)	5
Tabel 2.1 Data Produk Domestik Bruto India.....	28
Tabel 2.2 Data Konsumsi Minyak Global Per Hari	33
Tabel 2.3 Permintaan Energi Utama Dunia	36
Tabel 3.1 Tabel kronologi kerjasama minyak India-Vietnam.....	69
Tabel 3.2 Daftar Perjanjian yang ditandatangani pada waktu kunjungan Presiden Vietnam di India Tahun 2011.	75
Tabel 3.3 Daftar Perjanjian yang ditandatangani pada waktu kunjungan Presiden Vietnam di India Tahun 2013.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

A. Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea	115
B. United Nations Convention on the Law of the Sea	119
C. Agreements signed during the visit of President of Vietnam	122
D. Agreements signed during the visit of President of Vietnam.....	124



DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	= <i>Associations of South East Asian Nations</i>
BRIC	= <i>Brazil, Russia, India, China</i>
Btu	= <i>Britih Thermal Unit</i>
CNOOC	= <i>The Chinese National Offshore Oil Company</i>
IEA	= <i>International Energy Agency</i>
IEP	= <i>Integrated Energy Policy</i>
LEP	= <i>Look East Policy</i>
MoU	= <i>Memorandum of Understanding</i>
NELP	= <i>New Exploration Licensing Policy</i>
OVL	= <i>Oil and Natural Gas Corporation Limited</i>
PDB	= <i>Produk Domestik Bruto</i>
PI	= <i>Participating Interest</i>
PPP	= <i>Purchasing Power Parity</i>
PSC	= <i>Production Sharing Contract</i>
UNCLOS	= <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
USGS	= <i>U.S Geological Survey</i>
WEO	= <i>World Energy Outlook</i>
ZEE	= <i>Zona Ekonomi Ekklusif</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi merupakan salah satu elemen pokok dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara untuk tetap tumbuh pada level yang diharapkan. Untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonominya tetap tumbuh, maka perlu adanya ketersediaan energi bagi masyarakat dalam sebuah negara. Namun, fakta yang ditemui saat ini justru sangat kontradiktif dengan harapan banyak negara yang memiliki kepentingan dalam mewujudkan ketersediaan energi bagi warga negaranya. Banyak negara-negara yang saat ini dihadapkan pada situasi sulit untuk memperoleh sumber daya energi yang mudah dan murah. Sulitnya menjamin akses energi bagi sebuah negara kemudian seringkali menyebabkan konflik-konflik yang membuat fluktuasi harga dari sebuah energi seperti minyak menjadi sulit untuk dikendalikan. Kawasan Timur Tengah, Eropa Utara, serta Asia Pasifik merupakan beberapa regional yang mengalami konflik-konflik yang terjadi akibat kontestasi meraih ladang energi ini.

Kawasan Asia Pasifik merupakan wilayah yang tidak lepas dari konflik yang disebabkan adanya potensi energi yang dapat dieksplorasi atau dieksploitasi oleh sebuah negara. Salah satu episentrum timbulnya konflik dalam Kawasan Asia Pasifik adalah potensi energi yang terdapat dalam Laut China Selatan. Laut China Selatan merupakan kawasan yang diperkirakan mengandung minyak sebesar 11 bbl (*billion barrels*) dan 190 triliun meter kubik cadangan gas alam. Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan Laut China Selatan juga beragam. Selain sumber daya alam di Laut China Selatan, jalur pelayaran juga menjadi dasar utama yang menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai kawasan yang berpengaruh dalam

aktivitas politik luar negeri negara-negara lain.² Inilah yang kemudian menjadikan negara-negara lain sulit untuk tidak mengabaikan Laut China Selatan karena potensi sumber daya energinya serta letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan. Faktor kekayaan kandungan alam merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya eskalasi konflik yang fluktuatif dalam beberapa dekade terakhir di kawasan Laut China Selatan.

Eskalasi konflik di Laut China Selatan dimulai tepatnya pada tahun 1936 di mana pada saat itu rezim Kuomintang secara resmi mengumumkan garis batas wilayahnya yang dikenal dengan “*The Nine-Dashed Line*”.³ Peta yang mencantumkan garis batas wilayah ini kemudian secara resmi diproduksi pada tahun 1948 oleh Pemerintahan Nasionalis Republik China.⁴ Tindakan China ini kemudian memunculkan berbagai reaksi dari berbagai negara. Banyak negara yang menilai bahwa tindakan China memproduksi peta tersebut sebagai upaya untuk mengklaim Laut China Selatan. Berbagai reaksi tersebut dapat diredam oleh Pemerintah China melalui serangkaian perjanjian dengan Jepang serta Taiwan yang mempermasalahkan klaim dari China tersebut. Namun, pasca lahirnya hukum laut internasional yang dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), China pada akhirnya tidak memiliki *legal standing* yang cukup kuat untuk mengklaim Laut China Selatan karena salah satu butir UNCLOS menyatakan bahwa segala perjanjian unilateral maupun bilateral yang terjadi dalam sengketa multilateral merupakan

² Energy Information Administration. 2013. *The South China Sea is a critical world trade route and a potential source of hydrocarbons, particularly natural gas, with competing claims of ownership over the sea and its resources* diakses dari <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS> [14 April 2014]

³ Center for Strategic & International Studies. (Tanpa Tahun). *Asean and The South China Sea: A Security Framework Under Siege*. Washington DC: Center for Strategic & International Studies. Hal. 1

⁴ United States Department of State, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. (Tanpa Tahun). *Limit in the Seas*. Diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/234936.pdf> [2 April 2015]

perjanjian ilegal.⁵ Oleh karena itu, pasca lahirnya UNCLOS, banyak negara-negara pesisir Laut China Selatan yang kemudian berupaya melawan klaim dari China dengan berdasar dari UNCLOS.

Peningkatan eskalasi konflik mulai terjadi pada tahun 1995 di mana pada saat itu China, Taiwan, Filipina, serta Vietnam terlibat konflik di Kepulauan Spratly yang menyebabkan beberapa kapal laut Vietnam tenggelam dan 70 prajurit Vietnam gugur.⁶ Adapun penyebab dari konflik ini adalah ditemukannya indikasi bahwa China sedang membangun kekuatan militer di Kepulauan Spratly oleh Filipina.⁷ Tindakan China pada masa lalu tersebut merupakan bukti bahwa China berupaya untuk memperkuat posisinya sebagai hegemon di Laut China Selatan.

Walaupun upaya diplomatik telah berusaha diupayakan oleh negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa ini, namun China sampai saat ini masih tetap konsisten mempertahankan “*The Nine-Dashed Line*” miliknya. *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yang merupakan wadah dari beberapa negara yang bersengketa di wilayah Laut China Selatan seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, serta Indonesia pernah melakukan upaya mediasi dengan China terkait sengketa di wilayah tersebut yang kemudian melahirkan *Declaration on the Conduct of Parties*⁸ di Laut China Selatan pada tahun 2002, namun China menolak untuk tunduk pada deklarasi tersebut. China menginginkan bahwa upaya damai yang dilakukan di wilayah Laut China Selatan harus berdasarkan diplomasi

⁵ Tuong Nguyen. 2012. Uncertainty And Insecurity Generated By Claimants In South China Sea – Oped. Diakses dari <http://www.eurasiareview.com/22082012-uncertainty-and-insecurity-generated-by-claimants-in-south-china-sea-oped/> [2 April 2015]

⁶ Karmin Suharna, 2012. *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya bagi ketahanan Nasional*. Majalah Tannas. Edisi 94. Hal. 33

⁷ Marvin C. Ott. 2010. China’s Ambitions in South China Sea. *Asia Pacific Bulletin*. No. 71 (29 September 2010). Hal. 1

⁸ *Declaration on the Conduct of Parties* adalah deklarasi komitmen antara ASEAN dengan China untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi serta menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan secara damai. Lihat dalam ASEAN. (Tanpa Tahun). *DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES*. Diakses dari <http://www.asean.org/asean/external-relations/china/item/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea> [14 Januari 2015]

bilateral.⁹ Ada indikasi bahwa China ingin melancarkan ambisinya menguasai Laut China Selatan melalui diplomasi bilateral kepada negara-negara yang bersengketa di wilayah tersebut jika mengacu pada penolakan ini.

Penguasaan sepenuhnya atas wilayah Laut China Selatan dapat menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi negara-negara di sekitar Laut China Selatan serta negara-negara yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Klaim China di Laut China Selatan dapat diartikan sebuah klaim yang akan mencakup seluruh kekayaan alam di kawasan tersebut jika berbicara dalam konteks energi. Ancaman terhadap kebebasan navigasi juga menjadi polemik tersendiri bagi negara-negara yang menggunakan Laut China Selatan sebagai jalur perdagangannya seperti India, Jepang, maupun Amerika Serikat.

Salah satu negara yang merasa terancam dengan dominasi China yang semakin kuat dalam regional Laut China Selatan adalah India. India merupakan negara yang mempunyai fokus kepentingan dalam *energy security* untuk kebutuhan domestik. Sama seperti negara-negara lain bahwa kepentingan strategis New Delhi terletak pada keamanan sumber energi mereka.¹⁰ Kepentingan *energi security* tersebut kemudian menjadikan Laut China Selatan sebagai salah satu objek strategis politik luar negeri India di samping kepentingan-kepentingan India yang lain seperti kepentingan ekonomi serta geopolitik. Jika mengamati perkembangan perekonomian India yang begitu signifikan dalam beberapa dekade terakhir tepatnya pasca reformasi ekonomi India pada tahun 1991, India menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang mulai diperhitungkan keberadaannya.

India merupakan negara yang memiliki reputasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan (Produk Domestik Bruto di atas 2,7% pada 2011) bersama negara-negara

⁹ Sonika Gupta. 2013. Growing Tensions in South China Sea. *Institute of Peace and Conflict Studies*. Issue Brief No. 213 (May 2013). Hal. 5

¹⁰ Gauri Khandekar. 2011. Central Asia on New Delhi's Geostrategic Radar. *FRIDE Commentary*. No. 18 (October 2011). Hal. 1

lain seperti Brazil, Russia, India, China (BRIC). Negara-negara tersebut adalah negara yang mempunyai pengaruh penting dalam pasar energi Internasional.¹¹ India dan China contohnya, adalah negara yang memiliki ketergantungan cukup besar terhadap energi. Beberapa analis bahkan memprediksikan bahwa ketergantungan impor energi kedua negara ini akan mencapai skala 60-91% (China 60-80% dan India 91%) hingga tahun 2030.¹² Kondisi seperti ini kemudian melahirkan upaya India dan China untuk terus memperluas ladang minyaknya baik dalam lingkup domestik maupun luar negeri.¹³ Hal ini sangat beralasan mengingat India dan China merupakan negara-negara yang konsisten untuk terus dapat mencukupi kebutuhan energi domestiknya demi keberlanjutan perekonomian mereka. Berikut adalah tabel kandungan minyak negara-negara Asia-Pasifik yang mencatatkan India dan China sebagai negara urutan teratas dalam hal kandungan energi.

Tabel 1.1 Cadangan minyak negara-negara Asia-Pasifik (Milyar Barrel)

No.	Negara	2013	2014
1	China	23.716.000	24.375.600
2	India	5.476.138	5.654.400
3	Vietnam	4.400.000	4.400.000
4	Malaysia	4.000.000	4.000.000

Sumber: <http://www.ogj.com/articles/print/volume-111/issue-12/special-report-worldwide-report/worldwide-reserves-oil-production-post-modest-rise.html>

Berdasarkan data dalam tabel 1.1 yang dihimpun oleh penulis dari *Oil & Gas Journal*, China, India, dan Vietnam berturut-turut menduduki peringkat tiga teratas

¹¹ Draga Claudia Marin. (Tanpa Tahun). *The Strategies of BRICS' National Oil Companies for Energy Security : Joint Ventures Bargaining and Vertical Integration*. Paris:Paris Dauphine University. Hal. 1

¹² *Ibid.* Hal. 7

¹³ *Ibid.* Hal. 1

dalam permasalahan cadangan minyak di Asia-Pasifik.¹⁴ Reputasi ini kemudian menjadikan Vietnam sebagai suplai energi menjanjikan bagi India. Vietnam sendiri saat ini menduduki peringkat ketiga dari beberapa negara di Asia-Pasifik dengan cadangan minyak Vietnam mencapai 4,4 milyar barrel, meningkat 0,6 milyar barrel dari tahun sebelumnya.¹⁵

Vietnam dalam hal politik luar negeri memiliki kesamaan kepentingan dengan India di wilayah Laut China Selatan, persamaan tersebut kemudian diwujudkan dalam kerjasama minyak di Laut China Selatan.¹⁶ Ijin eksplorasi *Oil and Natural Gas Commission Videsh Limited* (OVL) kepada pemerintah Vietnam untuk pertama kali diperoleh pada Mei 1988. Pada saat itu OVL mengakuisisi blok 6.1 di lepas pantai Vietnam dan memperoleh 45% *Participating Interest*¹⁷ (PI).¹⁸ *British Petroleum* (BP) yang juga memiliki aset dalam blok 6.1 memperoleh 35% PI kemudian PetroVietnam dengan 20% PI.¹⁹ OVL kemudian melanjutkan produksi secara komersil pada tahun 2003. Pada tahun 2006, OVL mengakuisisi lagi dua blok minyak di Laut China Selatan yaitu blok 127 dan 128. Tetapi blok 127 kemudian dikembalikan kepada pemerintah Vietnam karena tidak ditemukan adanya hidrokarbon.²⁰ Namun, pemerintah Vietnam tetap meyakinkan OVL untuk tetap melanjutkan pengeboran di

¹⁴ End of Crude Oil. 2012. *Vietnam Energy Report*. Diakses dari <http://www.endofcrudeoil.com/2012/06/vietnam-energy-report.html> [16 Mei 2014]

¹⁵ Energy Information Administration. 2013. *Country Analysis Note* diakses dari <http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=VM> [14 April 2014]

¹⁶ Yogendra Singh. 2007. *India-Vietnam Relations The Road Ahead*. India: Institute of Peace and Conflict Studies. Hal. 4

¹⁷ Berdasarkan *Oilfield Glossary*, *Participating Interest* adalah proporsi biaya eksplorasi dan produksi yang akan ditanggung masing-masing pihak dan proporsi produksi yang akan diterima masing-masing pihak, sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Lihat Schlumberger. 2014. *participating interest* http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/p/participating_interest.aspx [11 April 2014]

¹⁸ Expose India Live. 2012. *OVL acquired Block 6.1 in Vietnam offshore : R.P.N. Singh*. Diakses dari <http://exposeindialive.com/eil/?p=20114> [11 April 2014]

¹⁹ R. Suryamurthi. 2012. *Tug of war over BP Vietnam asset*. Diakses dari http://www.telegraphindia.com/1101121/jsp/business/story_13202433.jsp [11 April 2014]

²⁰ Abhishek Shukla. 2012. *Oil's not well in South China Sea*. Diakses dari <http://www.thehindubusinessline.com/opinion/oils-not-well-on-south-china-sea/article3380669.ece> [12 April 2014]

Blok 128 dan menyatakan bahwa wilayah Blok 128 berada dalam perairan Vietnam. Permintaan dari Vietnam tersebut pada akhirnya meyakinkan India untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam eksplorasi hidrokarbon selama tiga tahun pada tahun 2011.²¹

Pada akhir tahun 2013 Perdana Menteri India Mamnohan Singh menerima kunjungan negara Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong guna membahas berbagai rencana strategis yang akan dilakukan antara India dengan Vietnam. Kunjungan tersebut kemudian menghasilkan sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah Vietnam dengan India yang mana salah satu butirnya menjelaskan tentang beberapa blok minyak baru yang ditawarkan oleh pemerintah Vietnam kepada India. Dari berbagai sumber yang diketahui oleh penulis setidaknya terdapat tujuh blok baru yang ditawarkan oleh PetroVietnam kepada India selain blok 127 dan blok 128 yang telah dikelola bersama sebelumnya. Tujuh blok minyak baru yang ditawarkan yaitu blok 17, 41, 43, 10, 11-1 & 102 dan 106/10.²²

Masalahnya, situasi semakin rumit ketika Perusahaan Minyak Nasional China yaitu *The Chinese National Offshore Oil Company* (CNOOC) juga membuka sembilan blok di kawasan yang menjadi wilayah kerjasama antara India dengan Vietnam. China mengumumkan pembukaan sembilan blok ini secara resmi pada 25 Juni 2012 di mana dalam pembukaan sembilan blok tersebut, blok 128 yang telah dikelola oleh ONGC menjadi salah satu wilayah yang mengalami tumpang tindih kawasan (*overlapping area*) karena adanya klaim blok minyak dari China.²³

²¹ Maj. Gen PK Chakravorty. 2013. *China's Assertiveness in South China Sea: Vietnam's Response and Implications for India*. Diakses dari <http://www.vifindia.org/article/2013/november/19/china-s-assertiveness-in-south-china-sea-vietnam-s-response-and-implications-for-india> [22 Maret 2014]

²² DNA India. 2013. *India-Vietnam ink pact to expand oil exploration in South China Sea*. Diakses dari <http://www.dnaindia.com/india/report-india-vietnam-ink-pact-to-expand-oil-exploration-in-south-china-sea-1922248> [24 Maret 2014]

²³ Rosalind Reischer. 2012. *India's Look East Policy in the South China Sea*. Diakses dari <http://thediplomat.com/2012/08/indias-look-east-policy-in-the-south-china-sea/> [5 Januari 2015]

Ambisi China untuk dapat sepenuhnya menguasai wilayah Laut China Selatan adalah sebuah ancaman potensial bagi kerjasama India dengan Vietnam. Hegemoni China di wilayah ini juga berpotensi untuk dapat mengganggu kepentingan nasional India dan Vietnam. Kontrol sepenuhnya atas lalu lintas maritim di Laut China Selatan oleh China akan memiliki dampak yang signifikan bagi kepentingan nasional India terlebih dalam Implementasi “*look east policy*” (LEP) India.²⁴ Dampak yang lebih lanjut kemudian juga dirasakan dalam intensitas perdagangan India dengan negara-negara ASEAN termasuk Vietnam.

Fenomena ini menurut hemat penulis menjadi menarik untuk dicermati. Pergerakan India dalam menjalin kerjasama bilateral dengan Vietnam karena blok minyak yang ditawarkan oleh Vietnam merupakan daerah-daerah rawan konflik bisa saja mengundang reaksi negatif dari China. Reaksi tersebut sangat beralasan mengingat China merupakan negara yang memiliki kepentingan untuk dapat memperluas hegemoninya dalam wilayah Asia-Pasifik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis karya tulis dengan judul:

“KERJASAMA INDIA-VIETNAM DALAM EKSPLORASI MINYAK SEBAGAI RESISTENSI ATAS KLAIM CHINA DI LAUT CHINA SELATAN”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam suatu karya tulis ilmiah ruang lingkup pembahasan merupakan bagian yang penting untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Tujuan dari pembatasan masalah adalah untuk menuntun penulis melakukan analisis sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Ruang lingkup pembahasan juga membantu penulis agar menghindari penjelasan yang terlalu

²⁴ Munmun Majumdar. 2013. India Stake's in the South China Sea. *Int. J. Human. Soc. Sci.*, 2 (1): Vol. 3 No. 13 Hal. 244

meluas. Ruang lingkup pembahasan terdiri dari dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi berguna untuk menunjukkan ruang pembahasan objek analisa dari suatu masalah. Batasan materi digunakan oleh penulis agar pembahasan materi tidak keluar dari permasalahan yang telah ditentukan. Dalam karya ilmiah ini, batasan materi penulis memfokuskan pada langkah-langkah strategis India dalam melakukan kerjasama eksplorasi minyak sebagai bentuk resistensi terhadap klaim wilayah sepihak yang dilakukan oleh China di wilayah perairan Laut China Selatan.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sejak India menyepakati kerjasama dengan Vietnam dalam periode 2006 s.d 2013 dimana terdapat dua perjanjian bilateral yang sarat kepentingan dalam membendung ambisi China di Laut China Selatan. Tahun 2006 menjadi titik awal dari penelitian karena pada tahun ini adalah awal dari diakuisisinya blok 127 dan blok 128 yang terletak dalam wilayah perbatasan Vietnam. Penulis memberi batasan waktu pada tahun 2013 karena pada tahun ini terdapat kesepakatan terakhir antara India dengan Vietnam dalam hal eksplorasi minyak.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, peneliti harus memahami permasalahan penelitiannya. Dengan demikian peneliti bisa memaparkan pembahasan penelitiannya secara fokus dan terarah. Menurut Kartini Kartono, masalah ialah

sebarang situasi yang punya sifat-sifat khas (karakteristik) yang belum mapan atau yang belum diketahui untuk dipecahkan atau diketahui secara pasti.²⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Kerjasama Eksplorasi Minyak India-Vietnam dapat berfungsi sebagai resistensi atas klaim China di Laut China Selatan?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara rinci kerjasama eksplorasi minyak India dengan Vietnam di wilayah Laut China Selatan. Melalui pendeskripsian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Vietnam dan India dalam menjalin kerjasama bilateral untuk memberikan perlawanan atas klaim-klaim di wilayah perbatasan Vietnam yang dilakukan oleh China. Strategi yang dipakai oleh kedua negara dalam menjalin kerjasama bilateral diharapkan juga dapat memberikan pencerahan kepada pembaca tentang bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang digunakan oleh Vietnam dan India dalam menolak klaim sepihak yang dilakukan oleh China dalam wilayah kedaulatan Vietnam.

1.5 Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam melakukan suatu penelitian yang bersifat alamiah, diperlukan adanya teori maupun konsep sebagai pijakan awal. Teori berfungsi untuk memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, fenomena tersebut akan sulit dipahami, di sisi lain teori juga berupa sebuah bentuk pernyataan yang

²⁵ Kartono K. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 18

menghubungkan konsep-konsep secara logis.²⁶ Teori maupun konsep juga berfungsi sebagai pisau analisa untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan dan hipotesa yang sudah dibentuk. Konsep menurut Mochtar Mas'ood adalah abstraksi yang mewakili objek, sifat suatu objek, atau fenomena tertentu. Kita menggunakannya sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasar ciri-cirinya yang kompleks dan relevan bagi kita.²⁷ Sementara teori yang baik adalah basis bagi pengembangan pengetahuan yang layak dipercaya dan berdasarkan kenyataan.²⁸ Charles A. Mc.Clelland mendefinisikan teori sebagai berikut:

“Teori merupakan kerangka dasar untuk mengatur fakta-fakta, teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan, teori merupakan seperangkat pernyataan mengenai keadaan yang diharapkan, teori merupakan pikiran spekulatif, bebas dari ikatan dengan dunia nyata, teori merupakan abstraksi.”²⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menggunakan teori yang diasumsikan relevan dengan permasalahan yang dianalisis, yaitu konsep resistensi, konsep *hedging*, konsep *energy security*, konsep kerjasama internasional, dan konsep geopolitik. Penulis merasa bahwa beberapa konsep tersebut dapat mendukung analisis yang akan penulis gunakan dalam fenomena ini.

Konsep resistensi merupakan konsep yang dapat menjadi pisau analisis dalam menganalisis fenomena perlawanan yang dilakukan oleh India dengan Vietnam melalui kerjasama minyak. Kemudian konsep *hedging* dapat menjadi pisau analisis yang tepat untuk menganalisis kerjasama antara India dengan Vietnam dalam Laut China Selatan. Hal ini sangat beralasan mengingat dalam kerjasama tersebut berkaitan erat dengan konsepsi *hedging*. Konsep *hedging* sendiri merupakan konsep

²⁶ Plano J. C. 1992. *The International Relation Dictionary*. Santa Barbara: California Press. Hal. 7

²⁷ Mochtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal 94.

²⁸ *Ibid.* hal 219.

²⁹ Charles A. Mc.Clelland. 1986. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Jakarta: CV. Rajawali. Hal 10

yang didefinisikan sebagai sebuah strategi yang bertujuan untuk menghindari situasi di mana negara tidak bisa memutuskan alternatif yang lebih mudah seperti *balancing*, *bandwagoning*, atau *netralitas*. Konsep *energy security*, Ekonomi Politik Internasional, serta konsep geopolitik akan dapat menjadi alat analisis yang tepat untuk menganalisis faktor kepentingan nasional maupun faktor-faktor geopolitik dari India.

1.5.1 Konsep Resistensi

Untuk dapat mengantarkan pembaca terhadap fenomena yang penulis teliti dalam kerjasama eksplorasi minyak antara India dan Vietnam, maka diperlukan pemahaman mengenai resistensi itu sendiri. Konsep dasar yang digunakan oleh seorang penulis akan sangat menentukan kekuatan analisis dari sebuah karya ilmiah. Maka, penulis kemudian memutuskan untuk menggunakan konsep resistensi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Resistensi dapat dipahami cukup luas sebagai proses sadar yang mencoba untuk mengubah praktek-praktek yang tidak diinginkan, proses yang sedang berlangsung dalam bentuk strategi politik tertentu melawan sesuatu. Resistensi dengan demikian dapat dianggap sebagai bentuk, atau cara pengorganisasian, kekuatan yang bertujuan untuk mengubah praktek-praktek politik yang tidak diinginkan atau kekuasaan yang ada. Sampai saat ini, resistensi telah dipahami sebagai gerakan perlawanan, biasanya didefinisikan sebagai gerakan terorganisir berkomitmen untuk menolak (mencoba untuk mengubah) kebijakan pemerintah (atau penguasa kedudukan) dengan salah satu kekerasan atau tanpa kekerasan berarti. Yang pasti, gerakan resistensi dalam arti umum yang dianggap sebagai upaya terorganisasi yang bertujuan mengubah sifat kekuatan yang tidak diinginkan.³⁰

³⁰ Tiina Seppala. 2010. *Globalizing Resistance against War ? A Critical Analysis of the Theoretical Debate through a Case Study of the New Anti-War Movement in Britain*. Rovaniemi: Lapland University Press. Hal. 38

Fenomena resistensi dalam kerjasama eksplorasi minyak antara India dan Vietnam merupakan salah satu fenomena yang mengejutkan konsep resistensi. Berawal dari adanya klaim yang dilakukan China hingga kemudian memunculkan resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan yaitu India dan Vietnam. Situasi semakin kompleks ketika China dengan sepihak melakukan sabotase terhadap aktivitas eksplorasi minyak dari Vietnam di mana tindakan China tersebut semakin menjelaskan posisi China sebagai pihak yang tidak diinginkan oleh Vietnam. Sehingga, resistensi yang dilakukan oleh India dan Vietnam merupakan strategi politik kedua negara tersebut dalam mengubah sifat dari China. Strategi politik India dengan Vietnam tersebut merupakan sedikit deskripsi yang penulis sajikan, selebihnya akan penulis jelaskan dalam bab analisis.

1.5.2 Konsep Hedging

Hedging dapat didefinisikan sebagai sebuah strategi yang bertujuan untuk menghindari situasi di mana negara tidak bisa memutuskan alternatif yang lebih mudah seperti *balancing*, *bandwagoning*, atau *netralitas*. Evelyn Goh mengemukakan konsep ini dengan tiga elemen utama dalam konteks memahami negara-negara Asia Tenggara, yaitu: *Indirect Balancing* atau *soft balancing*, kerjasama kompleks (*complex engagement*), dan *enmeshment strategy*.³¹

Indirect balancing atau *Soft Balancing* dapat diartikan sebagai upaya perimbangan kekuatan secara tidak langsung misalkan Amerika Serikat yang ingin mengimbangi kehadiran Cina di kawasan Laut China Selatan melalui ASEAN. Kerjasama kompleks (*complex engagement*) dilakukan untuk menghadapi Cina di kawasan dengan harapan Cina mau konform terhadap norma-norma yang telah ada. *Enmeshment* merupakan strategi untuk mengundang negara-negara kuat untuk masuk

³¹ Evelyn Goh. 2005. *Meeting The China Challenge: The U.S in Southeast Asian Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal. viii

terlibat ke dalam kawasan dengan harapan mereka menjadi memiliki andil dan kepentingan untuk ikut menjaga stabilitas kawasan.³²

Hedging merupakan konsep yang berbeda dengan konsep perimbangan kekuasaan karena hedging tidak bertujuan untuk membentuk sistem internasional yang multipolar. Namun, Konsep *hedging* secara jelas akan membentuk sistem distribusi kekuasaan yang hierarkis dalam dunia internasional. Hierarkisnya distribusi kekuasaan menurut konsep hedging adalah seperti adanya Amerika Serikat sebagai negara superpower yang lebih besar, kemudian China sebagai negara kuat secara regional, serta Jepang, dan Korea Selatan sebagai negara-negara negara kuat secara regional dalam lapisan kedua.³³

1.5.3 Konsep Kerjasama Internasional

Kalevi Jaakko Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut; pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Pandangan atau harapan dari suatu negara ini adalah bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. Persetujuan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih adalah dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.³⁴

Selain itu, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara barat dicorakkan oleh interdependensi kompleks. Ketika terdapat derajat

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* Hal. 34

³⁴ Kalevi Jaako Holsti. 1988. *Politik Internasional. Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*. Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga. Hal. 652-653

interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi untuk memajukan kerjasama lintas batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya, institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama.³⁵

Konsep ini kemudian akan digunakan penulis untuk menjelaskan fenomena antara India dengan Vietnam. Fenomena yang terjadi antara India dengan Vietnam merupakan fenomena kerjasama bilateral yang dalam substansi kerjasama tersebut dapat membantu masing-masing negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Konsep ini akan menjelaskan bahwa kerjasama internasional merupakan jalan yang berusaha mengakomodasi kepentingan dimana India mempunyai kepentingan memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik sedangkan Vietnam mengajak India dalam eksplorasi kawasan sengketa dengan China untuk memperkuat posisi tawar Vietnam.

1.5.4 Konsep Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi Politik Internasional (EPI) merupakan studi tentang keterkaitan dan interaksi antara politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dengan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat.³⁶ Ekonomi politik internasional adalah bagaimana cara mendapatkan kekayaan melalui kekuasaan dan adanya interrelasi antara pasar dan politik. Hubungan antara ekonomi dan politik ditekankan pada kepentingan nasional atau

³⁵ Robert Jackson dan George Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 63-64

³⁶ Mochtar Mas' oed. 2003. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Hal. 4

national interest karena perhatian besar dari adalah mengenai isu-isu tentang kekayaan dan kemiskinan, tentang siapa mendapat apa dalam sistem internasional.³⁷

Setiap negara tentunya menginginkan keuntungan yang besar bagi negaranya, untuk itu keputusan dan tindakan-tindakan politik dibutuhkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.³⁸ Robert Gilpin dalam bukunya *“The Nature of Political Economy”* pernah menjelaskan bahwa negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti berkeinginan untuk memenuhi kepentingannya. Untuk mencapai hal tersebut negara dapat memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan power dan pengaruh.³⁹

Kerjasama antara India dengan Vietnam dapat dikatakan sangat merepresentasikan kepentingan nasional dari India dimana dalam kerjasama ini India berkepentingan untuk mencukupi kebutuhan energi domestik mereka. Sejalan dengan berbagai sumber yang telah banyak menyatakan bahwa India adalah negara yang hampir sama dengan China dalam hal energi dimana ketergantungan mereka terhadap impor energi masih sangat besar. Besarnya ketergantungan tersebut kemudian melahirkan kepentingan ekonomi yang cukup kuat bagi India dalam menjalin kerjasama dengan Vietnam dalam hal eksplorasi minyak.

Konsep ini akan digunakan penulis untuk menjelaskan tentang fenomena kerjasama antara India dengan Vietnam. Fenomena yang terjadi antara India dengan Vietnam merupakan fenomena kerjasama bilateral yang dalam substansi kerjasama tersebut dapat membantu masing-masing negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Konsep ini akan menjelaskan bahwa kerjasama internasional merupakan jalan yang berusaha mengakomodasi kepentingan dimana

³⁷ Robert Jackson & George Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 228

³⁸ Thomas Oatley. 2004. International Political Economy: Interest and Institution in The Global Economy. London: Longman. Hal.96

³⁹ Robert Gilpin. 2001. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton: Princeton University Press. Hal. 78

India mempunyai kepentingan memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik sedangkan Vietnam mengajak India dalam eksplorasi kawasan yang dipermasalahkan dengan China untuk memperkuat bargaining position dari Vietnam.

1.5.5 Konsep *Energy Security*

Keamanan dalam konteks global telah berkembang menjadi isu utama yang sangat diperhatikan oleh berbagai negara. Isu-isu keamanan kemudian telah berhasil membuat para pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk mempertimbangkan aspek keamanan guna mendukung terjaminnya keberlangsungan hidup seluruh warga negaranya. Salah satu aspek keamanan yang menjadi fokus utama berbagai negara adalah keamanan dalam hal energi. Keamanan dalam hal ini menjadi salah satu isu utama yang tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik dan ekonomi negara-negara maju maupun berkembang. Negara akan lebih mudah untuk memberikan stabilitas ekonomi dan politik bagi warga negaranya ketika negara dapat menjamin keamanan energi bagi warga negaranya.

Paul D. Williams menjelaskan bahwa kompleksitas peradaban manusia akan menuntut manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka yang paling dasar yaitu energi. Dalam konteks kehidupan yang lebih modern kebutuhan akan energi lebih sering diidentikkan dengan kebutuhan penting yang sangat dibutuhkan dalam menunjang maksimalnya output yang akan dikeluarkan oleh industri-industri di sebuah negara. Output yang maksimal dari industri-industri tentunya akan membawa pendapatan yang tinggi bagi industri-industri sehingga dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Dunia internasional saat ini telah mencapai masa dimana kebutuhan akan minyak tidak dapat lagi dikatakan sebagai kebutuhan dengan biaya terjangkau.⁴¹ Tren dari permintaan energi global yang semakin meningkat kemudian menjadi beberapa

⁴⁰ Paul D. Williams. *Op. Cit*

⁴¹ Geoff Hiscock. *Op. Cit*

indikator utama. Inilah menjadi landasan negara-negara besar untuk berusaha memperluas ladang energi mereka. Momentum ke arah tersebut kemudian semakin terbuka lebar pasca pulihnya ekonomi dunia yang sempat dihantam resesi global terutama di negara-negara Asia Selatan dan Asia Timur. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadikan sumber daya energi di Laut China Selatan menjadi salah satu opsi untuk dapat menolong negara-negara dalam hal ketidakamanan energi.⁴²

Tidak ada standar khusus dalam permasalahan *energy security*, mayoritas analis mendefinisikan *energy security* sebagai sebuah urgensi bagi negara untuk menjamin kecukupan pasokan energi bagi negaranya baik di saat damai ataupun krisis internasional.⁴³ Negara selalu dituntut untuk mendapatkan persediaan energi yang efisien. Tuntutan tersebut adalah untuk memuaskan kebutuhan nasional karena kebutuhan dari setiap negara akan berkesinambungan dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, pertumbuhan industrialisasi, pendapatan yang bertambah, dan warga negara biasa juga akan membutuhkan pasokan energi tambahan (khususnya pengendara mobil).⁴⁴ India dengan China juga telah mengidentifikasi negaranya sebagai negara yang memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap energi. Beberapa analis bahkan memprediksi bahwa ketergantungan impor energi kedua negara ini akan mencapai skala 60-91% hingga tahun 2030.⁴⁵ Kondisi seperti ini yang kemudian melahirkan upaya India dengan China untuk terus memperluas ladang minyaknya baik dalam lingkup domestik maupun luar negeri.⁴⁶

Konsep Energi Security inilah yang kemudian turut menentukan bagaimana sikap dan kepentingan negara-negara di sekitar wilayah Laut China Selatan (termasuk China, Vietnam, dan Filipina). Selain aktor-aktor dari kawasan Laut China Selatan tersebut, negara-negara besar juga turut andil memberikan dinamisasi dalam

⁴² Will Rogers. 2013. *Finding Common Ground : Energy, Security, and Cooperation in the South China Sea*: Center For A New American Security. Hal. 1

⁴³ Paul D. Williams. 2008. *Security Studies An Introduction*. London: Routledge. Hal. 484

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 485

⁴⁵ Draga Claudia Marin. *Op. Cit.* Hal. 7

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 1

konstelasi di Laut China Selatan. Andil negara-negara besar seperti India, Jepang, Australia hingga Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah karena negara-negara tersebut kemudian turut mempengaruhi kepentingan masing-masing negara di Laut China Selatan dalam ekspansi maupun eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) di kawasan tersebut.⁴⁷

Jika mengacu pada konsep *energy security* ini, agenda pembangunan energi yang dimulai dari LEP India adalah sebuah pijakan bagi kepentingan nasional mereka dalam meraih keamanan energi. Secara bilateral undangan eksplorasi minyak yang diberikan oleh Vietnam kemudian memberikan implikasi yang strategis bagi India. Akibatnya, India bersedia untuk mengeksplorasi di daerah yang berbatasan dengan klaim Beijing di Laut China Selatan untuk mengamankan akses komersial dalam deposit minyak dan gas alam di wilayah ini, dan juga mengikat tujuan keamanan energi dengan keterlibatan strategis ke arah timur.⁴⁸

1.5.6 Konsep Geopolitik

Tidak dapat disangsikan bahwa dalam konteks hubungan internasional kontemporer letak geografis telah menjadi sebuah komoditas penting dalam mendukung kepentingan nasional setiap negara. Konsep geopolitik sendiri adalah perpaduan antara kondisi geografis dengan kekuatan tiap-tiap negara dalam regional tertentu dalam mewujudkan kepentingan nasional mereka⁴⁹ atau dalam arti lain geopolitik dapat didefinisikan sebagai sebuah rasionalisasi kekuatan politik.⁵⁰ Korelasi inilah yang kemudian akan menentukan bagaimana setiap negara mengambil tindakan dalam memberdayakan sumber daya yang ada dalam wilayah geografis mereka. Dalam pengertian lain geopolitik adalah pertempuran antara ruang dan power yang dimainkan dalam letak geografis yang didalamnya mencakup geopolitik militer,

⁴⁷ Rogers, W. *Op. Cit.* Hal. 4

⁴⁸ Rogers, W. *Op. Cit.* Hal. 5

⁴⁹ Encyclopedia Britannica. 2010. *Encyclopædia Britannica Online*. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/229932/geopolitics>. [13 Agustus 2014]

⁵⁰ Hagan, C. B. Geopolitics. *The Journal of Politics*: Vol. 4. No. 4. 1942.

diplomasi geopolitik, dan juga geopolitik energi. Untuk sumber daya alam dan jalur perdagangan yang membawa sumber daya kepada konsumen merupakan pusat studi geopolitik karena setiap tatanan internasional saat ini adalah berdasarkan pada sumber daya energi.⁵¹

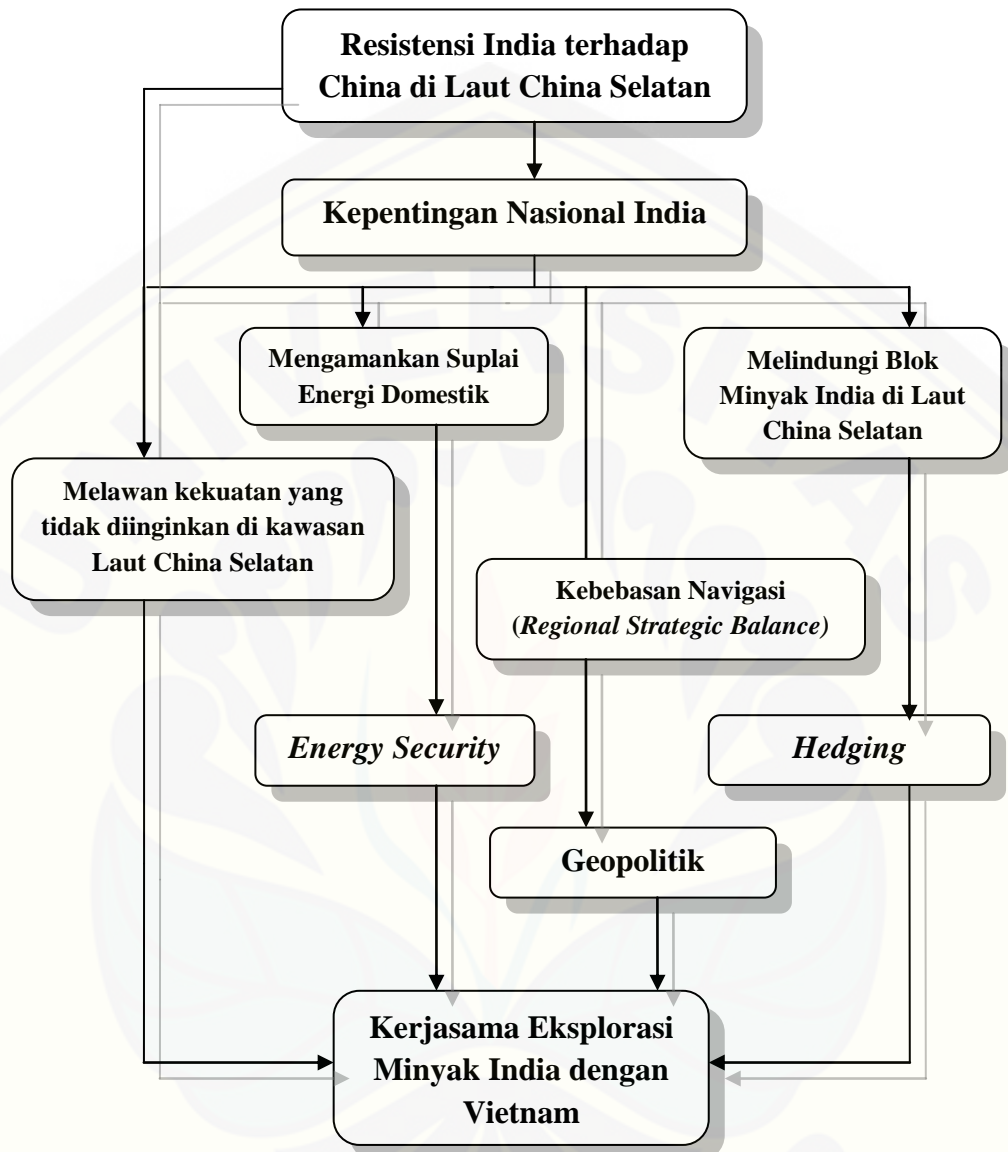
Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa faktor geografis juga menjadi salah satu alat dalam mengoptimalkan kekuatan politik tiap-tiap negara. Kekuatan politik tersebut kemudian dapat diimplementasikan melalui kerjasama secara ekonomi maupun politik ataupun melalui aliansi yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kekuatan militernya. Inilah yang kemudian disebut sebagai output dari geopolitik.

Fenomena kerjasama yang dijalin oleh India dengan Vietnam adalah fenomena yang dapat dipahami sebagai fenomena geopolitik dari India dalam aksesnya untuk memberikan pengaruh dalam wilayah Asia Pasifik. Hal ini terlihat dalam pengelolaan blok 127 dan blok 128 yang terletak dalam wilayah kedaulatan Vietnam. Kedua blok tersebut telah dilaporkan tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi India atau dalam bahasa yang dikemukakan oleh *The Hindu* adalah “*Financially Disastrous*”.⁵² Ketiadaan energi hidrokarbon yang awalnya sempat menjadi target utama India ternyata tidak membatalkan kerjasama yang telah dijalin oleh India dengan Vietnam. Pasca laporan yang tidak menguntungkan bagi India, India kemudian berupaya untuk mengakumulasi kekuatan politik mereka untuk dapat memberikan implikasi geopolitik bagi kehadiran China di wilayah perbatasan Vietnam.⁵³

⁵¹ Robert D. Kaplan. 2014. *The Geopolitics of energy*. Diakses dari <http://www.forbes.com/sites/stratfor/2014/04/04/the-geopolitics-of-energy/> [13 Agustus 2014]

⁵² Sandeep Dikshit. 2013. *India Offers Vietnam seven oil blocks in south china sea*. www.thehindu.com/news/national/vietnam-offers-india-seven-oil-blocks-in-south-china-sea/article5372744.ece [14 Agustus 2014]

⁵³ Nicolas Jenny. 2014. *Forget Oil and Gas, the South China Sea Just Got More Complicated*. <http://www.internationalpolicydigest.org/2014/03/18/forget-oil-gas-south-china-sea-just-got-more-complicated/> [14 Agustus 2014]



Bagan 1.1 Bagan Analisis Kerjasama India dengan Vietnam

Dari beberapa teori diatas dapat dipahami bahwa permasalahan kerjasama India dengan Vietnam adalah permasalahan kompleks yang dapat berdampak pada stabilitas regional. Jika India tidak dapat memberikan pengaruhnya dalam wilayah Asia Pasifik maka dikhawatirkan India akan mengalami kekalahan dalam kontestasi hegemoni dengan China. Dampak yang kemudian dihasilkan dari kerjasama dengan

Vietnam bagi India adalah secara ekonomi akan memberikan keuntungan bagi pasokan energi India. Keuntungan ini adalah salah satu misi India dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya yaitu meraih keamanan dalam bidang energi yang dalam hal ini mereka menjadikan Vietnam sebagai mitra strategis demi terwujudnya kepentingan tersebut.

1.6 Argumen Utama

Kerjasama India dengan Vietnam dalam eksplorasi minyak dapat berfungsi sebagai resistensi atas klaim China di Laut China Selatan dengan menjadikan kerjasama tersebut sebagai langkah strategis India dalam mengimplementasikan *Look East Policy* (LEP) mereka yang ingin mempererat hubungan di wilayah Asia Timur baik secara ekonomi maupun politik. India melakukan eksplorasi dalam wilayah yang ditawarkan oleh Vietnam sebagai upaya untuk menjamin keamanan energinya. India menyetujui kerjasama dengan Vietnam sebagai langkah untuk melindungi aset-aset dari India di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam. Kerjasama India dengan Vietnam di wilayah sengketa di Laut China Selatan merupakan upaya India dalam melawan kekuatan yang tidak diinginkan yaitu China yang berupaya untuk menguasai Laut China Selatan. India berusaha membantu Vietnam dalam memberikan perlawanan kepada China agar tidak mengancam kebebasan navigasi India di Laut China Selatan yang dapat berdampak bagi jalur perdagangan India.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian tidak dapat dihilangkan dalam karya tulis ilmiah. Penggunaan metode penelitian sangat berguna dalam pembentukan kerangka pemikiran dan pengolahan data yang telah didapat, sehingga sebuah karya tulis ilmiah menjadi lebih sistematis. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis membagi metode

penelitian menjadi dua bagian yaitu, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur. Dengan menggunakan studi literatur, maka penulis tidak terjun langsung ke lapangan dalam melakukan penelitian dan cukup merujuk pada informasi yang sudah ada dan dianggap memiliki tingkat relevansi dengan fenomena yang dianalisa. Sehingga dalam hal ini, data-data yang digunakan sebagai bahan penunjang merupakan jenis data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut, penulis menggunakan berbagai sumber informasi antara lain :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Koleksi pribadi seperti buku, jurnal, dan artikel
4. Media internet

1.7.2 Teknik Analisis Data

Analisis data menjadi sangat penting dilakukan untuk menyederhanakan permasalahan dan untuk mendapatkan interpretasi baru dari sebuah fenomena. Metode analisis data yang dipakai dalam karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan suatu penggambaran umum dari fenomena yang diangkat dan dengan menggunakan studi literatur.

Dalam analisa berfikir, penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif berangkat dari prinsip-prinsip umum yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah atau khusus. Setelah itu masing-masing preposisi diuji dengan menelaah peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat

apakah kasus-kasus khusus tersebut bisa dijelaskan atau bahkan diramalkan berdasarkan kerangka pemikiran yang dipakai.⁵⁴

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membagi menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Energi India.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan kebijakan energi India. Bab ini akan menjelaskan lebih dalam tentang konsumsi dan kebutuhan energi dalam negeri India. Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang strategisnya kawasan Laut China Selatan bagi India sebagai bagian dari politik luar negerinya.

BAB III: Kerjasama Eksplorasi Minyak antara India dan Vietnam

Dalam bab ini penulis akan menguraikan ambisi dan kepentingan India dalam wilayah Laut China Selatan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang ambisi India yang ingin memperluas pengaruhnya dalam kawasan Asia Pasifik. Perluasan pengaruh secara besar-besaran oleh India tersebut akan dijelaskan oleh penulis dengan mengacu pada peningkatan aktivitas kerjasama India di kawasan Asia Pasifik terutama Asia Tenggara.

⁵⁴Mochtar Masoed. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta:PT Pustaka LP3ES Indonesia. Hal.80.

BAB IV: Resistensi India dan Vietnam Terhadap Klaim China di Laut China Selatan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan langkah-langkah yang ditempuh India dan Vietnam melakukan kerjasama eksplorasi minyak bersama di Laut China Selatan. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan langkah India dengan Vietnam dalam memberikan perlawanan kepada China atas klaim yang dilakukan China di wilayah Laut China Selatan.

BAB V: Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari karya ilmiah ini.

BAB II

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN ENERGI INDIA

Bab ini akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi India yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi India yang signifikan telah memberikan dampak terhadap konsumsi energi India yang semakin hari semakin besar hingga kemudian memunculkan masalah nasional baru bagi India. Permasalahan energi nasional inilah yang pada akhirnya menjadi fokus utama pemerintahan India dalam mengendalikan visi jangka panjang kebijakannya.

Bab ini juga akan menjelaskan kondisi perekonomian nasional Vietnam yang sangat bergantung pada investasi asing. Investasi asing inilah yang kemudian juga mempengaruhi kebijakan energi nasional Vietnam.

2.1 India

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi India

India merupakan salah satu kekuatan ekonomi dengan progresivitas ekonomi yang cukup signifikan dalam perekonomian global. Ketahanan ekonomi India dalam menghadapi krisis finansial global telah menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Perkembangan Ekonomi India yang mengesankan kemudian membuat negara ini sejajar dengan kekuatan-kekuatan baru perekonomian global yaitu Brazil, Rusia, India, dan China yang populer dengan akronim BRIC.⁵⁵

Sebagai negara dengan pertumbuhan kelas menengah yang besar, India telah menarik perhatian pasar baru dunia dengan banyak konsumen potensial. Dalam lingkup Asia, para pembuat kebijakan dan perusahaan-perusahaan pribadi sama-sama

⁵⁵ Jaganath P. Panda. 2013. *BRICS and The China-India Construct: A New World Order in Making ?*. New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses. Hal. 87

melihat India sebagai pasar regional untuk ekspor dan proyek skala besar. India juga terus meningkatkan strategi ekonomi secara regional, khususnya Afghanistan, Pakistan, China, dan ASEAN.⁵⁶

Pertumbuhan perekonomian dalam negeri India telah menempatkan India sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga dunia di masa depan. India sendiri memiliki reputasi dalam pertumbuhan ekonomi yang signifikan (Produk Domestik Bruto diatas 2,7% pada 2011) bersama negara-negara ekonomi baru yang lain seperti Brazil, Russia, India, China (BRIC). Negara-negara tersebut adalah negara yang mempunyai pengaruh penting dalam pasar energi Internasional.⁵⁷ Hal tersebut sangat berdasar mengingat beberapa analis bahkan memprediksi bahwa perekonomian India akan tumbuh dari yang awalnya hanya US\$ 1,8 Triliun menjadi US\$ 30 Triliun pada 2030.⁵⁸

Signifikansi ekonomi yang begitu besar telah menuntun India untuk berperan lebih aktif dalam perekonomian global. India yang berhasil menumbuhkan perekonomiannya secara signifikan berhasil menarik negara-negara lain untuk dapat bekerjasama dengannya. Ketertarikan dari negara-negara lain ini untuk bekerjasama kemudian diperkuat oleh kebijakan ekonomi India yang mulai membuka diri pada struktur Internasional pasca adanya reformasi ekonomi.

Perekonomian India pada masa lalu memiliki fokus dalam perdagangan bebas dengan sisa-sisa perekonomian sosialis yang terinspirasi oleh Uni Soviet. Pasca kemerdekaan, India adalah negara yang banyak menanamkan elemen sosialis dalam sektor perekonomiannya walaupun pada akhirnya menimbulkan sejumlah inefisiensi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi India pernah mengalami Stagnasi pada kisaran 3,5%-4% per tahun sampai terjadinya reformasi ekonomi besar-besaran pada tahun

⁵⁶ Center for Strategic & International Studies. 2013. *The Emerging Indian Economy*. Washington: Center for Strategic & International Studies. Hal. VII

⁵⁷ Draga Claudia Marin. *Op. Cit.* Hal. 1

⁵⁸ Center for Strategic & International Studies. *Op. Cit.*

1991. Pasca reformasi ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi India mengalami peningkatan sebesar 7% hingga tahun 2000. Dibandingkan dengan negara lain, Total Produk Domestik Bruto (PDB) India hampir menyamai PDB dari Rusia. Jika Rusia pada tahun 2009 PDB Nasionalnya mencapai US\$ 1.232 Milyar maka India hanya terpaut US\$ 100 Milyar dari Total PDB Rusia atau meningkat sebesar 9%.⁵⁹ Pada tahun 2011 PDB India meningkat pesat dengan nilai total PDB sebesar US\$ 1.847 Milyar. Pada periode tersebut India menduduki peringkat kesepuluh sebagai Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar.⁶⁰ Berikut ini adalah Tabel Data Produk Domestik Bruto India dari Kementerian Statistik dan Implementasi Program, Organisasi Pusat Statistik India dalam kurun waktu antara tahun 2007 sampai 2009.

Tabel 2.1 Data Produk Domestik Bruto India

No.	Spesifikasi	Unit	2007-2008	2008-2009
1	Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional	Milyar Rupees	45.410	52.287
2	Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional	Milyar US\$	1.128	1.137
3	Index Volume PDB	%	109.2	106.7
4	PDB bidang pertanian, kehutanan, perikanan	%	16.5	15.7
5	PDB bidang Industri (termasuk energi)	%	28.8	28.0
6	PDB bidang pelayanan Jasa	%	54.8	56.4

Sumber: Instituto Brasileiro de Geografia. 2010. *Joint Statistical Publications by BRIC Countries*. Brazil, Russia, China, India. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia. Hal. 20-21

Dalam Tabel 2.1 telah disebutkan bahwa besarnya pertumbuhan ekonomi India sangat bergantung pada beberapa sektor. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri, serta sektor pelayanan jasa. Dalam

⁵⁹ Instituto Brasileiro de Geografia. 2010. *Joint Statistical Publications by BRIC Countries*. Brazil, Russia, China, India. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia. Hal. 20-21

⁶⁰ Sun-Joo Ahn & Dagmar Graczyk. 2012. *Understanding Energy Challenges*. France: International Energy Agency. Hal. 12

Tabel 2.1, PDB India dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 106,7% pada periode 2008-2009. Pencapaian tersebut sangat beralasan mengingat India merupakan produsen terbesar dari komoditas teh, kelapa, jahe, dan susu. India juga merupakan produsen terbesar gula, beras, dan tepung.⁶¹ Pada sektor industri menyumbang sekitar 28% dari total PDB.⁶² Persentase PDB dari sektor industri tidak dapat dilepaskan dari pendapatan di bidang gas, listrik, tambang, serta penggalian. Sektor pelayanan jasa menempatkan India pada urutan kelimabelas dunia dengan total tenaga kerja sebesar 23% yang sudah masuk dalam industri-industri jasa India.⁶³

Sebagai negara ekonomi peringkat ke-duabelas terbesar serta peringkat ketiga terbesar dalam *Purchasing Power Parity* (PPP)⁶⁴, India tidak dapat dilepaskan dari peranan negara-negara bagiannya yang memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan ekonomi. Ada beberapa negara bagian yang dilaporkan memiliki pertumbuhan buku tahunan lebih besar daripada negara-negara bagian yang lain. Negara-negara bagian tersebut adalah Gujarat (8,8%), Harvana (8,7%), Delhi (7,4%), Bihar (5,1%), Uttar Pradesh (4,4%), dan Madhya Pradesh (3,5%).⁶⁵

2.1.2 Kebijakan Melihat ke Timur India (*India Look East Policy*)

Berakhirnya perang dingin merupakan momentum yang menjadikan Asia Timur kembali menjadi harapan baru bagi politik luar negeri India. Fenomena disintegrasi Uni Soviet yang menjadi simbol dari berakhirnya perang dingin secara radikal telah merubah sistem internasional dan menciptakan tantangan serta peluang baru bagi negara-negara seperti India. Alasan inilah yang kemudian membuat

⁶¹ Maps of India. 2012. *Economic Developmet of India*. <http://business.mapsofindia.com/india-economy/ecodevelopment.html> [12 September 2014]

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Purchasing Power Parity adalah hubungan antara harga barang dan jasa dengan nilai tukar mata uang asing. Lihat Lindert., Peter H., Charles P., dan Kindleberger. 1993. *Ekonomi Internasional: Edisi Kedelapan*. Terjemahan Burhanuddin Abdullah. Erlangga: Jakarta. Hal. 356

⁶⁵ Maps of India. *Op. Cit*

Perdana Menteri India saat itu menginisiasi LEP. P. V. Narasimha Rao secara tegas menegaskan kembali hubungan dengan kawasan Asia Timur pada awal 1990-an.⁶⁶

Kebijakan Melihat Ke Timur India (LEP) dimulai pada tahun 1992 dan menjadi tanda dimulainya kebijakan liberalisasi untuk mengintegrasikan kembali India kepada Asia Tenggara secara ekonomi dan budaya. Kebijakan ini pada awal kemunculannya disebut sebagai LEP 2.0 yang mengacu pada pengaruh India di Asia Tenggara pada abad keenam sampai ke-limabelas sebelum masehi. Meningkatnya jalinan perdagangan antara India dengan Asia Tenggara memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan di kawasan ini.⁶⁷ Jika merujuk pada pernyataan Jawaharlal Nehru, LEP sangat merepresentasikan peran India dalam regional Asia.

“India akan memainkan bagian terpenting dalam permasalahan keamanan di Asia dan Samudra India. Khususnya dalam wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara, yang menjadikan India sebagai poros yang mana permasalahan ini harus dipertimbangkan.”⁶⁸

LEP merupakan kebijakan politik luar negeri India yang memiliki tiga tujuan mendasar. Pertama adalah untuk meyakinkan integrasi ekonomi India dengan negara-negara lain di Asia, kemudian yang kedua adalah dalam perspektif politik, India berkomitmen untuk menjadi negara terdepan yang menjadi bagian dari ASEAN seperti *East Asia Summit* (EAS) ataupun *ASEAN Defence Ministers Meeting* (ADMM), serta yang terakhir adalah meluasnya cakupan dari LEP India kepada negara-negara Asia yang lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.⁶⁹

⁶⁶ Harsh V. Pant. 2013. *China Rises, India Ponders: India ‘Look East’ Policy Gathers Momentum*. *Australia-India Institute*. Vol. 1 (Spring 2013). Hal. 6

⁶⁷ M. Mayilvaganan. 2013. *Examining India’s Look East Policy 3.0*. diakses dari <http://www.internationalpolicydigest.org/2013/11/21/examining-indias-look-east-policy-3-0/> [16 September 2014]

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Rahul Mishra. 2014. *India-Vietnam: New Waves of Strategic Engagement*. *Indian Council of World Affairs Issue Brief*. Hal. 2

LEP India mencakup hubungan dengan negara-negara timur India, termasuk sepuluh negara ASEAN serta negara-negara besar lain seperti Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru telah memberikan dampak besar bagi perekonomian India. Kawasan ini pada tahun 2009 merupakan mitra perdagangan terbesar India dengan transaksi sebesar 35 persen dari total perdagangan. Transaksi dengan kawasan ini merupakan transaksi perdagangan yang lebih menguntungkan daripada transaksi India dengan negara besar yang lain seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.⁷⁰

Hubungan dengan Asia pasca perang dingin merupakan salah satu prioritas utama bagi para elit-elit politik India dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Sejak tahun 1995 India adalah sepenuhnya mitra strategis ASEAN yang masuk dalam forum-forum penting ASEAN seperti *ASEAN Regional Forum*, *Regional Security Forum*, serta merupakan Pendiri dari Konferensi Asia Timur yang diselenggarakan pada Desember 2005. Dalam beberapa tahun belakangan, India berusaha untuk memperluas jaringan ekonomi dan perdagangannya serta memperkuat ikatan keamanan sedikit demi sedikit dalam regional Asia Timur. Perdana Menteri India Manmohan Singh dalam periode kepemimpinannya juga menjelaskan bahwa Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan prioritas utama India dalam kebijakan luar negerinya.⁷¹ India sendiri dengan ASEAN telah mengimplementasikan kesepakatan perdagangan bebas, beserta kesepakatan tentang investasi dan pelayanan jasa. *Standard Chartered* melaporkan bahwa improvisasi dalam bidang transportasi melewati jalur darat dan air telah memberikan kemudahan dalam transaksi perdagangan tersebut.⁷²

⁷⁰ Rajiv Sikri. 2009. *Challenge and Strategy (Rethinking India's Foreign Policy)*. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd. Hal. 110

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Luke Hunt. 2014. *Indian Trade seen Booming with ASEAN*. <http://thediplomat.com/2014/08/indian-trade-seen-booming-with-asean/> [15 September 2014]

Fokus utama dari LEP India merupakan negara-negara ASEAN yang masih terbagi-bagi secara administratif. Beberapa negara ASEAN yang memiliki posisi penting bagi kepentingan luar negeri India adalah Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV). Negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang telah menjadi prioritas bagi Kementerian Luar Negeri India.⁷³

Dalam konteks permasalahan Laut China Selatan, kehadiran India dalam kawasan tersebut dapat diinterpretasikan dengan berbagai alasan. Alasan yang relatif relevan untuk menungungkan kehadiran India dalam kawasan ini adalah terkait dengan kebijakan LEP. Selain untuk kepentingan komersial, India juga berkepentingan untuk menjaga hubungannya dengan negara-negara dalam regional ini, khususnya Vietnam.⁷⁴

2.1.3 Konsumsi dan Permasalahan Energi India

Kebutuhan energi India yang terus meningkat selaras dengan dinamika pertumbuhan ekonominya dan modernisasi dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi India tumbuh sekitar 7% sejak tahun 2000. Persentase tersebutlah yang kemudian terbukti menjadikan India tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi global 2008.⁷⁵

Pertumbuhan ekonomi India yang signifikan selaras dengan pertumbuhan kebutuhan energi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal inilah yang kemudian menempatkan India dalam jajaran teratas negara-negara dengan depondensi energi yang cukup besar. Dalam *World Energy Outlook* (WEO) tahun 2011 juga

⁷³ Rahul Mishra. *Op Cit.* Hal. 2

⁷⁴ Rup Narayan Das. 2013. *India in the South China Sea: Commercial Motives, Strategic Implications.* Diakses dari [http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews\[tt_news\]=41473&tx_ttnews\[backPid\]=688&no_cache=1#.VAv9DqPVtH0](http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews[tt_news]=41473&tx_ttnews[backPid]=688&no_cache=1#.VAv9DqPVtH0) [24 September 2014]

⁷⁵ Energy Information Administration. 2014. *Country Analysis Brief Overview.* diakses dari <http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=in> [16 September 2014]

menunjukkan bahwa kebutuhan energi India meningkat dua kali lipat dari 319 *million tones of equivalent* (mtoe) pada tahun 1991 menjadi 669 *mtoe* pada tahun 2009.⁷⁶ Beberapa tahun berikutnya, India masih menempati posisi keempat dunia dalam hal konsumsi minyak. British Petroleum Juga telah merilis informasi konsumsi minyak dunia kepada publik yang dimuat dalam *BP Statistical Review of World Energy June 2014*.⁷⁷ Dalam review tersebut konsumsi minyak per hari India masih menduduki peringkat keempat di bawah Amerika Serikat, China, serta Jepang. Berikut ini adalah Tabel data konsumsi minyak global Amerika Serikat, China, Jepang, dan India antara tahun 2010 sampai tahun 2013 yang didapatkan penulis dari *British Petroleum*.⁷⁸

Tabel 2.2 Data Konsumsi Minyak Global Per Hari

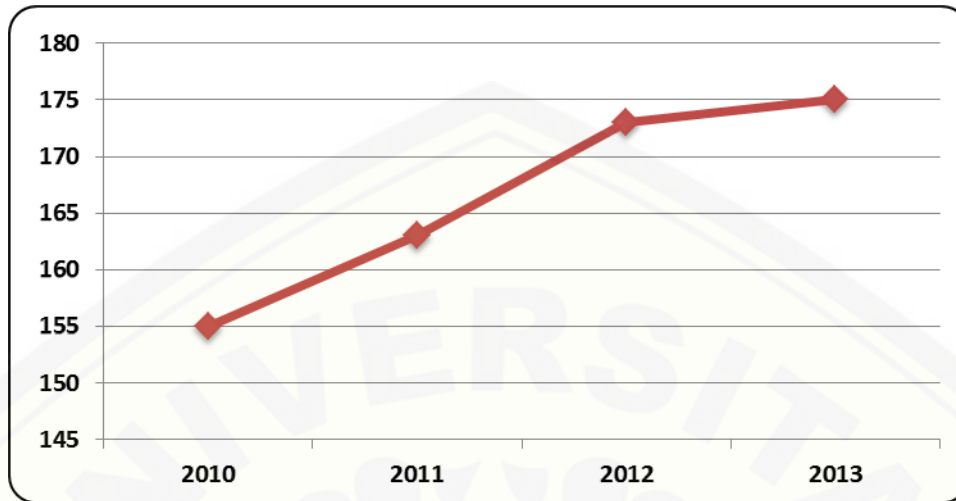
No.	Negara (Dalam Juta Ton Per Tahun)	2010	2011	2012	2013
1.	Amerika Serikat	850	834,9	817	831
2.	China	440	464	490	507,4
3.	Jepang	204,1	204,9	217,8	208,9
4.	India	155	163	173,6	175,2

Sumber: <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf>

⁷⁶ Sun-Joo Ahn & Dagmar Graczyk. *Op. Cit.* Hal. 24.

⁷⁷ British Petroleum. 2014. *BP Statistical Review of World Energy June 2014*. Diakses dari <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf> [23 September 2014]

⁷⁸ *Ibid.*



Grafik 2.1 Kenaikan Konsumsi Minyak Per Hari India tahun 2010-2013

Dalam Tabel 2.2 disebutkan bahwa India merupakan konsumen energi terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, China dan Jepang pada 2011. Pada Grafik 2.1 juga menegaskan bahwa Konsumsi minyak India terus menunjukkan peningkatan hanya dalam interval tiga tahun. Jika pada tahun 2010 India hanya menghasilkan konsumsi sebesar 155 juta ton minyak per tahun maka pada tahun 2013 konsumsi minyak India sudah mencapai angka 175,2 juta ton.

Walaupun mempunyai sumber daya fosil yang menonjol, India tetap memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap energi Impor dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, Mantan Menteri Minyak dan Gas India, Veerappa Moily, menjelaskan bahwa kementeriannya telah bekerja pada rencana kerja untuk membuat energi India independen dengan meningkatkan produksi bahan bakar fosil sampai 2030. Konsumsi energi India sendiri telah mencapai dua kali lipat pada tahun 1990 dan 2012. Pada tahun-tahun tersebut diestimasikan konsumsi energi India mencapai 32 kuadriliun *British Thermal Unit* (Btu)⁷⁹. Pada saat yang sama, konsumsi energi per kapita India adalah sepertiga dari konsumsi energi global. Dalam analisis

⁷⁹ British Thermal Unit adalah Satuan Energi yang digunakan di Amerika Serikat. Lihat dalam Riches, D. .2014. *BTU*. diakses dari <http://bbq.about.com/od/gasgrills/g/gbtu.htm> [16 September 2014]

International Energy Agency (IEA), India dan China diprediksi akan menghabiskan separuh dari kebutuhan energi global sampai dengan tahun 2040, dengan potensi kebutuhan energi India tumbuh 2,8% per tahun.⁸⁰

Potensi kebutuhan energi India yang tumbuh kemudian bermuara pada permintaan energy India yang terus meningkat. Jika tidak diperhatikan secara seksama maka dikhawatirkan potensi kebutuhan energi ini akan menimbulkan polemik yang mengganggu perekonomian domestik India. Kebijakan-kebijakan India yang lahir dalam bidang energi pada umumnya berawal dari kekhawatiran India tentang akses keamanan energi. Hal ini sangat berdasar jika melihat fakta-fakta yang dirilis oleh berbagai institusi energi internasional bahwa India saat ini merupakan salah satu konsumen energi terbesar di dunia.

India saat ini merupakan konsumen energi terbesar ketiga di dunia. Penggunaan energi dari negara yang mewakili 17 persen populasi dunia ini adalah sebesar 5 persen dari total konsumsi energi global.⁸¹ Menurut IEA, total permintaan energi utama India diperkirakan akan meningkat dari 669 *mtoe* pada 2009 menjadi 1464 *mtoe* pada 2035. Berikut adalah tabel urutan negara dengan persentase peningkatan kebutuhan energi paling besar.

⁸⁰ Energy Information Administrations. 2014. *Country Analysis Brief Overview*. diakses dari <http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=in> [16 September 2014]

⁸¹ Rekha Khrisnan. 2009. India's energy security: imperatives for change. *Energy Security Insights, The Energy and Resources Institute (TERI)*. Vol. 4, No. 4. (October-Desember). Hal. 2

Tabel 2.3 Permintaan Energi Utama Dunia

No.	Wilayah	2009	2015	2020	2030	2035	2009-2035
1	India	669	810	945	1.256	1.464	3,1%
2	Brazil	237	300	336	393	421	2,2%
3	China	2271	3002	3.345	3.687	3.835	2,0%
4	Russia	648	719	744	799	833	1,0%
5	Dunia	12.132	13.913	14.769	16.206	16.961	1,3%

Sumber: Ahn, S, J. & Graczyk, D. 2012. *Understanding Energy Challenges*. France: International Energy Agency.

India merupakan negara dengan persentase kenaikan kebutuhan energi paling besar di antara negara-negara lain di dunia seperti yang tercantum dalam Tabel 2.3. Pada urutan kedua ditempati oleh Brazil dengan persentase kenaikan energi 1 persen dibawah India. Kemudian China dan Rusia berturut-turut menempati urutan ketiga dan keempat dengan persentasi kenaikan masing-masing negara sebesar 2 persen untuk Brazil dan 1 persen untuk Rusia.

Sumber energi utama India adalah batubara, minyak, serta *traditional biomass*. India memproduksi 557 juta ton batubara pada 2012-2013, dan sebagian besar konsumsi bahan bakar industri India berasal dari komoditas ini. Produksi batubara terus meningkat dari tahun ke tahun dan masih akan terus berlanjut sampai tahun 2016-2017 dengan target produksi sebesar 795 juta ton.⁸²

Sejak dimulainya kebijakan ekonomi yang baru pada tahun 1991, Populasi India semakin banyak yang berpindah ke dalam perkotaan. Semakin banyaknya penduduk di perkotaan India membuat konsumsi energi masyarakat di kota-kota India bergeser dari biomassa tradisonal kepada energi hidrokarbon, nuklir, *biofuels*, dan

⁸² Sean Durns. 2014. *5 energy problems confronting India*. Diakses dari <http://globalriskinsights.com/2014/03/20/5-energy-problems-confronting-india/> [17 September 2014]

sumberdaya yang lain. Sektor *power* adalah sektor terbesar dan area yang paling cepat mengalami peningkatan kebutuhan energi. Sektor ini tumbuh sekitar 22% sampai 36% dari total konsumsi energi antara tahun 1990 dan 2011.

Pertumbuhan ekonomi India secara langsung terhubung dengan kapabilitasnya dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang besar telah menawarkan kesempatan bagi para pekerja untuk melakukan urbanisasi. Diperkirakan sekitar 590 juta penduduk India akan hidup di wilayah perkotaan pada 2030.⁸³ Jumlah populasi mobil per 1000 penduduk diperkirakan akan meningkat dari 10 pada 2009 menjadi lebih dari 100 pada 2035, yang menandakan bahwa permintaan bahan bakar akan meningkat di sektor transportasi.⁸⁴

Komposisi penduduk India hampir separuhnya didominasi oleh kelompok produktif. Kalangan menengah ke bawah merupakan kalangan yang hampir mendominasi pertumbuhan penduduk India yang separuh diantaranya berusia di bawah 25 tahun.⁸⁵ Fakta ini tentu saja menjelaskan bahwa sebagian penduduk India merupakan kelompok pekerja produktif yang membutuhkan suplai energi demi menunjang produktivitas mereka dalam bekerja. Organisasi Survei Nasional India memperkirakan bahwa 25% dari total populasi (lebih dari 300 juta penduduk) kekurangan akses kepada listrik, ketika area yang dialiri listrik juga menderita akibat pemadaman bergilir.⁸⁶ Pemerintah India berusaha untuk menyeimbangkan peningkatan kebutuhan listrik negara dengan tetap memperhatikan lingkungan dalam penggunaan batubara dan sumber energi lain untuk memproduksi listrik. Pemerintah berencana untuk menggunakan energi alternatif, khususnya dalam bahan bakar nabati (*biofuel*) campuran.⁸⁷

⁸³ Charles K. Ebinger. 2011. *Securing the Future*. Diakses dari <http://www.financialexpress.com/news/securing-the-future/854712/0> [18 November 2014]

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Durns, S. *Op. Cit*

⁸⁶ Energy Information Administrations. *Country Analysis Brief Overview*. *Op. Cit*

⁸⁷ Energy Information Administrations. *Country Analysis Brief Overview*. *Op. Cit*

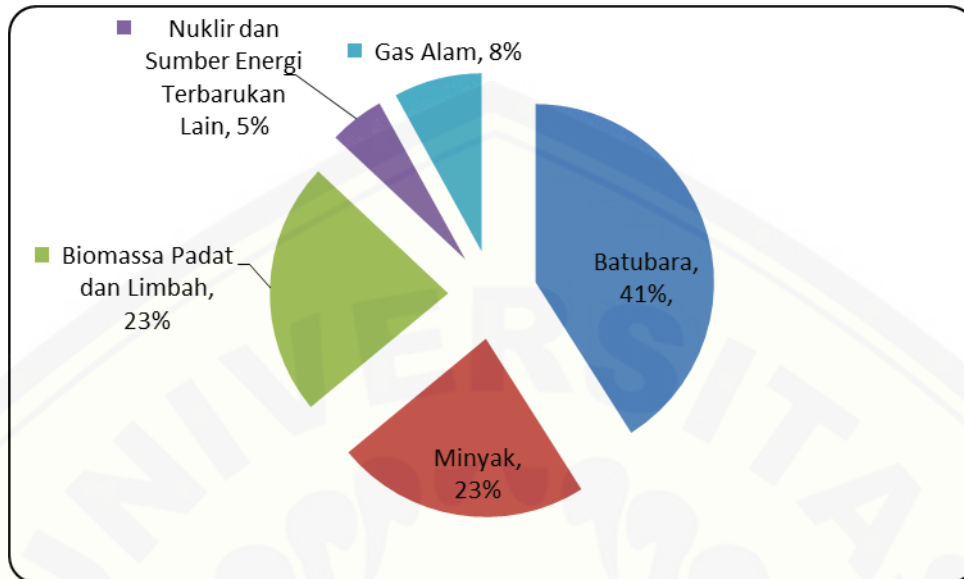


Diagram 2.1 Total Konsumsi Energi India Tahun 2011

Sumber: <http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=in>

Diagram 2.1 menjelaskan bahwa batubara masih menjadi sumber energi dengan konsumsi terbanyak di India dengan persentase konsumsi sebesar 41% dari total konsumsi energi nasional. Sumber energi dengan konsumsi terbanyak selanjutnya adalah minyak, dan biomassa padat⁸⁸, limbah dengan masing-masing persentase konsumsi sebesar 23% untuk minyak dan 23% untuk biomassa padat serta limbah. Konsumsi gas alam hanya mencapai 8%, kemudian diikuti konsumsi sumber daya nuklir dan sumber daya lain sebesar 5%.

Batubara menjadi salah satu komoditas dengan penggunaan terbanyak di India lantaran sektor Industri tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan akan penggunaan energi batubara. Batubara merupakan penyokong utama terciptanya akses kelistrikan

⁸⁸ Biomassa dapat didefinisikan sebagai materi tanaman yang digunakan secara langsung sebagai bahan bakar atau dikonversi menjadi bentuk lain sebelum pembakaran. Termasuk Kayu, limbah sayuran (termasuk limbah kayu dan tanaman yang digunakan untuk produksi energi), hewan/limbah, larutan alkali sulfit yang juga dikenal sebagai "black liquor" dan biomassa padat lainnya. Lihat dalam Glossary of Statistical Terms. 2002. *Solid Biomass*. <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4603> [29 September 2014]

yang baik bagi sektor industry India. Tingkat penggunaan batubara yang tinggi inilah yang kemudian turut mendorong India untuk mengadakan impor energi batubara dengan harapan dapat menjaga stabilitas produksi dari sektor industri.⁸⁹

2.1.4 Kebijakan Energi India

Kebutuhan energi merupakan tantangan terberat yang dihadapi oleh India. Perdana Menteri India, Manmohan Singh mengidentifikasi keamanan energi sebagai salah satu tantangan terbesar dalam keamanan nasional India.⁹⁰ Keamanan energi hanyalah salah satu faktor yang menentukan kesuksesan India dalam menjamin masa depannya, termasuk menjamin pertumbuhan nasionalnya, serta keamanan perekonomiannya secara global.⁹¹

Berdasarkan informasi dari komisi perencanaan, perekonomian harus tumbuh pada level 8-10% selama 20 tahun ke depan untuk dapat mereduksi kemiskinan.⁹² Target perekonomian tersebut juga merupakan target yang harus dicapai India untuk dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).⁹³ Pertumbuhan ekonomi India secara langsung terhubung pada kapabilitasnya dalam memenuhi kebutuhan energinya, sehingga kebutuhan energi menjadi sektor yang sangat fundamental dalam menjamin pertumbuhan ekonomi India.

Pemerintah India telah mengeluarkan strategi dalam kebijakan energinya melalui *Integrated Energy Policy* (IEP) yang diinisiasi oleh PM Manmohan Singh untuk mengawasi sektor energi. Komite IEP dibentuk pada 2004 atas perintah dari PM dengan menunjuk komisi perencanaan untuk menunjuk para ahli sebagai kabinet

⁸⁹ Sreeja, VN. 2013. *India Set To Surpass China As World's Largest Coal Importer For Use In Power Plants*. Diakses dari <http://www.ibtimes.com/india-set-surpass-china-worlds-largest-coal-importer-use-power-plants-1327117> [12 Desember 2014]

⁹⁰ Devinda Kumar. 2012. *Securing India's Energy Future*. Australia Defence College: Vice Chief of The Defence Force. Hal. 1

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Government of India, 2006. *Integrated Energy Policy: Report of the Expert Committee*. Diakses dari http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_intengy.pdf [25 November 2014]

⁹³ *Ibid.*

dalam komite IEP. Pembentukan Komite IEP ini adalah sebagai persiapan India dalam menerapkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah selanjutnya yang dihasilkan dari komite IEP adalah dikeluarkannya laporan dari komite ini pada 2006. Kabinet dari komite kebijakan ini akhirnya diterima pada Desember 2008.⁹⁴

Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya India dalam menanggulangi polemik energi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi India. Realitas yang dihadapi oleh India tidak sepenuhnya sesuai harapan dimunculkannya kebijakan IEP. India masih mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan energinya seperti ketergantungan yang sangat tinggi terhadap energi impor.⁹⁵

Konsep Keamanan Energi merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan visi jangka panjang India. Setidaknya, terdapat 3 dimensi yang meliputi kebijakan India dalam bidang energi. Dimensi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan energinya demi menjaga stabilitas perekonomiannya pada level 8-9% sampai tahun 2031. Dimensi selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan energi untuk seluruh warga negara India mendukung pembangunan sosial, kesehatan, dan keamanan dari kemiskinan energi. Dimensi yang terakhir adalah menjamin ketahanan dalam kebutuhan dan penggunaan energi.

Pemerintah India berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan energi dalam standar yang diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan ekonomi. Guna mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi pada level 8%-9% secara berkelanjutan sampai 2031-2032, India memerlukan peningkatan suplai energi utamanya 3 sampai 4 kali lipat. Sebagai hasilnya, tingkat pelayanan energi akan tetap tumbuh karena akselerasi industri, urbanisasi, serta munculnya lembaga-lembaga untuk konsumen.⁹⁶

⁹⁴ Sun-Joo Ahn & Dagmar Graczyk. *Op. Cit.* Hal. 22

⁹⁵ Devinda Kumar. *Op. Cit.* Hal. 2

⁹⁶ Ministry of Power. (Tanpa Tahun). *The Action Plan for energy Efficiency*. Bureau of Energy Efficiency: Ministry of Power, Government of India. Hal. 1

2.1.4 Tujuan Kebijakan

Memahami kerangka kebijakan energi India dapat dimulai dengan melihat konteks kebijakan di mana tujuan dan konsep kebijakan diletakkan. Setidaknya ada tiga kebijakan yang menjadi tujuan utama India, yaitu: akses energi, keamanan energi, serta mitigasi dari perubahan iklim. Tiga kebijakan utama India tersebut sangat berkaitan satu sama lain, walaupun masih terdapat beberapa benturan antar kebijakan utama tersebut yang berasal dari realita di India.⁹⁷ Kebijakan akses energi serta keamanan energi merupakan dua hal mendasar yang sangat mempengaruhi kebijakan India mengenai Energi. Tujuan kebijakan akses energi serta keamanan energi dari India dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Akses Energi

Hampir seperempat dari populasi India kekurangan akses terhadap sumber daya listrik. Keanihan inilah yang harus dipahami dari situasi energi di India dimana kebutuhan energi potensial India masih belum terpenuhi, tidak seperti negara berkembang pada umumnya dimana permintaan energi sudah mencapai pada fase kejenuhan. Pemerintahan India sendiri telah menyadari bahwa pembangunan ekonominya sedang terhalang oleh konsekuensi dari kurangnya stok energi. Kemudian, menyediakan akses energi untuk seluruh warga negara merupakan prioritas utama para pembuat kebijakan India dalam jangka panjang, membuatnya setara atau bahkan lebih penting daripada keamanan energi. Skema listrik di pedesaan utama India adalah contoh dari determinasi pemerintah untuk memperluas akses kelistrikan di wilayah pedesaan India.⁹⁸

b. Keamanan Energi

Keamanan energi merupakan faktor penting dalam pembuatan kebijakan India. Perhatian dari kebijakan energi India sampai tahun 1990-an terletak pada

⁹⁷ Sun-Joo Ahn & Dagmar Graczyk. *Op. Cit.* Hal. 16

⁹⁸ Sun-Joo Ahn & Dagmar Graczyk. *Op. Cit.*

defisit sumber daya listrik dan kebutuhan energi yang belum terpenuhi serta meningkatnya ketergantungan pada sumber energi impor, terutama minyak, gas alam, dan batubara.⁹⁹ Definisi keamanan energi bagi pemerintah India yaitu:

“Kita adalah energi yang aman ketika kita mampu untuk menyuplai energi untuk seluruh warga negara kita terlepas dari kemampuan mereka untuk membayarnya serta memenuhi permintaan yang efektif untuk membuat mereka aman dan kemudahan energi untuk memuaskan berbagai kebutuhan mereka pada harga yang kompetitif.....”¹⁰⁰

Dari definisi di atas, setidaknya fokus keamanan energi India terdiri dari tiga bagian: Pertama, India menegaskan bahwa energi adalah kebutuhan hidup yang sangat penting bagi penduduk, yang mana harus dimasukkan dalam strategi keamanan energi. Kedua, India khawatir dengan meningkatnya harga energi global yang dapat mengurangi ketersediaan energi kepada penduduknya dan dapat memperburuk beban fiskal nasional. Terakhir, terdapat kekhawatiran tentang gangguan pasokan energi secara tiba-tiba.¹⁰¹

Kebijakan India dalam permasalahan energi sangat jelas secara substantif bahwa energi sangat penting bagi kehidupan masyarakat India. Demi merealisasikan kebijakan tersebut dan mendukung terciptanya akses energi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat India maka upaya mengamankan akses energi sangat diperlukan oleh India. Upaya mengamankan akses energy tersebut dapat dengan memperluas produksi minyak India di berbagai wilayah, baik domestik maupun mancanegara. Terciptanya akses energi serta keamanan energy yang baik tentunya merupakan sebuah modal berharga bagi India untuk dapat terus memacu pertumbuhan perkonomiannya untuk tetap naik.

⁹⁹ Sun-Joo Ahn & Dagmar Graczyk. *Op. Cit.*

¹⁰⁰ Sun-Joo Ahn & Dagmar Graczyk. *Op. Cit.*

¹⁰¹ Sun-Joo Ahn & Dagmar Graczyk. *Op. Cit.* Hal. 17

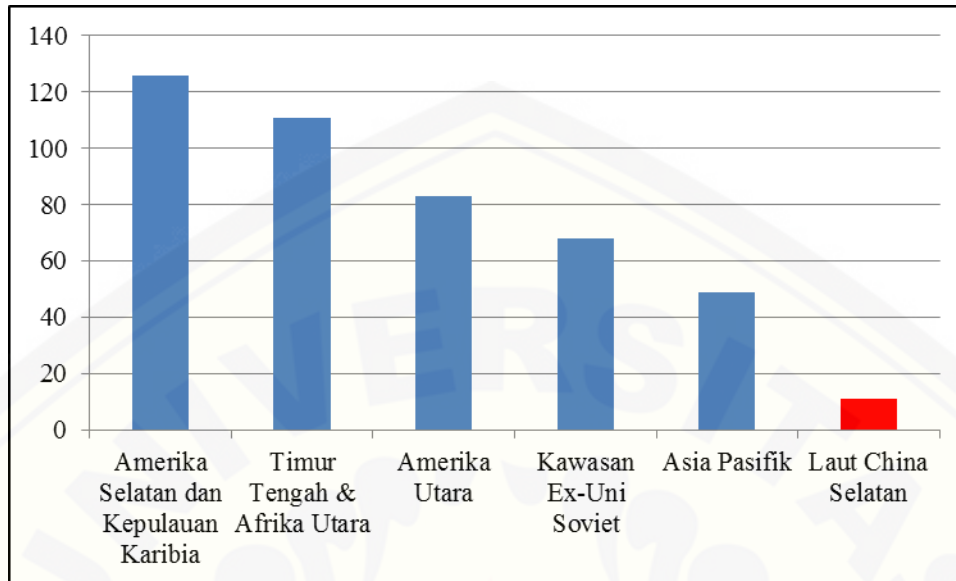
BAB III

KERJASAMA EKSPLORASI MINYAK ANTARA INDIA DAN VIETNAM

Bab ini akan menguraikan secara spesifik deskripsi dari kerjasama yang dijalin oleh India dengan Vietnam dalam bidang eksplorasi minyak. Untuk mengawali deskripsi tentang kerjasama eksplorasi minyak tersebut, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu relevansi dari Laut China Selatan sebagai kawasan yang strategis bagi India maupun Vietnam. Setelah penjelasan tentang Laut China Selatan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai posisi India dalam regional Asia Pasifik yang dapat mengantarkan pembaca kepada posisi tawar India dan Vietnam dalam kerjasama minyak sedang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Subbab selanjutnya dalam bab ini akan menjelaskan mengenai keseriusan India dalam upayanya mengamankan akses sumber daya energi di berbagai kawasan termasuk dalam kawasan Laut China Selatan yang berada dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam. Bab ini kemudian akan ditutup dengan penjelasan mengenai aspek legalitas kedua negara dalam menjalankan kerjasama eksplorasi minyak.

3.1 Laut China Selatan sebagai kawasan strategis bagi India dan Vietnam

Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan yang secara ekonomi dan politik memiliki potensi menjanjikan bagi negara-negara di sekitarnya, khususnya bagi negara-negara yang telah memiliki aset dalam wilayah tersebut. Lautan ini dipercaya memiliki kandungan minyak dan gas alam yang cukup besar dan belum dieksploitasi secara menyeluruh. Berikut ini adalah data yang penulis dapatkan dari *United States Geological Survey* (USGS) mengenai sumber minyak dunia yang belum ditemukan atau belum tereksplorasi.



Grafik 3.1 Sumber minyak dunia yang belum ditemukan tahun 2012

Sumber: United States Geological Survey. 2012. *An Estimate of Undiscovered Conventional Oil and Gas Resources of the World*. U.S Geological Survey. Hal. 3

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari USGS, setidaknya ada beberapa kawasan di dunia yang potensi minyaknya belum dieksploitasi. Kawasan-kawasan tersebut dalam Grafik 3.1 adalah Amerika Selatan dan Kepulauan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Amerika Utara, Kawasan Ex-Uni Soviet, Asia Pasifik, serta Laut China Selatan. Grafik 3.1 menjelaskan bahwa sumber minyak yang belum ditemukan di Amerika Selatan adalah yang tertinggi di antara kawasan lain dengan estimasi sebesar 125,900 milyar barrel minyak. Pada urutan kedua ditempati oleh kawasan Timur Tengah dan Afrika Tengah yang diperkirakan terdapat 111,201 milyar barrel minyak yang belum dieskplotasi. Kemudian urutan selanjutnya ditempati berturut turut oleh Amerika Utara (83,386 milyar barrel), Daerah Ex-Uni Soviet (66,211 milyar barrel), serta Asia Pasifik (47,544 milyar barrel).

Laut China Selatan seperti yang tercantum dalam Grafik 2.2, mempunyai kandungan minyak sebesar 11 milyar barrel. Laut China Selatan juga ditengarai

memiliki 190 triliun meter kubik cadangan gas alam. USGS memperkirakan bahwa antara 5 sampai 22 milyar barrel dari minyak dan antara 70 sampai 290 triliun kaki kubik dari gas yang belum sepenuhnya ditemukan dalam kawasan ini (tidak termasuk Teluk Thailand dan daerah lain yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan). Pada November 2012, CNOOC juga membuat laporan tentang sumber daya minyak yang belum ditemukan dalam kawasan ini. Dalam laporannya, CNOOC mengestimasi bahwa ada sekitar 125 milyar barrel dari minyak dan 500 triliun kaki kubik dari gas alam yang belum ditemukan. Walaupun CNOOC telah merilis laporannya mengenai potensi terpendam dari Laut China Selatan, namun kebenaran dari Informasi ini masih belum sepenuhnya dikonfirmasi kebenarannya oleh para peneliti.¹⁰²

Prospek Laut China Selatan tidak hanya menjanjikan kekayaan alam yang melimpah bagi tiap-tiap negara yang mengeksploitasinya. Dalam konteks perdagangan, Laut China Selatan mempunyai peran strategis dalam mendukung lancarnya transaksi ekonomi transnasional yang dilakukan berbagai negara. Tercatat bahwa Laut China Selatan merupakan jalur utama bagi perdagangan dan telekomunikasi dengan 33% dari perdagangan dunia serta 50% dari lalu lintas pengangkutan minyak dunia yang melewati Laut China Selatan.¹⁰³

Secara *de facto* India bukanlah negara yang terletak dalam pesisir Laut China Selatan. Namun, India secara luas diakui sebagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran penting dalam kawasan ini. *Joint Statements* dengan ASEAN belakangan ini secara jelas mengekspresikan peran India dalam menjamin perdamaian dan stabilitas regional, menangani tantangan umum dalam isu-isu maritim, menjamin keamanan maritim, serta kebebasan navigasi. Masuknya India

¹⁰² Energy Information Administrations. 2013. *The South China Sea is a critical world trade route and a potential source of hydrocarbons, particularly natural gas, with competing claims of ownership over the sea and its resources* diakses dari <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS> [29 September 2014]

¹⁰³ Maj Gen PK. Chakravorty. 2012. *Dispute in South China Sea*. Diakses dari <http://www.indiandefencereview.com/news/disputes-in-the-south-china-sea/> [30 September 2014]

dalam geopolitik dari kawasan ini kemudian juga disambut oleh hampir semua negara kecuali China.¹⁰⁴

Setidaknya terdapat lima alasan utama India memperbarui kepentingannya di Laut China Selatan. Pertama adalah adanya intensitas perdagangan India yang cenderung meningkat dengan negara-negara Asia Timur sehingga India memerlukan akses perdagangan yang lebih luas terutama di negara-negara pasifik barat. Kedua, India berkeinginan untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara besar untuk keperluan maritimnya di kawasan pasifik barat. Ketiga, India khawatir dengan “arogansi baru” Beijing yang bisa saja menjadikan Laut China Selatan sebagai “Telaga China” dengan kuatnya pengakuan China atas klaim wilayah yang mereka lakukan. Keempat, India ingin mempertahankan kehadirannya untuk melacak potensi pembangunan yang dapat memberikan dampak bagi kepentingan nasionalnya. Alasan terakhir adalah menghadirkan Angkatan Laut untuk mencegah munculnya musuh potensial.¹⁰⁵ Jika memperhatikan beberapa kepentingan India di Laut China berdasar pada deskripsi di atas, maka sangat jelas bahwa kehadiran India dalam wilayah Laut China Selatan memiliki esensi dalam mempertahankan konektivitas perekonomian maupun politik di regional ini.

Terlepas dari poin terakhir dalam alasan utama India memperbarui kepentingannya di Laut China Selatan, India selalu menempatkan Asia sebagai prioritas dalam politik luar negerinya yang selaras dengan LEP India.¹⁰⁶ Negara Asia yang kemudian menjadi prioritas terbaik bagi India dalam posisinya sebagai pemangku kepentingan di Laut China Selatan adalah Vietnam. Vietnam menjadi prioritas terbaik karena di antara negara ASEAN yang lain, Vietnam merupakan kawan lama dari India dan para pemimpin India memiliki pandangan yang positif

¹⁰⁴ Shoikat Roy. 2013. *Understanding India's Role in South China Sea*.
<http://broadmind.nationalinterest.in/2013/11/05/understanding-indias-role-in-the-south-china-sea/>
[30 September 2014]

¹⁰⁵ Rajeev Ranjan Chaturvedy. 2014. Is India Making Waves in South China Sea. *ISAS Working Paper* No. 185-26. Hal. 7

¹⁰⁶ Gauri Khandekar. *Op. Cit.* Hal. 1

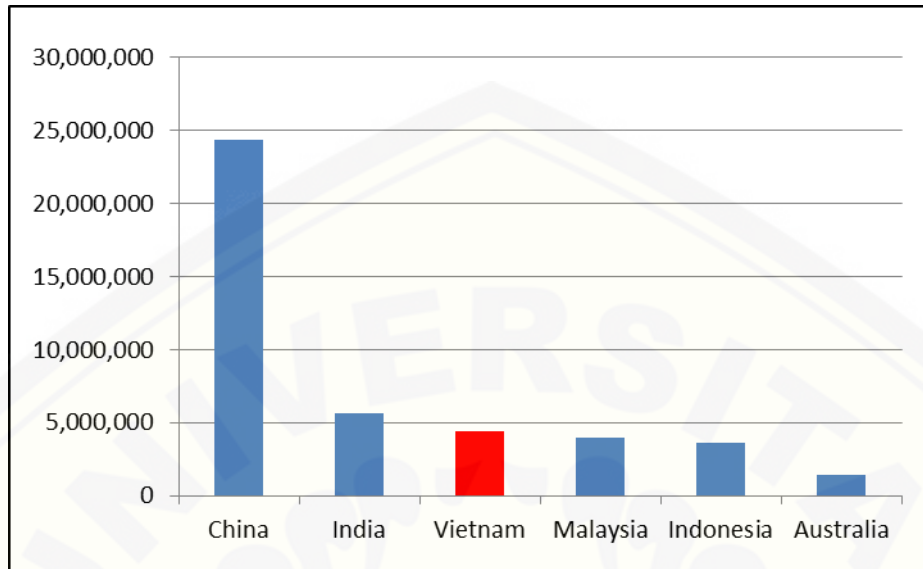
terhadap Vietnam. Vietnam sendiri memiliki jejak rekam yang baik dengan pemerintahan India seperti keterlibatan Vietnam yang mendorong India dalam pengajuan anggota Dewan Keamanan PBB, dan juga mendukung sepenuhnya keanggotaan India dalam *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC). Dalam sejarah perjuangan Vietnam membebaskan diri dari cengkeraman kolonialisme bangsa barat, India juga pernah memberikan dukungannya terhadap Vietnam untuk membebaskan diri dari penjajahan Prancis. India kemudian memberikan timbal balik yang sepadan terhadap upaya yang dilakukan Vietnam dalam mendukung India pada level internasional. India sampai saat ini terus konsisten dalam mendukung upaya damai pada resolusi permasalahan klaim Laut China Selatan dan India memainkan peran yang cukup vital dalam permasalahan tersebut. Peran yang dijalankan oleh India sangat terlihat dalam aktivitas India menjalin kerjasama dengan Vietnam dalam berbagai sector dan minyak adalah satu sektor yang menjadi objek kesepakatan dalam kerjasama yang dijalin oleh kedua Negara.¹⁰⁷

Berdasarkan perjalanan sejarah yang cukup baik, India dan Vietnam kemudian menginisiasi sebuah apresiasi bagi hubungan baik kedua negara. Apresiasi ini diciptakan kedua negara dengan memberikan peringatan atas hubungan baik kedua negara dengan nama “tahun persahabatan India-Vietnam”. Hal ini dilakukan kedua negara untuk memberikan refleksi kepada masyarakat atas hubungan baik yang telah dijalin oleh kedua negara.¹⁰⁸

Tidak salah apabila mengamati upaya India menjalin kerjasama minyak dengan Vietnam. Upaya India cukup beralasan mengingat Vietnam merupakan salah satu Negara yang menduduki peringkat ketiga dalam permasalahan kandungan minyak. Berikut adalah Grafik 3.2 yang menggambarkan Negara-negara dengan kandungan minyak terbanyak di Asia-Pasifik.

¹⁰⁷ Rahul Mishra. *Op. Cit.* Hal. 2.

¹⁰⁸ Rahul Mishra. *Op. Cit.* Hal. 3



Grafik 3.2 Kandungan Minyak negara-negara Asia-Pasifik (Milyar Barrel)

Sumber: <http://www.ogj.com/articles/print/volume-111/issue-12/special-report-worldwide-report/worldwide-reserves-oil-production-post-modest-rise.html>

Grafik 3.2 menyebutkan bahwa China menduduki peringkat pertama dalam hal kandungan minyak di Asia Pasifik dengan total kandungan minyak sebesar 24,3 milyar barrel. Peringkat kedua diduduki oleh India dengan total kandungan minyak sebesar 5,6 milyar barrel sementara Vietnam menduduki peringkat ketiga dengan 4,4 milyar barrel. Peringkat selanjutnya diduduki oleh Malaysia dengan 4 milyar barrel kandungan minyak.¹⁰⁹

Kepentingan strategis India yang sepenuhnya terletak dalam keamanan sumber energi mereka tentunya membuat regional Asia Pasifik menjadi salah satu kawasan yang tidak dapat diabaikan. Laut China Selatan yang belum sepenuhnya tereksplorasi adalah salah satu alasan India masih memandang negara-negara di seputar kawasan ini begitu penting. Pentingnya negara-negara di seputar kawasan-

¹⁰⁹ Conglin Xu. & Laura Bell. 2013. *Worldwide reserves, oil production, post modest rise*. Diakses dari <http://www.ogj.com/articles/print/volume-111/issue-12/special-report-worldwide-report/worldwide-reserves-oil-production-post-modest-rise.html> [25 Oktober 2014]

kawasan ini kemudian India wujudkan dalam kerjasama dengan tujuan untuk menghindari konsentrasi kekuatan yang terlalu besar, terlebih dalam menyikapi konsentrasi kekuatan yang dilakukan oleh China di kawasan ini.

Kerjasama minyak antara India dengan Vietnam adalah kalkulasi efektif dari India dalam skenarionya menyeimbangkan kekuatan minyak China di regional Asia Pasifik. Kerjasama yang dilakukan India dapat dikatakan efektif mengingat Vietnam merupakan negara dengan kandungan minyak cukup besar di Asia Pasifik. Implikasi dari kerjasama ini kemudian memberikan dampak signifikan bagi terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri India.

3.2 Pengaruh India dalam Regional Asia Pasifik.

Abad ke-21 merupakan abad yang disebut-sebut sebagai abad dari Asia yang menjadi milik India dan China. Dua negara yang disebut-sebut akan menjadi kekuatan baru dunia menggantikan kekuatan Amerika Serikat. Berakhirnya perang dingin serta dampak dari adanya globalisasi mendefinisikan kembali posisi China-India dan perannya secara regional maupun secara global. India yang diakui sebagai pemimpin dari Selatan, berusaha untuk memainkan peran yang lebih besar secara global, serta dalam upayanya membangun perekonomian dalam kemitraan Strategisnya.¹¹⁰

Untuk menata ulang posisi India dalam dunia Internasional maka India harus berdaptasi dengan sistem internasional. Hal tersebut tentunya memerlukan restrukturisasi yang mendasar dalam sistem politik maupun perekonomian India. Jika India tetap bersikukuh dengan pola perpolitikan yang sama di masa lalu, maka rakyat India akan khawatir dengan kegagalan secara ekonomi dan politik yang pernah terjadi.

¹¹⁰ Ummu Salva Bava. 2007. *New Powers for Global Change? India's Role in the Emerging World Order*. New Delhi: Friedrich Ebert Stiftung. Hal 1

Dalam konteks perubahan kebijakan ekonomi dan politik, India memang memerlukan perubahan, dari yang awalnya tertutup dalam perekonomian menjadi negara dengan perekonomian terbuka untuk menyesuaikan diri dengan situasi internasional. Tujuan penyesuaian kebijakan dalam politik luar negeri tentunya adalah untuk memperoleh keuntungan tersendiri bagi India baik secara ekonomi maupun politik.¹¹¹ Pada level yang lebih spesifik, tujuan politik luar negeri India adalah untuk mencapai tiga sasaran utama yaitu; mempertahankan integritas wilayahnya, meyakinkan keamanan geopolitiknya dengan menciptakan stabilitas dan perdamaian serta membangun kesejahteraan masyarakat dengan menjamin adanya lingkungan perekonomian yang sehat.¹¹²

Indikator termudah untuk mengidentifikasi pengaruh India dalam lingkup internasional adalah kekuatan India secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sangat signifikan kemudian membuat Negara-negara lain berusaha membuka diri kepada India. Terbukanya jalinan kerjasama dengan India tentunya diharapkan oleh Negara lain dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya.

Kerjasama ekonomi dengan negara-negara Asia adalah salah satu kunci keberhasilan India dalam melambungkan namanya di dunia internasional. India berhasil menjalin komunikasi antar pemerintah dengan baik yang kemudian menghasilkan banyak kesepakatan kerjasama dengan negara Asia yang lain. Salah satu contoh adalah kerjasama India dengan Jepang di bidang ekonomi maupun energi. India dengan Jepang berhasil mencapai kesepakatan dalam mengamankan jalur suplai energi dan pertumbuhan ekonomi antar kedua negara. Kedua negara ini telah bersedia

¹¹¹ Thongkolal Haokip. 2011. India's Look East Policy: It's Evolution and Approach. *South Asian Survey*. 18 (2) 239-257. Hal. 245

¹¹² Ministry of External Affairs Government of India. 1992. *Annual Report 1991-92*. New Delhi: Ministry of External Affairs. Hal. ii

untuk berbagi dan menjamin bebas biaya transit energi maupun perdagangan di kawasan pasifik barat.¹¹³

Keberhasilan India menjalin kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan adalah contoh lain dari keberhasilan India dalam memanfaatkan posisi tawarnya yang sedang naik di bidang ekonomi. Kunjungan mantan Presiden India A.P.J Abdul Kalam di Korea Selatan pada tahun 2006 telah menuntun kedua negara dalam kemitraan ekonomi yang lebih komprehensif. Berlakunya kemitraan ini pada Januari 2010 telah menghasilkan pertumbuhan perdagangan lebih dari US\$ 15 Milyar pada tahun 2012. Korea Selatan menyambut baik adanya kerjasama dengan India karena dengan adanya kerjasama tersebut dapat menolong perekonomian Korea Selatan untuk tetap tumbuh pada level yang lebih tinggi.¹¹⁴

Negara besar berikutnya dalam regional Asia Pasifik yang memandang India sebagai mitra strategis adalah Australia. Mantan Perdana Menteri Australia Julia Gillard pernah menegaskan hal ini dalam kunjungannya ke India pada Oktober 2012:

*“Masa depan Australia akhirnya terletak pada hubungan dengan Washington, Tokyo, Beijing, Jakarta, Seoul, dan Delhi. Hubungan yang kuat antara masyarakat kita tersebut belum diimbangi oleh kekuatan hubungan antara pemerintah kita”.*¹¹⁵

Pernyataan Perdana Menteri Australia saat itu tentu mengejutkan bahwa India bukanlah negara yang dapat diabaikan dalam konstelasi politik maupun ekonomi secara global. Hubungan yang kuat antar sesama negara yang mempunyai kapabilitas yang baik seperti India, secara ekonomi dapat menjadi modal berharga bagi Australia untuk dapat merengkuh supremasi ekonominya secara internasional. Inilah yang kemudian menjadi bukti konkrit betapa posisi tawar India begitu diperhitungkan oleh dunia Internasional.

¹¹³ Harsh V. Pant. *Op. Cit.*

¹¹⁴ Harsh V. Pant. *Op. Cit.*

¹¹⁵ Harsh. V Pant. *Op. Cit*

3.3 Posisi Tawar antara India dalam Kerjasama Eksplorasi Minyak.

Salah satu aspek yang juga memberikan dampak bagi posisi tawar India dalam sebuah kerjasama minyak adalah teknologi dalam eksplorasi serta pengolahan minyak. Aspek ini menjadi salah satu aspek penting mengingat keberadaan teknologi dalam eksplorasi minyak sangat diperlukan. Diperlukannya aspek teknologi yang mutakhir dalam eksplorasi akan turut membantu dalam menciptakan efisiensi dalam mengelola blok minyak.

Perusahaan minyak nasional India yaitu OVL yang memiliki teknologi pengolahan eksplorasi sumber minyak, telah mengantongi ijin dari pemerintah untuk dapat segera mengaplikasikan teknologi terbaru yang inovatif. Hal itu seiring dengan munculnya kebijakan eksplorasi serpih minyak dan gas (*shale oil and gas*) yang telah disetujui oleh pemerintah India.¹¹⁶ Teknologi dalam eksplorasi serpih minyak dan gas ini merupakan inovasi dalam pencarian sumber minyak yang berasal dari bebatuan sedimen dalam bumi.¹¹⁷

Serpih minyak merupakan kelompok batuan sedimen klastik halus yang dapat menghasilkan sejumlah cairan seperti minyak ketika diekstraksi. Serpih minyak dapat terdiri dari beragam kelompok batuan seperti serpih kaya organik, napal, dolomit, batulempung karbonan, dan batubara sapropelik (*cannel coal*). Setiap bebatuan yang menghasilkan minyak (*shale oil*) dalam jumlah komersial melalui pirolisis¹¹⁸ dapat dianggap sebagai serpih minyak, yaitu berkisar antara 4-50% berat batuan atau sekitar 100-200 l/ton batuan.¹¹⁹

¹¹⁶ Hindustan Times. 2013. *India Approves policy for oil shale gas and oil exploration*. Diakses dari <http://www.hindustantimes.com/india-news/newdelhi/india-approves-policy-for-shale-gas-and-oil-exploration/article1-1126658.aspx> [15 Desember 2014]

¹¹⁷ Geomagz. (Tanpa Tahun). *Serpih Minyak Menuju Sumber Energi Global*. Diakses dari http://geomagz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=379:serpih-minyak-menuju-sumber-energi-global&catid=81:artikel-geologi-populer&Itemid=457 [15 Desember 2014]

¹¹⁸ Pirolisis adalah bentuk pemanasan tanpa menggunakan Oksigen.

¹¹⁹ *Ibid.*

Proses pengolahan serpih minyak bukanlah pengolahan yang dapat dikatakan mudah. Ekstraksi minyak dari serpih minyak membutuhkan konversi hidrokarbon padat di dalam batu ke bentuk cair, sehingga dapat dipompa dan diproses. Hal ini dilakukan dengan memanaskan batu sampai suhu tinggi, dan memisahkan dan mengumpulkan cairan yang dihasilkan.¹²⁰ Inilah yang kemudian menguatkan asumsi bahwa pengolahan sumber daya serpih minyak bukanlah sebuah proses yang membutuhkan biaya murah. Biaya yang dikeluarkan untuk mengolah serpih minyak bahkan lebih mahal daripada biaya untuk mengelola minyak mentah.¹²¹

Kebijakan India dalam eksplorasi minyak serpih merupakan kebijakan yang masih berada dalam bingkai *New Exploration Licensing Policy* (NELP) India.¹²² Kebijakan ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah India untuk mempercepat eksplorasi hidrokarbon sejak Februari 1999. Setidaknya Terdapat 254 blok yang terangkum dalam kebijakan NELP yang telah mendapat persetujuan *production share contract* (PSC) dari berbagai perusahaan dalam maupun luar negeri.¹²³ Adanya kebijakan ini membuat eksplorasi hidrokarbon di luar India menjadi lebih efektif dan efisien, khususnya dalam eksplorasi hidrokarbon yang berada di wilayah Vietnam. NELP sebagai landasan hukum yang mewadahi eksplorasi hidrokarbon di luar wilayah India tentunya merupakan tuntunan India dalam memaksimalkan eksplorasi serta pengolahan minyak dalam wilayah Vietnam.

¹²⁰ American Shale Oil Corp. (tanpa tahun). *Oil Shale Extraction Methods*. Diakses dari <http://amso.net/about-oil-shale/oil-shale-extraction-methods/> [17 Desember 2014]

¹²¹ National Geographic. 2014. *Oil Shale*. Diakses dari http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/oil-shale/?ar_a=1 [17 Desember 2014]

¹²² Economic Times. 2013. *Cabinet's new policy: Only ONGC and OIL are eligible for shale oil and gas exploration*. Diakses dari http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-09-25/news/42362315_1_shale-recourses-conventional-oil-and-gas-gas-exploration [16 Desember 2014]

¹²³ India Energy Sector. (Tanpa Tahun). *NELP-New Exploration Licensing Policy*. Diakses dari <http://www.indianenergysector.com/oil-gas/nelp-new-exploration-licensing-policy> [16 Desember 2015]

Munculnya kebijakan eskplorasi serpih minyak dan gas seiring dengan munculnya trend baru dalam dunia ekplorasi minyak internasional terkait dengan eksplorasi serpih minyak dan gas. Amerika Serikat, Kanada, serta China merupakan negara-negara garda terdepan dalam memaksimalkan potensi energi alternatif ini. Teknologi eksplorasi dalam serpih minyak bukanlah teknologi murah dan relatif tidak mudah dalam pengaplikasiannya.¹²⁴ India memberikan ijin untuk eksplorasi serpih minyak tersebut adalah untuk mendukung ekplorasi sumber daya hidrokarbon non-konvensional yang lain.¹²⁵

Kebijakan eksplorasi serpih minyak dan gas merupakan langkah India dalam memposisikan dirinya untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam hal eksplorasi minyak. Meskipun kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang murah dan mudah untuk diterapkan, namun India tetap berani untuk meratifikasi kebijakan ini sebagai respon atas kontestasi eksplorasi minyak internasional. Hal ini tentunya juga sebagai perwujudan India dalam menanggulangi defisit energinya dengan memaksimalkan segala potensi yang ada demi terjaminnya ketersediaan energi domestik.

Keunggulan teknologi India dapat menjadi modal berharga untuk menarik negara lain dalam bekerjasama. Vietnam yang dalam hal ini telah menjalin kerjasama dengan India, memiliki ketertarikan tersendiri dalam menjalin kerjasama minyak dengan India. Transfer teknologi serta pengetahuan yang terjadi dalam kerjasama eksplorasi minyak dengan India dapat menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi Vietnam. Jika merujuk pada enam mitos investasi asing dari James Petras, maka investasi asing yang dilakukan oleh OVL dapat merangsang pengembangan teknologi lokal yang baru.¹²⁶ Eksplorasi dalam serpih minyak tentunya diharapkan oleh

¹²⁴ Hindustan Times. *Op. Cit.*

¹²⁵ Hindustan Times. *Op. Cit.*

¹²⁶ James Petras menyimpulkan ada enam mitos dari investasi asing yang dipercaya oleh para intelektual dan pengambil kebijakan di negara-negara berkembang: *Pertama*, mitos bahwa investasi

Vietnam dapat menjadi pembelajaran berharga dalam memaksimalkan potensi sumber daya serpih minyak yang saat ini mulai diminati oleh dunia internasional. Turunnya harga minyak dunia yang saat ini terjadi juga merupakan imbas dari sumber daya serpih minyak dan gas yang kemudian menghasilkan persediaan minyak dan gas berlimpah di dunia internasional.

Posisi India dalam menarik minat Vietnam dalam prospek kerjasama dengan India adalah dari adanya Perusahaan minyak nasional India, OVL. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan minyak terpendang di dunia dengan beberapa reputasi. Majalah Fortunes bahkan merilis OVL sebagai salah satu perusahaan paling dikagumi di dunia. Penilaian tersebut berdasarkan dari kemampuan untuk menarik dan mempertahankan kualitas manajemen, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, inovasi, kualitas produk dan layanan, kesehatan keuangan dan efektivitas dalam melakukan bisnis secara global.¹²⁷ OVL Sendiri merupakan perusahaan minyak nasional India yang telah mengakuisisi beberapa blok minyak di Vietnam yang diharapkan dapat berperan banyak dalam pengembangan eksplorasi minyak di Vietnam.

Reputasi serta kapabilitas teknologi India dalam eksplorasi minyak dan gas menjadi modal berharga bagi India dalam menjalin kerjasama dengan negara lain. Lahirnya kebijakan serpih minyak dan gas adalah salah satu bukti bahwa India tetap berusaha menempatkan posisinya untuk sejajar dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, China, dan Kanada dalam permasalahan eksplorasi minyak.

asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi “*know-how*” lokal yang baru. Selengkapnya lihat dalam Coen Husain Pontoh. 2014. “Tantangan Jokowi dalam Realisasi Kebijakan Ekonominya”. Dalam Coen Husain Pontoh. *Membedah Tantangan Jokowi-JK*. Tangerang Selatan: Matjin Kiri. Hal. 21

¹²⁷ ONGC. 2014. *ONGC is FORTUNE World's Most Admires Company, again*. Diakses dari http://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/ongcindia/home/media/press_release/ongc-is-fortune-world [15 Desember 2014]

Kapabilitasnya dalam teknologi eksplorasi minyak tersebutlah yang kemudian menjadikan posisi tawar India meningkat bagi Vietnam.

Posisi tawar Vietnam sendiri berada pada level yang lebih rendah daripada India dalam konteks kapabilitas eksplorasi minyak. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan energi Vietnam yang mengalami penurunan produktivitas sebagai akibat dari infrastruktur yang sudah termakan usia pemakaian.¹²⁸ Oleh karena itu, adanya India sebagai mitra dalam kerjasama eksplorasi minyak dapat menjadi media bagi Vietnam dalam memperbaharui infrastruktur eksplorasi minyaknya.

3.4 Upaya India dalam mencapai akses keamanan energi

India merupakan negara dengan pertumbuhan industri yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Demikian juga dengan konsumsi energi komersilnya yang terus tumbuh mengikuti pertumbuhan perekonomian dan pembangunan industrinya.¹²⁹ Energi adalah salah satu elemen yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di India. pertumbuhan ekonomi di masa depan secara krusial akan sangat bergantung pada ketersediaan energi dalam jangka panjang. Parahnya defisit energi yang sedang dialami oleh India dalam beberapa tahun belakangan telah berdampak pada pertumbuhan industri dan progresivitas ekonominya.¹³⁰

Kekurangan energi tentunya merupakan salah satu ancaman yang berusaha untuk diatasi oleh India. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak signifikan dari kurangnya ketersediaan energi, India berusaha menyiasati dengan meningkatkan investasi ke luar negeri dengan tujuan untuk mengamankan suplai minyak dari luar

¹²⁸ Tienh Minh Do & Deepak Sharma. *Op. Cit.* Hal. 5772

¹²⁹ Jasvinder Singh & Sai Gu. 2010. Biomass Conversion in India-A Critique. *Renewable and Sustainable Energy Reviews.* (14) 1367-1378. Hal. 1

¹³⁰ Ramchandra Pode. 2010. Addressing India's Energy Security and Options for Decreasing Energy Dependency. *Renewable and Sustainable Energy Reviews.* Volume 14 Issue 9. Hal. 1

negeri dalam jangka panjang. Hal ini sangat terlihat dalam kebijakan *New Exploration dan Licensing Policy* (NELP) India yang sudah ada sejak tahun 1999.¹³¹

Tanda-tanda peningkatan kepentingan luar negeri India setidaknya sudah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Kepentingan luar negeri India tersebut sangat terfokus dalam sektor-sektor lepas pantai khususnya di Samudra Hindia. Lepas pantai lain yang telah menarik kepentingan domestik dan kepentingan luar negeri adalah Pantai Bombay di Lautan Arab yang meliputi ladang minyak terbesar India yaitu Puncak Bombay dan Sungai Konkan-Kerala. Puncak Bombay dan Sungai Konkan-Kerala sendiri adalah dua tempat yang terletak di Selatan dari Sungai Bombay.¹³²

Stagnasi produksi minyak serta konsumsi domestik yang masih terus tumbuh membuat Impor minyak India juga terus meningkat. Namun, India telah berusaha untuk mengantisipasi permasalahan ini dengan pembukaan kilang minyak baru dalam kurun waktu 1-2 tahun. Kementerian Minyak India bahkan telah meminta Arab Saudi untuk meningkatkan ekspor minyaknya sekitar 60% (80.000 bpd) pada 2010. Pendekatan terhadap Nigeria juga dilakukan oleh Kementerian Minyak India untuk dapat memperoleh minyak mentah dan pendekatan yang sama juga dilakukan terhadap Rusia untuk memperoleh Impor minyak dari negara tersebut.¹³³

Untuk meningkatkan produksi minyaknya, India kemudian menganjurkan perusahaan-perusahaan India untuk memperluas pencarian mereka terhadap sumber daya hidrokarbon di negara-negara lain. Ide ini mengikuti contoh dari China untuk meningkatkan akses terhadap peningkatan volume dalam produksi minyak luar negeri yang mana bisa memberikan karakter khusus bagi pasar India. Langkah-langkah kongkrit yang kemudian ditempuh India melalui perusahaan-perusahaannya adalah bergabungnya ONGC dengan konsorsium Repsol YPF Spanyol dan Petronas

¹³¹ James Wiley. 2010. India steps up search for energy Security. *Oil and Energy Trends*. Volume 35 issue 12. Blackwell Publishing. Hal. 3

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.* Hal. 4

Malaysia. Pola kerjasama ini kemudian sukses menawar proyek *Carabobo-1* di Venezuela, yang mana dijadwalkan untuk menyediakan ONGC 220.000 bpd minyak dari total produksi *Carabobo-1* sebesar 485.000 pada 2016.¹³⁴

Area terakhir yang menarik minat ONGC Adalah Angola. Kilang minyak India telah mengimpor 180.000 bpd minyak mentah dari Angola dan terindikasi bahwa ONGC akan meningkatkan volume yang mereka ambil dalam area ini. Pada tahun 2009, ONGC dilaporkan tertarik untuk membeli 20% bagian dari blok 32 yang sudah dilepaskan oleh *Marathon*¹³⁵, tetapi Perusahaan Amerika Serikat ini lebih memilih untuk menjualnya kepada CNOOC.¹³⁶

Sebagai negara yang mempunyai kepentingan dalam *energy security* untuk kebutuhan domestik tentunya India juga memiliki strategi dalam mencapai kepentingannya. Adanya strategi tersebut cukup beralasan mengingat pentingnya sumber daya energi seperti hidrokarbon, minyak, nuklir, gas, dan uranium untuk dapat terus memacu pertumbuhan ekonomi India. Untuk menjalankan strategi tersebut India berusaha untuk terus memperluas ladang minyaknya di luar wilayahnya. ONGC Sebagai perusahaan minyak nasional India telah mengakuisisi ladang minyak Alibekmola di Kazakhstan dengan persentase kepemilikan sebesar 15%, kemudian 25% pada blok minyak Satpaev, serta telah berinvestasi sebesar US\$ 1,5 Milyar bersama Kazakhstan dan Russia pada blok minyak Kurmangazy. IEA juga berpendapat bahwa konsumsi hidrokarbon India akan tumbuh dari yang awalnya 3-3,5 juta barrel menjadi 5 juta per hari pada 2020.¹³⁷

Ekspansi minyak India ini menegaskan ambisi India dalam mewujudkan keamanan energi dalam negerinya. Perusahaan minyak dan gas India sangat mendukung kebijakan luar negeri India untuk menjalin hubungan secara strategis

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Marathon adalah perusahaan energi global Amerika Serikat. Lihat dalam Marathon Oil. *About Us*. Diakses dari http://www.marathonoil.com/About_Us/ [4 November 2014]

¹³⁶ James Wiley. *Op. Cit.*

¹³⁷ Gauri Khandekar. *Op. Cit.*

dengan negara-negara lain. OVL sebagai perusahaan minyak nasional India telah mengakuisisi 20 blok minyak di 16 negara berbeda.¹³⁸ Hal ini sejalan dengan ambisi India untuk memproduksi sekitar 60 juta minyak per tahun pada 2025, dan telah menghabiskan dana sekitar US\$ 45 milyar untuk investasi di luar negeri.¹³⁹

Posisi tawar India dalam permasalahan minyak juga menjadi salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan. India telah diketahui pada bab sebelumnya merupakan negara dengan defisit energi yang tergolong tinggi, untuk mengatasi hal tersebut maka India melancarkan strategi untuk mencukupi kebutuhan energi domestiknya melalui energi impor. Jejak rekam India dalam proyek minyak di luar negeri adalah salah satu fakta berjalannya strategi impor energi India. Sejak 6 Januari 2001, India merupakan pemegang 20 persen PI dalam blok minyak Sakhalin-1 di Russia selain Exxon, Sodeco, Smilliong, dan RN Astra. India sampai dengan tahun 2011 masih memiliki minat tinggi dalam mengelola minyak di kawasan Rusia. Hal ini dibuktikan dengan berminatnya India untuk mengakuisisi blok Sakhalin-3. Negosiasi dengan Rusia sampai saat ini masih terkesan tidak berjalan karena adanya hambatan regulasi dari Rusia untuk eksplorasi blok Sakhalin-3.¹⁴⁰

Menarik apabila mencermati kiprah India dalam mengakuisisi blok minyak di wilayah Rusia. India memanfaatkan ketergantungan Rusia terhadap ekspor energi untuk dapat masuk ke dalam blok minyak Rusia. Blok minyak India di Rusia tidak hanya terhenti pada Sakhalin-1. Kiprah lain India dalam melancarkan strategi energi impornya adalah mengakuisisi perusahaan energi imperial di Rusia yang yang

¹³⁸ PR Newswire. (Tanpa Tahun). *ONGC-India's Oil and Natural Gas Corporation Deploys Paradigm Software Tools Nationwide*. Diakses dari <http://www.prnewswire.com/news-releases/ongc---indias-oil-and-natural-gas-corporation-deploys-paradigm-software-tools-nationwide-58586492.html> [2 Desember 2014]

¹³⁹ Gauri Khandekar. *Op. Cit.*

¹⁴⁰ Infraline. (Tanpa Tahun). *ONGC Videsh Limited's activities in Sakhalin (Asia Pasific)*. Diakses dari <http://www.infraline.com/ong/players/ovl/Sakhalin.aspx> [2 Desember 2014]

berbasis di Siberia Barat. India mengakuisisi perusahaan ini pada 13 Januari 2009 dengan ijin produksi yang valid sampai tahun 2033.¹⁴¹

India tak hanya memiliki basis energi dalam wilayah Rusia, dalam wilayah yang lain India juga telah mengambil bagian dalam eksplorasi blok minyak yang lain. ONGC memegang 17 persen PI dalam blok A1 dan blok A3 yang berada dalam kawasan Myanmar. Produksi secara komersial dalam blok ini dimulai pada 1 November 2009 dan pengembangan dalam eksplorasi ini berlanjut pada 18 September 2013.¹⁴² Strategi impor minyak India tidak hanya terpusat pada regional Asia, namun India juga memiliki peran dalam eksplorasi minyak di kawasan Afrika, Amerika Latin serta kawasan timur tengah.

Beberapa blok yang telah diakuisisi oleh India kemudian memberikan sebuah penilaian bahwa India sampai saat ini tetap konsisten untuk memainkan perannya dalam ranah energi secara global. Pengakuisisian blok-blok minyak di luar wilayah dari India memiliki tujuan jangka panjang yang diharapkan oleh India dapat mencukupi kebutuhan energi domestiknya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa India merupakan negara dengan defisit energi yang tergolong tinggi sehingga untuk menanggulangi hal tersebut India membutuhkan ekspansi ladang energi di luar wilayahnya.

3.5 Kerjasama Eksplorasi Minyak India dengan Vietnam

Kemitraan strategis adalah salah satu tujuan mendasar dari politik luar negeri India. Perubahan mendasar dalam pandangan politik luar negeri India membuat negara ini secara intensif terus meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Dalam beberapa dekade terakhir, India secara intensif terus menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, Russia, China, Jepang, Indonesia, Australia, Vietnam, Korea

¹⁴¹ Oil and Natural Gas. Corp. (Tanpa Tahun). *Assets*. Diakses dari <http://www.ongcvidesh.com/Assets.aspx?tab=0> [2 Desember 2014]

¹⁴² *Ibid.*

Selatan, Iran, Afghanistan, dan beberapa negara lainnya sebagai implementasi kemitraan strategis politik luar negeri India.¹⁴³

Strategi politik luar negeri India telah menempatkan ASEAN sebagai pusat dari kebijakan LEP. Posisi ASEAN sebagai episentrum LEP inilah yang kemudian menjadikan ASEAN sebagai prioritas utama India dalam menjalin kerjasama. Tercatat bahwa transaksi perdagangan antara India dengan ASEAN telah mencapai angka US\$ 57,89 milyar pada 2010-2011.¹⁴⁴ Untuk tetap menjaga transaksi perdagangan ini tetap berjalan lancar, India telah menyatakan diri bahwa mereka akan terus memainkan peran penting di ASEAN. Peran penting ini merupakan implementasi dari pernyataan mantan PM India Jawaharlal Nehru yang telah penulis jelaskan pada bab dua.

Adanya konflik-konflik yang mempengaruhi konstelasi politik di ASEAN sangat berpengaruh dalam kerjasama ekonomi India dengan ASEAN. Konflik Laut China Selatan yang melibatkan negara ASEAN dengan China adalah salah satu bukti nyata konflik yang dialami oleh ASEAN. Implikasi yang dihasilkan oleh konflik ini kemudian adalah kerjasama ekonomi India dengan ASEAN mulai terancam oleh konflik yang terjadi di Laut China Selatan.

Untuk menanggulangi ancaman tersebut, India membutuhkan kerjasama yang lebih strategis dengan negara-negara di ASEAN. Kerjasama strategis tersebut kemudian diwujudkan India dalam kerjasamanya dengan Pemerintah Vietnam. Tawaran kerjasama minyak pada posisi strategis yang dilayangkan oleh pemerintah Vietnam kepada India telah direspons dengan baik oleh pemerintah India. Lahirnya MoU antara India dengan Vietnam merupakan langkah nyata yang berusaha dilakukan oleh India dalam menanggulangi ancaman kerjasama ekonomi dalam

¹⁴³ Ankit Panda. 2013. *Why Does India Have So Many 'Strategic Partners' and No Allies?*. Diakses dari <http://thediplomat.com/2013/11/why-does-india-have-so-many-strategic-partners-and-no-allies/> [4 November 2014]

¹⁴⁴ Munmun Majumdar. *Op. Cit.* Hal. 242

wilayah Laut China Selatan. Secara ekonomi, publik dapat menilai tentang adanya sebuah sinergitas baru dalam kerjasama India dengan Vietnam. Transaksi bilateral diperkirakan sekitar US\$ 8 milyar diantara kedua negara ini dan berencana untuk ditingkatkan hingga mencapai US\$ 15 milyar pada 2020.¹⁴⁵

Vietnam merupakan potensi yang sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan India. India telah memiliki 68 Proyek operasional dengan total nilai investasi sekitar US\$ 1 milyar. Investasi India meliputi berbagai sektor, termasuk eksplorasi minyak dan gas, eksplorasi mineral, pabrik gula, agro-kimia, IT, dan bidang pertanian. Para investor teratas India di Vietnam diantaranya adalah OVL, *Essar Exploration and Production Ltd*, *Nagarjuna Ltd*, *KCP Industries Limited*, Pabrik Kopi Ngon, *Venkateswara Hatcheries*, *Phillips Carbon*, *McLeod Russell* dan *CGL*. Perusahaan-perusahaan Vietnam juga berusaha meninggalkan jejak mereka di India. Jika diakumulasikan secara spesifik maka Vietnam telah memiliki tiga proyek investasi dengan nilai investasi sebesar US\$ 23,6 juta.¹⁴⁶

Kerjasama energi adalah bidang lain yang menjanjikan, yang membawa elit-elit dari kedua negara ini menjadi lebih dekat. Selama kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam pada November 2013, Vietnam setuju untuk memberikan perusahaan-perusahaan India tujuh blok eksplorasi walaupun mendapat pertentangan keras dari China.¹⁴⁷ Namun, untuk menanggulangi Investasinya tidak terbuang percuma, India berniat untuk melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap blok minyak yang ditawarkan oleh Vietnam.

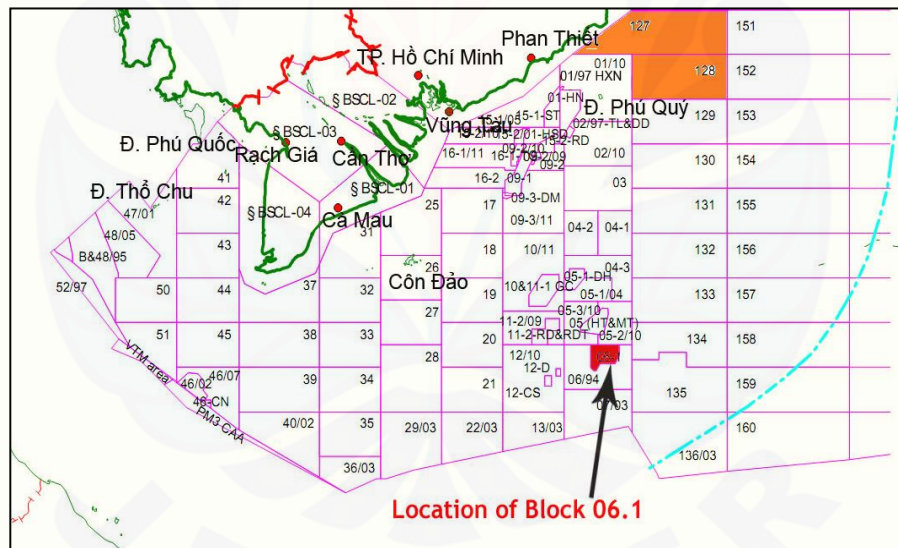
MoU yang dilahirkan oleh kedua negara ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kerjasama-kerjasama yang telah dirintis sebelumnya. Pada tahun 1988, India memulai kerjasama energi dengan pemerintah Vietnam dengan berinvestasi

¹⁴⁵ Manish Chand. 2014. *India & Vietnam: Old Friends, New Vistas*. Diakses dari <http://www.mea.gov.in/in-focus-article.htm?23947/India+amp+Vietnam+Old+Friends+New+Vistas> [16 November 2014]

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

pada blok 06.1. Produksi komersil pada blok 06.1 dimulai pada tahun 2003 yang menghasilkan 2 milyar meter kubik gas pada 2011-2012 berdasarkan pembagian PI yang diperoleh OVL sebesar 45%.¹⁴⁸ Kerjasama India dengan Vietnam kemudian berkembang dengan diakuisisinya blok 127 pada tanggal 24 Mei 2006. OVL sebagai pihak yang mengakuisisi memegang 100% PI dalam blok tersebut. Pada saat itu, OVL telah mendapatkan sekitar 1,150 sq km data seismik tiga dimensi dalam blok tersebut, namun setelah eksplorasi dilakukan sedalam 1265 mts pada Juli 2009 tidak ditemukan adanya hidrokarbon. OVL kemudian memutuskan untuk mengembalikan blok tersebut kepada Vietnam karena tidak ditemukannya hidrokarbon yang mereka harapkan. OVL sampai dengan 31 Maret 2010 telah menginvestasikan sekitar US\$ 60 Juta untuk mengelola dan mengeksplorasi blok tersebut.¹⁴⁹ berikut ini adalah lokasi dari blok 06.1 yang menjadi awal dari kerjasama energi India dengan Vietnam.



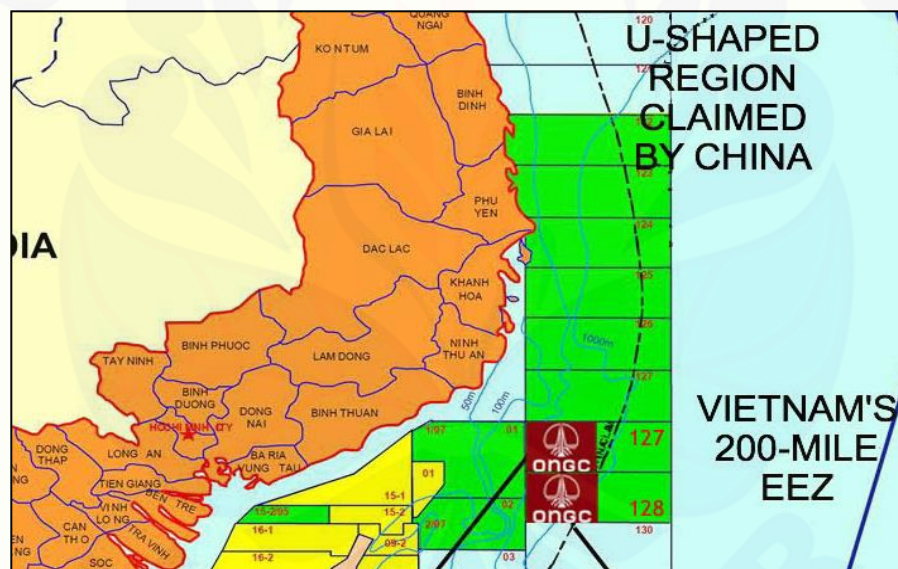
Gambar 3.1 Lokasi Blok 06.1 di Vietnam

Sumber: <http://indiandefence.com/threads/india-faces-standoff-with-china-on-sea-oil.11435/>

¹⁴⁸ P. K. Ghosh. 2013. Binding Vietnam and India: Joint Energy Exploration in South China Sea. *RSIS Commentaries*. No. 228/2013. Hal. 1

¹⁴⁹ ONGC. (Tanpa Tahun). *Assets*. Diakses dari <http://www.ongcvidesh.com/Assets.aspx?tab=0> [15 November 2014]

Pada saat yang sama dengan diakuisisinya blok 127, India juga mengakuisisi blok minyak Vietnam yang lain yaitu blok 128 yang letaknya berdekatan dengan blok 127. OVL mempunyai ekstensi eksplorasi fase pertama yang valid sampai dengan 15 Juni 2012 dengan persentase PI yang sama dengan blok 127 yaitu 100%. Eksplorasi blok tersebut dilakukan pada September 2009 namun sulitnya peralatan eksplorasi India untuk menembus dasar laut membuat eksplorasi pada blok ini sulit dilakukan. Untuk memenuhi komitmen PSC yang telah dijalin oleh kedua negara maka OVL berusaha untuk terus mencari data lokasi yang mudah untuk dilakukan pengeboran. OVL juga meminta penambahan fase eksplorasi selama dua tahun kepada Petro Vietnam yang mulai berlaku pada 16 Juni 2012.¹⁵⁰ Berikut ini adalah peta lokasi dari blok-blok minyak lain yang diakuisisi oleh India di Vietnam.



Gambar 3.2 Lokasi blok 127 dan 128 di Vietnam

Sumber: http://atimes.com/atimes/Southeast_Asia/ND17Ae01.html

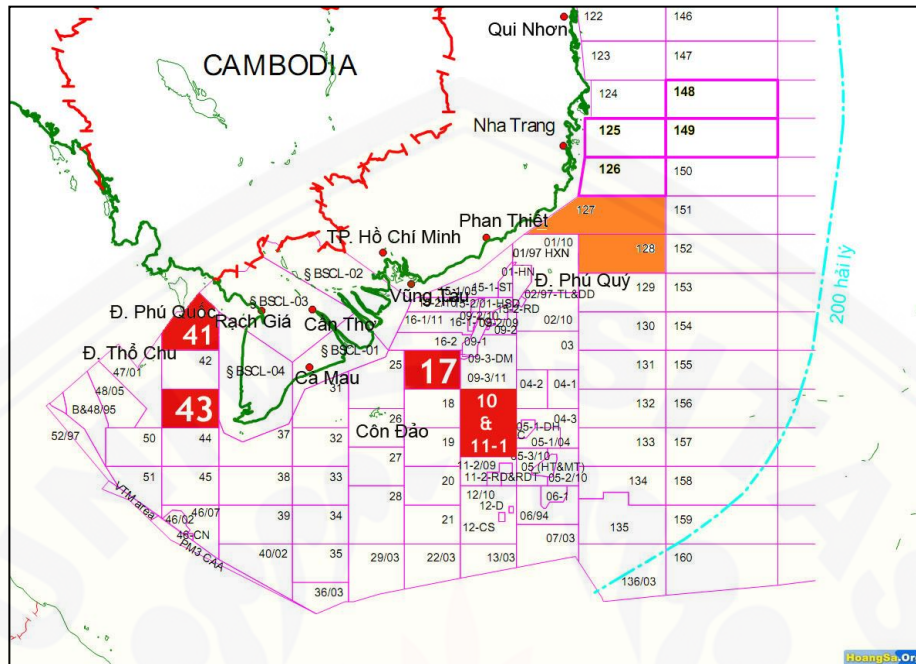
Kerjasama minyak antara India dengan Vietnam tidak berhenti pada blok 06.1, 127, dan 128, namun terus berlanjut dengan penawaran lebih banyak blok minyak

¹⁵⁰ *Ibid.*

dari Vietnam kepada India. Hal ini sesuai dengan lembar fakta yang telah ditandatangani oleh kedua negara dalam kunjungan Presiden Vietnam di India pada tahun 2011. Lembar fakta tersebut secara substansial menegaskan komitmen India dan Vietnam dalam menjalin kerjasama minyak dan industri gas dalam jangka panjang. Aspek kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang hidrokarbon juga menjadi salah satu point yang masuk dalam lembar fakta tersebut.¹⁵¹ Kesepakatan kerjasama minyak berikutnya terjadi pada tahun 2013 dimana pada saat itu kedua negara menyetujui MoU yang berisikan delapan poin kerjasama. Salah satu poin dalam MoU tersebut berisikan tentang penawaran tujuh blok minyak baru di Vietnam untuk dapat dikelola bersama.¹⁵² Dari berbagai sumber yang diketahui oleh penulis setidaknya terdapat lima blok baru yang ditawarkan oleh PetroVietnam kepada India selain blok 127 dan blok 128 yang telah dikelola bersama sebelumnya. Lima blok minyak baru yang ditawarkan yaitu blok 17, 41, 43 serta blok 10 & 11-1, dan 102 & 106/10 yang berada dalam wilayah eksklusif Vietnam, sedangkan dua blok yang lain berada di Uzbekistan. Penawaran blok minyak yang baru ini berlaku selama tiga tahun ke depan apabila ONGC setuju dengan blok yang ditawarkan maka ONGC akan mengajukan proposal kepada Petro Vietnam.¹⁵³ Berikut adalah peta lokasi blok-blok baru yang ditawarkan di wilayah Vietnam.

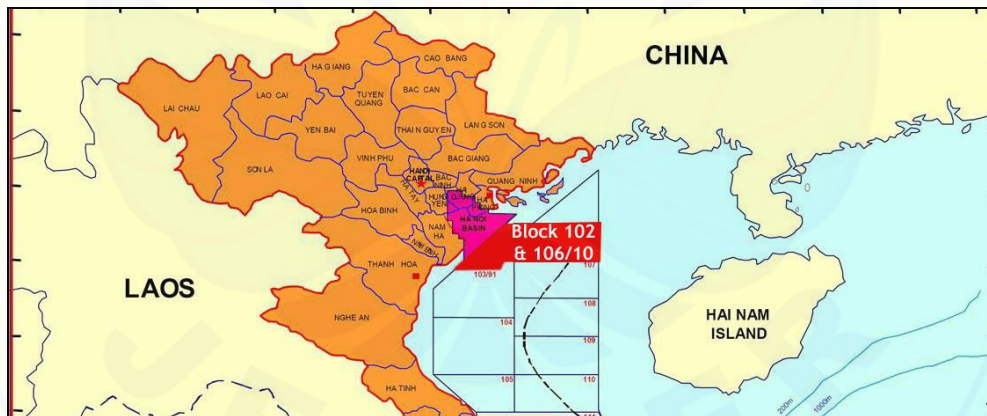
¹⁵¹ Ministry of External Affairs Government of India. 2011. *Fact Sheet on MoUs/Treaty/Work Plan/signed during the visit of President of Vietnam*. Diakses dari <http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5347/Fact+Sheet+on+MoUs+Treaty+Work+Plan+signed+during+the+visit+of+President+of+Vietnam> [15 November 2014]

¹⁵² P. K Ghosh. *Op. Cit.*



Gambar 3.3 Lokasi blok 41, 43, 17, serta blok 10 & 11-1

Sumber: <http://indiandefence.com/threads/india-faces-standoff-with-china-on-sea-oil.11435/>



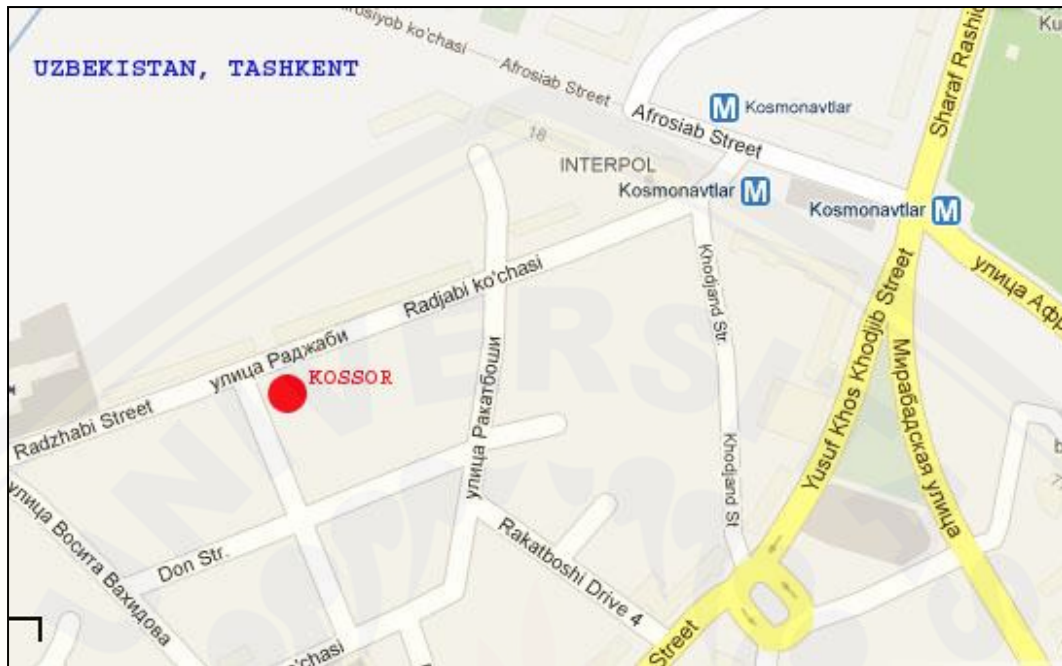
Gambar 3.4 Lokasi Blok 102 & 106/10

Sumber: http://atimes.com/atimes/Southeast_Asia/ND17Ae01.html

Gambar 3.3 menjelaskan bahwa blok 41, 43, 17 serta 10 & 11-1 merupakan kawasan yang terletak dalam yurisdiksi Vietnam. Jika dispesifikasi lebih detail, maka blok 41 dan 43 berada dalam kawasan Lembah Sungai *Phu Quoc* sedangkan blok 17 dan 10 & 11-1 berada dalam kawasan *Con Dao*. Ketiga blok ini adalah blok yang sepenuhnya berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif dari Vietnam sehingga tidak ada intensitas konflik yang dapat bermuara dari ketiga blok ini. Blok lain yang ditawarkan oleh Vietnam adalah blok 102 & 106/10 yang terletak di sebelah utara Vietnam dan berdekatan dengan lembah sungai Hanoi seperti yang dapat dilihat dalam gambar 3.4.

PetroVietnam sebagai Perusahaan minyak nasional Vietnam juga menawarkan blok lain yang berada di luar wilayah Vietnam. Blok lain tersebut berada di Blok Kossor yang terletak di Uzbekistan. Adapun alasan Vietnam menawarkan blok tersebut adalah untuk mengimbangi pengaruh China di kawasan Asia Barat.¹⁵⁴ Berikut adalah gambar 3.5 yang menggambarkan lokasi dari Blok Kossor di Uzbekistan.

¹⁵⁴ ZEE News. 2013. *ONGC Videsh gets 5 oil and gas blocks offer from Vietnam*. Diakses dari http://zeenews.india.com/business/news/companies/ongc-videsh-gets-5-oil-and-gas-blocks-offer-from-vietnam_89195.html [25 Desember 2014]



Gambar 3.5 Lokasi Blok Kossor di Uzbekistan

Sumber: <http://pvep.uz/en/contact/>

Gambar 3.5 merupakan peta lokasi dari Blok Kossor di Uzbekistan yang dirilis dalam situs resmi Petro Vietnam. Blok ini adalah blok minyak yang dimiliki oleh Vietnam yang terletak di barat laut Uzbekistan. Blok ini dikelola oleh *Kossor Operating Company* yang merupakan operator blok dari Petro Vietnam di Uzbekistan.¹⁵⁵

OVL juga mempertimbangkan untuk membeli blok lain di Vietnam. *The Economic Times* mewartakan hal ini kepada publik bahwa OVL berminat untuk membeli Blok B yang saat ini dikelola oleh Chevron. Chevron sendiri yang memegang 42,38 persen PI dalam blok B juga berminat untuk menjualnya. Chevron diketahui berminat untuk menjual blok tersebut karena sulitnya mencapai

¹⁵⁵ PVEP. 2012. *Vietnam PVEP to Complete drilling First well in Uzbekistan Kossor block in Aug.* Diakses dari <http://pvep.uz/en/news/vietnam-pvep-to-complete-drilling-first-well-in-uzbekistan-kossor-block-in-aug/> [25 Desember 2014]

kesepakatan harga dengan Vietnam. OVL tertarik untuk mengambil bagian di blok yang memiliki 4 Triliun kaki kubik cadangan minyak ini karena estimasi 63 persen cadangan minyak dapat diproduksi. Produksi dalam blok ini ini dapat menghasilkan sampai 490 juta kaki kubik gas dan 6.000 sampai 7.000 barel kondensat per hari.¹⁵⁶

Jika ditarik kesimpulan secara kronologis maka kerjasama India dengan Vietnam merupakan kerjasama yang mempunyai visi jangka panjang. Kerjasama India dengan Vietnam dimulai sejak tahun 1988 dan bertahan sampai saat ini. Beberapa dekade setelah awal kerjasama, kedua negara bahkan semakin berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama dalam bidang energi. Berikut adalah Tabel 3.1 tentang kronologi kerjasama eksplorasi minyak antara India dengan Vietnam yang dimulai sejak tahun 1988.

Tabel 3.1 Tabel kronologi kerjasama minyak India-Vietnam

No.	Tahun	Hasil Negosiasi
1	1988	India Memperoleh Ijin eksplorasi blok 06.1
2	2003	OVL Melanjutkan produksi secara komersil
3	2006	Mengakuisisi blok 127 dan blok 128
4	2011	Renegosiasi eksplorasi blok 128
5	2013	Pembicaraan tentang lima blok baru (17, 41, 43, 10 & 11-1, dan 102 & 106/10) yang akan dieksplorasi bersama di wilayah Vietnam
6	2013	Pembicaraan tentang dua blok Petro Vietnam yang berada di blok Kossor, Uzbekistan.

Vietnam bukanlah sumber energi terbanyak bagi India, namun Wilayah yang ditawarkan oleh Vietnam merupakan wilayah strategis bagi India. India akan dirugikan apabila mengabaikan kawasan yang ditawarkan oleh Vietnam karena dalam kawasan tersebutlah kepentingan geopolitik maupun ekonomi India berada. Jika jalur

¹⁵⁶ Economic Times. 2013. *ONGC Videsh Ltd eyes Chevron's gas block in Vietnam*. Diakses dari http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-11-25/news/44413333_1_gas-block-chevron-ongc-videsh-ltd [1 Desember 2014]

Laut China Selatan yang sebagian berada dalam wilayah Vietnam terputus maka konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh India adalah terputusnya akses utama perdagangan India dengan negara ASEAN maupun negara Asia Pasifik yang lain seperti Jepang maupun Korea Selatan. Oleh karena itu, meskipun akses energi yang diperoleh India di wilayah cenderung sedikit namun jalur perekonomian di kawasan ini memiliki peran sangat vital bagi perekonomian India.

3.6 Legalitas Ekplorasi Minyak India dengan Vietnam menurut Hukum Laut Internasional.

Kerjasama Eksplorasi Minyak antara India dengan Vietnam bukanlah kerjasama yang terjalin tanpa kontradiksi. Walaupun kerjasama antar kedua negara ini memiliki aspek legalitas, namun masih terdapat pertentangan dari negara lain yang juga merasa memiliki hak untuk mengeksplorasi daerah yang sama dengan India dan Vietnam. Negara lain yang memberikan pertentangan tersebut adalah China.

Beberapa kali pemerintah China menegaskan perlawanan ini kepada media internasional melalui Pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China. Melalui juru bicaranya, Kementerian Luar negeri China menentang keras segala bentuk eksplorasi minyak dan gas di daerah yang masih menjadi yurisdiksi dari China. Pernyataan ini tentu saja menguatkan anggapan bahwa wilayah-wilayah di Laut China Selatan yang diklaim oleh China merupakan kawasan yang *indisputable*. Pemerintah China juga memberikan peringatan kepada dunia internasional agar tidak terlalu terlibat dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan. Berikut adalah pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China:

“Posisi kita secara konsisten adalah melawan seluruh negara yang terlibat dalam ekplorasi gas dan minyak serta aktivitas pembangunan di bawah yurisdiksi China. Kami berharap bahwa negara-negara lain untuk tidak terlibat dalam sengketa. Untuk negara-negara di luar kawasan ini, kami berharap mereka menghormati dan mendukung negara-negara di dalam kawasan ini

*untuk menyelesaikan sengketa ini melalui pembicaraan secara bilateral”.*¹⁵⁷

Pernyataan di atas secara jelas mendefinisikan posisi China sebagai negara yang tidak menginginkan adanya keterlibatan negara-negara lain untuk masuk ke dalam wilayah Laut China Selatan. Meskipun tidak menyatakan secara spesifik negara-negara mana yang tidak diinginkan oleh China, namun pernyataan tersebut ditujukan kepada negara-negara yang terindikasi ingin masuk ke dalam wilayah Laut China Selatan. Negara-negara yang dimaksud oleh China terindikasi memiliki niatan untuk memasuki wilayah Laut China Selatan adalah negara-negara seperti India, Rusia, ataupun Amerika Serikat. Beberapa negara yang tidak dikehendaki oleh China tersebut telah memiliki strategi masing-masing untuk menyasiasi jika mereka dituduh oleh China memasuki kawasan Laut China Selatan.

Kerjasama antara India dengan Vietnam dalam kasus ini merupakan kerjasama yang telah memiliki legalitas jika mengacu pada hukum laut internasional. Hukum laut internasional yang digunakan oleh India dengan Vietnam dalam memperkuat aspek legalitasnya adalah dengan memakai aturan-aturan yang ada dalam UNCLOS. Negara-negara lain yang terletak di sekitar Laut China Selatan seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina ataupun Taiwan juga menggunakan langkah yang sama seperti Vietnam untuk memperkuat legalitas kawasan mereka melalui UNCLOS.

Blok 127 dan 128 yang oleh Vietnam diklaim berada dalam kawasannya sebenarnya merupakan wilayah yang menjadi milik Vietnam. Hal tersebut jika mengacu pada hukum laut internasional seperti yang dijelaskan dalam pasal-pasal UNCLOS. Pasal kelima ayat 57 dari UNCLOS secara spesifik menjelaskan posisi blok 127 dan 128 milik Vietnam. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kawasan yang berada dalam 200 mil setelah garis pantai dari sebuah pulau maka kawasan tersebut

¹⁵⁷ S.D. Muni. 2011. *The Turbulent In South China Sea Waters: India, Vietnam, and China. ISAS Insight*. No. 140 (October 2011). Hal. 2

sepenuhnya menjadi Zona Ekonomi Eksklusif dari sebuah negara.¹⁵⁸ Berikut adalah gambar batas wilayah yang sah menurut hukum laut Internasional.



Gambar 3.3 Batas-batas laut tiap negara di Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS dan Klaim dari China

Sumber: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21137144>

Gambar 3.3 menjelaskan bahwa Vietnam memiliki 200 mil ZEE yang sah menurut hukum laut internasional. Posisi blok 127 dan 128 juga sepenuhnya berada dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam yang telah dijelaskan sebelumnya pada gambar 3.2. Kawasan yang diklaim oleh China dalam gambar 3.3 merupakan sebuah kontradiksi jika dikaitkan dengan hukum laut internasional. Klaim wilayah

¹⁵⁸ United Nations. 1982. *United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS)*. Hal. 44

yang dilakukan oleh China sangat kontradiktif mengingat hampir keseluruhan wilayah dari Laut China Selatan diklaim oleh China. Klaim dari China tersebut bahkan hampir mencapai wilayah daratan dari Brunei Darussalam serta Filipina. Luasnya klaim wilayah yang dilakukan oleh China telah menimbulkan kekhawatiran di negara-negara sekitar Laut China Selatan. Jika negara-negara di sekitar kawasan Laut China Selatan tunduk pada klaim yang dilakukan oleh China, maka negara-negara tersebut tidak akan memiliki kuasa untuk mengelola wilayah yang seharusnya menjadi milik mereka. Respon dari negara-negara di sekitar Laut China Selatan sangat variatif dalam menyikapi klaim dari China ini. Salah satu respon nyata yang dilakukan negara-negara di sekitar kawasan di sekitar Laut China Selatan adalah menjalin kerjasama dengan negara lain untuk terlibat dalam persengketaan wilayah ini. Salah satu negara yang melakukan langkah perlawanan tersebut adalah Vietnam yang menjalin kerjasama dengan India.

Kerjasama eksplorasi minyak India dengan Vietnam dinilai banyak kalangan sebagai tindakan provokatif yang kemudian menuai respon dari China. Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung dalam berbagai kesempatan menegaskan kepada publik bahwa posisi eksplorasi India dengan Vietnam merupakan kerjasama yang sudah sesuai dengan hukum laut internasional. Nguyen menegaskan hal tersebut dalam kunjungannya ke India.

"Vietnam menyambut baik dan berkomitmen untuk menciptakan setiap kondisi yang menguntungkan bagi kerja sama ekonomi yang normal antara perusahaan minyak dan gas Vietnam dan mitra asing mereka, termasuk perusahaan India, di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Vietnam sesuai dengan hukum Vietnam dan hukum internasional, khususnya 1982 UNCLOS."¹⁵⁹

¹⁵⁹ DNA India. 2014. *India, Vietnam to sign deal for oil exploration in South China Sea despite protest by China*. Diakses dari <http://www.dnaindia.com/india/report-india-vietnam-to-sign-deal-for-oil-exploration-in-south-china-sea-despite-protest-by-china-2029677> [14 Desember 2014]

Protes keras dari China terhadap kerjasama yang dijalin India dalam wilayah sengketa tidak membuat India melepas kerjasamanya dengan Vietnam. India justru beralasan bahwa kerjasama yang dijalin dengan Vietnam merupakan kerjasama komersial yang berorientasi kepada ekonomi. Mantan Menteri Luar Negeri India, S. M. Khrisna membenarkan hal ini kepada publik bahwa kerjasama eksplorasi minyak antara India dengan Vietnam telah sesuai dengan hukum laut internasional. Khrisna juga menjelaskan bahwa wilayah yang menjadi objek kerjasama merupakan kawasan yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif dari Vietnam.¹⁶⁰

Pasca dukungan yang telah diberikan atas kemerdekaan Vietnam atas Amerika Serikat, sangat penting bagi India untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Vietnam. Hal tersebut sangat beralasan mengingat pada tahun 2012 nilai transaksi perdagangan kedua negara telah mencapai angka US\$ 2 Milyar.¹⁶¹ Begitupun jika mengacu pada UNCLOS, Vietnam akan menjadi negara yang memiliki dominasi terhadap kawasan Laut China Selatan sebelah barat. Inilah yang kemudian menjadikan Signifikansi kerjasama bilateral India dengan Vietnam memiliki pengaruh cukup penting terhadap perekonomian kedua negara. Akan terasa sia-sia bagi Vietnam apabila memiliki kawasan yang potensial seperti Laut China Selatan, namun tidak dimanfaatkan untuk menjalin relasi yang lebih kuat dengan negara yang memiliki progresivitas ekonomi seperti India.

Kerjasama eksplorasi minyak India dengan Vietnam telah memiliki aspek legalitas secara bilateral yang terangkum dalam MoU yang ditandatangani oleh berbagai pemangku kepentingan dari kedua negara. India dengan Vietnam telah melahirkan beberapa MoU termasuk MoU pada tahun 2011 dan 2013 yang di dalamnya terdapat kerangka kerjasama minyak dalam jangka panjang. Tahun 2011 merupakan kerangka awal dimana komitmen kerjasama minyak dalam jangka panjang menjadi salah satu prioritas dalam kerjasama kedua negara. Berikut adalah

¹⁶⁰ Munmun Majumdar. *Op. Cit.* Hal. 244.

¹⁶¹ Harsh V. Pant. 2013. *Op. Cit.* Hal. 11

Tabel 3.2 yang berisi daftar MoU yang disepakati oleh India dengan Vietnam pada Oktober 2011.

Tabel 3.2 Daftar Perjanjian yang ditandatangani pada waktu kunjungan Presiden Vietnam di India Tahun 2011.

No.	Nama MoU/Kerjasama	Penandatanganan Vietnam	Penandatanganan India
1.	Kerjasama Ekstradisi antara Republik India dengan Republik Sosialis Vietnam	Le Quy Vuong (Wakil Menteri Keamanan Publik)	Shri S. M. Krishna (Menteri Luar Negeri)
2.	MoU antara Pemerintah Republik Sosialis Vietnam dan Republik India dalam “Tahun Persahabatan Vietnam India 2012”	Doan Xuan Hung (Wakil Menteri Luar Negeri)	Shri Sanjay Singh (Sekretaris Menteri Luar Negeri)
3.	Rencana Kerja untuk tahun 2011-2013 antara Dewan Riset Pertanian Republik India dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Pemerintah Sosialis Republik Vietnam dalam bidang Pertanian dan Riset Perikanan serta Pendidikan.	Bui Ba Bong (Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan)	Dr. S. Ayyapan (Sekretaris Departemen Penelitian Pertanian & Pendidikan)
4.	Persetujuan dalam kerjasama antara Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) dengan ONGC Videsh Limited (ONGC-VL) pada sektor minyak dan gas.	Phung Dinh Thuc (Acting Chairman, Presiden & CEO Petro Vietnam)	Shri D. K. Sarraf (Direktur Utama OVL)
5.	MoU dalam kerjasama budaya antara Olahraga budaya & pariwisata Republik Sosialis Vietnam dengan Dewan India untuk hubungan budaya Republik India.	Huynh Vin Al (Wakil Menteri Budaya, Olahraga, dan Pariwisata)	Shri Suresh K. Goel (Direktur Jenderal ICCR)
6.	MoU dalam Program Pertukaran Budaya antara Kementerian Budaya Republik India dengan Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Republik Sosialis Vietnam untuk tahun 2011-2014.	Huynh Vin Al (Wakil Menteri Budaya, Olahraga, dan Pariwisata)	Shri Jawhar Sircar (Sekretaris Kementerian Kebudayaan)

Sumber: [http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5405/Agreements signed during the visit of President of Vietnam](http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5405/Agreements%20signed%20during%20the%20visit%20of%20President%20of%20Vietnam)

MoU dalam Tabel 3.2 ini secara jelas menyebutkan bahwa pada point keempat terdapat kerangka kerjasama dalam sektor minyak dan gas. Ratifikasi MoU ini dilakukan di India dengan diwakili oleh masing-masing perwakilan negara sesuai dengan bidang masing-masing. Pada point keempat yang menyangkut permasalahan

minyak dan gas, penandatanganan pihak India diwakili oleh Direktur Utama dari OVL sedangkan pihak Vietnam diwakili oleh CEO dari Petro Vietnam.

Tindak lanjut dari MoU pada tahun 2011 adalah lahirnya MoU pada tahun 2013. MoU pada tahun 2013 lebih banyak mengalami perkembangan pada sektor-sektor yang lain namun tetap memprioritaskan kerjasama minyak di dalam MoU tersebut. Berikut adalah MoU yang ditandatangani kedua negara dalam kunjungan Sekjen partai komunis Vietnam di India pada 20 November 2013.

Tabel 3.3 Daftar Perjanjian yang ditandatangani pada waktu kunjungan Presiden Vietnam di India Tahun 2013.

No.	Nama	Penandatanganan Vietnam	Penandatanganan India	Keterangan
1.	Perjanjian Layanan Udara	Dinh La Tang (Menteri Transportasi)	Shri Ajit Singh (Menteri Penerbangan Sipil)	ASA meminta promosi pelayanan udara internasional, termasuk penerbangan langsung antara kedua Negara dan juga mempromosikan system penerbangan internasional berdasarkan kompetisi diantara perusahaan penerbangan. ASA akan meyakinkan standar paling tinggi dari keselamatan dan keamanan dalam pelayanan udara internasional dan menegaskan kembali keprihatinan tentang tindakan atau ancaman terhadap keamanan pesawat, yang membahayakan keselamatan orang atau properti dan mempengaruhi pengoperasian layanan udara.
2.	MoU untuk mengatur <i>Indira Gandhi Hitech Crime Lab.</i> (IGHCL) di Hanoi	Letjen. Le Quy Vuong (Wakil Menteri Keamanan Publik)	Smt. Preeti Saran (Duta Besar India untuk Vietnam)	MoU ini menegaskan kembali keinginan untuk memperkuat kembali dan konsolidasi kerjasama antara kedua negara dalam bidang investigasi kejahatan, <i>counter terrorism</i> , dan kejahatan transnasional yang lain, serta pada area lain yang relevan. India dapat menyediakan jaminan finansial

No.	Nama	Penandatanganan Vietnam	Penandatanganan India	Keterangan
				menuju usaha mendapatkan peralatan teknis untuk IGHCL, mengajarkan bantuan-bantuan, program-program pelatihan untuk staf-staf anggota dan pengutusan dari ahli-ahli. Vietnam dapat menyediakan tempat permanen dan infrastruktur yang berhubungan untuk mendirikan IGHCL di Hanoi.
3.	Perjanjian Perlindungan Terhadap Informasi Rahasia	Letjen. Senior, Nguyen Chi Vinh (Wakil Menteri Pertahanan)	Shri Radha Krishna Matur (Sekretaris Pertahanan)	MoU ini berdasarkan pada prinsip MoU dalam kerjasama pertahanan yang ditandatangani kedua negara pada November 2009 untuk mengetahui keuntungan dari berbagi informasi dan untuk mengonfirmasi kepentingan bersama dalam perlindungan informasi tersebut dengan mengacu pada hukum-hukum nasional dan ketentuan-ketentuan yang relevan.
4.	MoU diantara dua Kementerian Keuangan	Mdm. Vu Thi Mai (Wakil Menteri Keuangan)	Dr. Arvind Mayaram (Sekretaris Departemen Urusan Keuangan)	MoU ini akan mengizinkan partai-partai untuk memperkuat pertukaran dan berbagi pengalaman dalam kebijakan fiskal untuk transisi ekonomi, manajemen makro ekonomi, proses manajemen anggaran, kebijakan-kebijakan finansial untuk mendukung teknologi tinggi dan pengembangan teknologi perangkat lunak. Pertukaran dari kebijakan-kebijakan finansial akan berguna untuk membangun kebijakan dalam bidang yang relevan yang disetujui bersama oleh partai-partai.
5.	Perjanjian Kerjasama antara Universitas Nasional Hanoi dengan Dewan Ilmiah dan Penelitian	Prof. Phung Xuang Nha (Presiden Universitas Nasiona Hanoi)	Prof. Samir K. Brachmari DG (Sekretaris Dewan Ilmiah dan Penelitian Industri)	Tujuan perjanjian ini adalah untuk mempromosikan kerjasama teknis dan ilmiah antara kedua institusi dengan sasaran pembangunan jangka panjang dalam kolaborasi teknis dan ilmiah serta mempromosikan jalinan

No.	Nama	Penandatanganan Vietnam	Penandatanganan India	Keterangan
	Industri India			persahabatan. Ini termasuk pertukaran para ahli ilmu pengetahuan, sarjana-sarjana, dan spesialis-spesialis, dsb. Untuk tujuan penelitian, pelatihan dan konsultasi.
6.	MoU dalam kerjasama antara Institut Manajemen Bangalore India dengan Akademi Nasional Administrasi Publik Ho Chi Minh	Prof. Thuong Thi Thong (Wakil Presiden Akademi Nasional Administrasi Publik Ho Chi Minh)	Prof. Devanath Tirupati (Direktur (In-Charge) Institut Manajemen Bangalore India)	MoU ini akan fokus dalam aktivitas dan program-program seperti pertukaran anggota-fakultas dan para pelajar, aktivitas penelitian bersama, partisipasi dalam seminar, dan pertemuan akademik, pertukaran dari bahan-bahan akademik dan informasi yang lain, program akademik khusus jangka pendek, program pelatihan dan <i>study tour</i> . Program ini awalnya akan fokus pada kebijakan publik, kewirausahaan, badan hukum pemerintah, Pelatihan untuk para eksekutif dari publik dan sektor perusahaan pribadi, Ilmu Pengetahuan Sosial dan pertukaran pelajar.
7.	MoU antara Vietnam Oil and Gas Group dengan ONGC Videsh Limited (OVL)	Nguyen Vu Truong Son (Presiden Petro Vietnam)	D. K Saraf (Direktur Utama OVL)	MoU ini menyediakan asosiasi dalam bidang eksplorasi, pembangunan dan produksi pada sumber daya minyak antara kedua negara untuk investasi yang baru oleh OVL pada blok minyak dan gas di Vietnam untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Petro Vietnam juga diundang untuk berpartisipasi dalam blok-blok terbuka di India dan di negara-negara dunia ketiga.
8.	MoU antara Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam dengan <i>Tata Power Ltd.</i> Dalam pembangunan	Nguyen Khac Tho (Wakil Direktur Jenderal Departemen Energi)	Shri Anil Sardana (<i>Chief Executive Officer Tata Power</i>)	MoU ini menyetujui TATA Power termasuk dalam TATA Group untuk bertindak sebagai Investor untuk membangun Long Phu 2, Proyek 2x660 MW <i>coal-fired power plant</i> , Proyek ini akan didesain, direncanakan, didapatkan, dikontrak, dibangun, dimiliki,

No.	Nama	Penandatanganan Vietnam	Penandatanganan India	Keterangan
	proyek 2 <i>long phu thermal power</i> di Soc Trang, Vietnam.			dioperasikan dan dirawat melalui Perusahaan BOT yang dimiliki oleh TATA Power dan investor-investor tambahan, dengan TATA Power sebagai <i>lead member</i> , dan akan mencapai operasi komersial sesuai persetujuan dengan Vietnam.
9.*	MoU Kerjasama Eksplorasi Minyak antara ONGC Videsh Ltd. (OVL) Dengan Petro Vietnam.	Nguyen Vu Truong Son (Presiden Petro Vietnam)	D. K Saraf (Direktur Utama OVL)	Vietnam menawarkan kepada India lima blok minyak lepas pantai (10 & 11. 17, 41, 43. 102 & 106/10) serta dua blok minyak yang berada di luar kawasan dari Vietnam (Blok Kossor, Uzbekistan). OVL dalam pernyataannya menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani MoU dengan Petro Vietnam dalam <i>joint cooperation</i> di sektor hidrokarbon. Jika OVL memutuskan untuk mengambil seluruh blok yang ditawarkan, maka PSC akan ditandatangani.

Sumber: <http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/22508/List+of+documents+signed+during+the+State+Visit+of+Nguyen+Phu+Trong+General+Secretary+of+Communist+Party+of+Vietnam+to+India>

*Sumber: http://zeenews.india.com/business/news/companies/ongc-videsh-gets-5-oil-and-gas-blocks-offer-from-vietnam_89195.html

Tabel 3.3 menjelaskan bahwa India telah menjalin beberapa kerjasama dalam berbagai bidang dengan Vietnam. Kerjasama tersebut meliputi berbagai bidang antara lain kerjasama di bidang pelayanan udara (poin 1), penanggulangan kejahatan transnasional (poin 2), kerjasama di bidang intelijen (poin 3), kerjasama fiskal (poin 4), kerjasama di bidang akademis (poin 5 dan 6), serta kerjasama di bidang energi (poin 7 dan 8). Poin MoU ketujuh menjelaskan bahwa kedua negara sepakat untuk menjalin kerjasama lebih mendalam di bidang energi. Vietnam setuju untuk membuka investasi baru kepada OVL sebagai perusahaan yang telah berinvestasi di

wilayah Vietnam, kemudian India juga sepakat untuk mengundang Petro Vietnam untuk berpartisipasi dalam eksplorasi minyak di blok-blok terbuka milik India.

Kedua MoU yang telah ditandatangani merupakan salah satu bukti bahwa aspek legalitas dalam konteks kebijakan telah dijalin oleh India dengan Vietnam dalam eksplorasi minyak di lepas pantai Vietnam. Adanya MoU ini membuat kerjasama yang dijalin India dengan Vietnam memiliki landasan kebijakan yang jelas. Eksplorasi minyak yang kemudian dilakukan oleh India dalam lepas pantai Vietnam adalah eksplorasi yang dilakukan dengan mengacu pada MoU tersebut.

BAB IV

RESISTENSI INDIA TERHADAP KLAIM CHINA DI LAUT CHINA SELATAN

Bab ini akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan resistensi India dan Vietnam terhadap klaim China di Laut China Selatan. Bab ini akan diawali dengan penjelasan dari Vietnam yang memiliki inisiatif untuk menawarkan India kerjasama eksplorasi minyak dalam kawasan ZEE miliknya. Kemudian, bab ini akan diikuti dengan penjelasan dari persetujuan India dalam menerima penawaran kerjasama eksplorasi minyak dari Vietnam serta prospek dari kerjasama tersebut. Sikap politik dari China kemudian akan menjadi akhir dari pembahasan dalam bab ini.

4.1 Inisiatif Vietnam dalam mengajukan penawaran kerjasama eksplorasi minyak dengan India.

Sikap Vietnam terhadap klaim wilayah dari China telah terlihat tepatnya pada tahun 2006 ketika Vietnam memberikan sepenuhnya hak pengelolaan atau PSC blok 127 dan 128 kepada India. Blok 127 dan blok 128 merupakan blok-blok yang memiliki letak strategis dalam kawasan Laut China Selatan yang berada di wilayah ZEE Vietnam. Munculnya penawaran blok-blok tersebut kepada India tentunya memunculkan dugaan kuat bahwa Vietnam sedang berupaya untuk melawan klaim dari China di kawasan Laut China Selatan. Vietnam berupaya untuk melawan ambisi China dengan menjalin kemitraan bersama India yang merupakan negara “*emerging power*”.

Pasca lepasnya blok 127 dari India pada Maret 2010,¹⁶² Pemerintah Vietnam aktif melakukan upaya rekonsiliasi dengan India. Upaya tersebut kemudian menghasilkan dua MoU pada tahun 2011 serta tahun 2013 yang dalam salah satu poinnya terdapat kerjasama dalam eksplorasi minyak sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.2 dan 3.3. Inisiatif Vietnam dalam mengundang India masuk ke dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan dapat dipahami sebagai salah satu langkah preventif Vietnam dalam menanggulangi tindakan politik China, khususnya dalam kasus klaim wilayah di Laut China Selatan. Vietnam semakin mengecam tindakan China ketika China melakukan sabotase terhadap aktivitas eksplorasi minyak Vietnam. China melakukan sabotase dengan cara memotong kabel seismik yang menghubungkan kabel tersebut dengan Kapal Vietnam. Hal ini dilakukan China sebagai upaya menghambat eksplorasi minyak yang dilakukan oleh Vietnam.¹⁶³ Atas dasar itulah, maka Vietnam kemudian memutuskan untuk berani mengundang India dalam eksplorasi minyak di wilayahnya.

Faktor kepercayaan merupakan salah satu hal mendasar yang menjadikan Vietnam memilih India sebagai mitra strategisnya dalam melawan upaya China menguasai ZEE-nya yang berada dalam wilayah Laut China Selatan. Vietnam lebih mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan negara yang dapat dipercaya untuk dapat membantunya dalam mengatasi permasalahan sengketa wilayah ini dengan cara aman damai. Jejak rekam India dengan Vietnam dalam hubungan bilateral juga cenderung lebih baik dibandingkan dengan China yang dalam sejarahnya pernah terlibat konflik dengan Vietnam, maka akan menjadi masuk akal apabila Vietnam menolak upaya China dalam kerjasama penyelesaian sengketa terkait permasalahan Laut China Selatan.

¹⁶² Rahul Mishra. *Op. Cit.* Hal. 5

¹⁶³ Jane Perlez. 2012. *China, Vietnam, and India Fight Over Energy Exploration in South China Sea*. Diakses dari http://www.nytimes.com/2012/12/05/world/asia/china-vietnam-and-india-fight-over-energy-exploration-in-south-china-sea.html?_r=0 [8 Januari 2015]

Beberapa dekade silam China pernah menawarkan kerjasama pada Vietnam dalam Kepulauan Spratly yang menjadi sengketa pada saat itu, namun Vietnam menolak karena adanya trauma historis atas konflik yang pernah dialami dengan China.¹⁶⁴ Friksi Vietnam dengan China tidak berhenti pada beberapa dekade silam, beberapa waktu yang lalu China juga sempat memancing reaksi negatif dari pemerintah Vietnam. Pada tahun 2012 tepatnya, China pernah meluncurkan desain paspor elektronik yang di dalam paspor tersebut mencantumkan Laut China Selatan sebagai wilayah dari China.¹⁶⁵ Hal ini dilakukan China tanpa meminta izin negara-negara yang juga memiliki hak dalam kawasan sengketa di Laut China Selatan. Adanya paspor elektronik bergambar Laut China Selatan tersebut kemudian mengundang reaksi dari pemerintah Vietnam yang dengan tegas menolak kemunculan paspor elektronik tersebut. Vietnam menolak paspor elektronik tersebut dengan cara menolak memberikan stempel.¹⁶⁶ Fakta historis inilah yang kemudian menjadikan Vietnam sulit untuk menerima China sebagai mitra strategis yang dapat dipercaya. Dalam konteks sengketa Laut China Selatan, Vietnam cenderung menjaga jarak dengan China sebagai upaya Vietnam untuk mewaspadai manuver politik China yang dapat membahayakan kepentingan nasional dari Vietnam.

Jika merujuk pada konsep *hedging* yang dikemukakan oleh Evelyn Goh, maka upaya yang dilakukan Vietnam dalam menyikapi klaim China dapat dikatakan sebagai elemen kerjasama kompleks (*complex engagement*) serta strategi *enmeshment*. Hal ini digunakan Vietnam sebagai upaya untuk melawan sikap politik China di kawasan Laut China Selatan. Melalui konsep *hedging*, Vietnam dapat

¹⁶⁴ Munmun Majumdar. *Op. Cit.* Hal. 245

¹⁶⁵ China Daily. 2012. *China Launches electronic passport*. Diakses dari http://usa.chinadaily.com.cn/china/2012-05/15/content_15301461.htm [8 Desember 2015]

¹⁶⁶ Fat Reyes. 2012. *PH, Vietnam set to hold joint bilateral cooperation in meeting next year*. Diakses dari <http://globalnation.inquirer.net/59605/ph-vietnam-set-to-hold-joint-bilateral-cooperation-meeting-next-year/> [17 Januari 2015]

dikatakan memilih alternatif dengan mengundang India sebagai negara besar untuk “memagari” blok 127 dan blok 128 yang dipersengketakan oleh China.

Vietnam menjalin kerjasama kompleks dengan India sebagai upayanya untuk mengeliminasi pengaruh China untuk terus berkembang dalam kawasan Laut China Selatan terutama dalam wilayah ZEE Vietnam. Walaupun kerjasama kompleks tersebut diwujudkan oleh Vietnam melalui kerjasama eksplorasi minyak dengan India, sangat beresiko bagi China untuk bertindak agresif terhadap India yang dimunculkan Vietnam sebagai aktor baru dalam sengketa wilayah Laut China Selatan. Adapun tujuan dari Vietnam melibatkan India dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan adalah sebagai langkah Vietnam untuk menggiring China mematuhi regulasi yang ada yaitu hukum laut internasional.

Strategi *enmeshment* juga dapat dipahami sebagai salah satu langkah yang mendasari Vietnam dalam mengajukan penawaran kerjasama eksplorasi minyak kepada India. Hadirnya India dalam konstelasi politik di kawasan Laut China Selatan diharapkan Vietnam untuk mampu melakukan perannya dalam menjaga stabilitas kawasan. Hal ini juga sesuai dengan kepentingan nasional India yang ingin berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas kawasan serta memperjuangkan perdamaian dalam kawasan Laut China Selatan seperti yang pernah dinyatakan oleh Jawaharlal Nehru. Hal ini kemudian diperkuat oleh pernyataan dari Perdana Menteri India, Manmohan Singh dalam *East Asia Summit* di Brunei Darussalam:

"Sebuah lingkungan maritim yang stabil sangat penting untuk mewujudkan aspirasi daerah kolektif kita. Kita harus menegaskan kembali prinsip-prinsip keamanan maritim, termasuk hak lintas perdagangan dan tanpa hambatan, sesuai dengan hukum internasional, dan penyelesaian damai sengketa maritim. Kami menyambut baik komitmen bersama oleh negara-negara yang bersangkutan untuk mematuhi dan melaksanakan Declaration on the Conduct of Parties tahun 2002 di Laut Cina Selatan dan bekerja menuju penerapan Kode Etik di Laut Cina Selatan atas dasar konsensus. Kami juga menyambut perluasan pembentukan ASEAN

Maritime Forum untuk mengembangkan norma-norma maritim yang akan memperkuat hukum internasional yang ada berkaitan dengan keamanan maritim (penekanan ditambahkan).”¹⁶⁷

4.2 Persetujuan India dalam penawaran kerjasama Eksplorasi Minyak di wilayah Vietnam

Kerjasama Eksplorasi minyak antara India dengan Vietnam merupakan salah satu kerjasama yang memiliki nilai strategis bagi India. Kerjasama ini dapat dikatakan memiliki nilai strategis karena melalui kerjasama ini India menyisipkan beberapa kepentingannya di dalam wilayah Laut China Selatan. Heterogenitas kepentingan nasional India di dalam wilayah Laut China Selatan terangkum dalam salah satu bingkai kerjasama dengan Vietnam yaitu kerjasama eksplorasi minyak.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa India merupakan salah satu negara dengan kebutuhan energi cukup besar sampai saat ini, bahkan hampir menyamai dependensi energi dari China. Masuknya esensi keamanan energi dalam kebijakan luar negeri India merupakan salah satu bukti bahwa India telah memberikan perhatian khusus terhadap sektor energi bagi pembangunan nasionalnya. Reputasi India sebagai negara “*emerging economy*” tentu memiliki ambisi untuk menyaingi kekuatan China dalam regional Laut China Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan pengaruhnya dalam kawasan tersebut. Jika India tidak mengambil langkah preventif untuk menanggulangi dominasi China dalam kawasan Laut China Selatan, maka konsekuensi logis yang akan ditanggung oleh India adalah semakin kuatnya dominasi China dalam kawasan tersebut. Semakin kuatnya dominasi China di Laut China Selatan tentunya dapat memberikan hambatan tersendiri bagi perekonomian India terutama akses perekonomian bagi perdagangan India di Laut China Selatan. Berikut adalah beberapa faktor yang mendasari proses terbentuknya kerjasama eksplorasi minyak India dengan Vietnam.

¹⁶⁷ Rajeev Ranjan Chaturvedy. *Op. Cit.* Hal. 6

4.2.1 Proses Implementasi Look East Policy.

Kerjasama bilateral yang dijalin antara India dengan Vietnam adalah respon India atas penawaran kerjasama yang ditawarkan oleh Vietnam. India menindaklanjuti penawaran tersebut dengan berusaha mengakomodir kepentingan Vietnam dalam mewujudkan hubungan yang semakin erat dengan India. Hal ini juga sesuai dengan Kebijakan LEP India yang menjadikan ASEAN sebagai inti dari kebijakan tersebut dimana Vietnam termasuk salah satu negara bagian dari ASEAN. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa kerjasama yang dijalin India dengan kawasan ini telah memberikan keuntungan yang lebih menjanjikan daripada kerjasama dengan negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat. Sangat beresiko bagi India apabila melepaskan kawasan ini sebagai poros kepentingan nasionalnya, khususnya Vietnam yang memiliki posisi strategis yang berdampak signifikan bagi perdagangan India.

Kerjasama yang berkelanjutan merupakan aspek yang berusaha dipertahankan oleh India dengan Vietnam untuk terus menjalin kerjasama di berbagai sektor. Kedua negara bahkan telah menyatakan untuk terus berusaha meningkatkan *mutual trust* serta meningkatkan kerjasama bilateral sesuai isu-isu yang berkembang dalam lingkup regional maupun internasional.¹⁶⁸ Hal ini dilakukan India sebagai upaya meningkatkan hubungan perdagangan yang telah lama dijalin dengan Vietnam.

Jalanan kerjasama yang masih dipertahankan antara India dengan Vietnam dapat dikatakan merupakan sublimasi dari konsepsi kerjasama internasional. Gagasan kerjasama internasional ini kemudian secara halus diwujudkan oleh India dengan Vietnam melalui kerjasama bilateral yang saling menguntungkan kedua pihak. Kerjasama bilateral India dengan Vietnam merupakan transaksi kepentingan yang

¹⁶⁸ Ministry of External Affairs Government of India . 2011 . *Joint Statement on the Occasion of the visit of the President of Vietnam*. Diakses dari <http://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5341/Joint+Statement+on+the+occasion+of+the+visit+of+the+President+of+Vietnam> [22 November 2014]

bermuara dalam MoU yang mereka ciptakan. Kedua negara sepakat untuk menciptakan MoU dalam eksplorasi minyak karena adanya persamaan kepentingan dan transaksi kerjasama yang saling menguntungkan. Faktor tersebut kemudian menjadikan MoU ini mudah untuk disetujui oleh kedua belah pihak tanpa ada benturan kepentingan dalam proses persetujuan MoU.

Robert Keohane dan Joseph Nye telah berpendapat bahwa ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi- institusi untuk memajukan kerjasama lintas batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya, institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama. Kerjasama India dengan Vietnam merupakan representasi dari interdependensi yang diwujudkan dalam serangkaian persetujuan. Serangkaian persetujuan tersebut adalah untuk memberikan efisiensi terhadap nilai dari kerjasama sehingga memberikan dampak pada tercapainya kepentingan masing-masing. Efisiensi dalam informasi juga diperlukan dalam wujud persetujuan tersebut sebagai akses untuk mengetahui aktivitas dan isu-isu yang perlu untuk dihadapi bersama.

Konsepsi Ekonomi Politik Internasional secara jelas mengungkapkan bahwa interrelasi antara pasar dan politik sangat berkaitan. Upaya kerjasama minyak India dengan Vietnam merupakan implementasi dari strategi ekonomi politik India dalam menjalin hubungan baik dengan pasar yaitu Asia Tenggara yang diwakili oleh Vietnam. Strategi ekonomi politik India tertuang secara jelas dalam kebijakan LEP yang menjadikan ASEAN sebagai poros dan inti dari kebijakan tersebut.

India berusaha mendapatkan kekayaan melalui interrelasi antara pasar dan politik tanpa melupakan kepentingan nasional yang menjadi tujuan dasar dalam berdiplomasi. Secara ekonomi politik, India berdiplomasi melalui kebijakan LEP untuk menjalin kekerabatan secara ekonomi maupun politik dengan Vietnam demi

kepentingan nasionalnya. Keterkaitan India dengan Vietnam kemudian dibuktikan oleh pernyataan Perdana Menteri Manmohan Singh yang menegaskan kembali arti penting dari Vietnam sebagai mitra strategis.

"Kami telah berusaha untuk membangun hubungan yang komprehensif dengan agenda berbasis kerjasama bilateral dan regional. Munculnya Vietnam sebagai salah satu negara perekonomian paling dinamis di kawasan Asia Pasifik sangat disambut baik oleh India, terutama karena kami menganggap Vietnam sebagai mitra strategis dan terpercaya serta istimewa dan salah satu pilar penting dari Look East Policy kami."¹⁶⁹

Robert Gilpin menyatakan dalam bukunya *Global Political Economy* bahwa negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti berkeinginan untuk memenuhi kepentingannya. Untuk mencapai hal tersebut maka negara dapat memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan pasar dan pengaruh.¹⁷⁰ Jika memandang persetujuan India dalam perspektif Gilpin tersebut, maka India dapat dikatakan berusaha memenuhi kepentingannya dengan meningkatkan pengaruhnya di kawasan Laut China Selatan. India berusaha meningkatkan pengaruhnya di kawasan Laut China Selatan dengan merangkul Vietnam sebagai mitra utama. Peningkatan pengaruh India di kawasan Laut China Selatan dirasakan oleh India menjadi begitu penting mengingat India memerlukan kondisi pasar yang berpihak terhadap kepentingannya secara ekonomi untuk memanipulasi kekuatan China di kawasan Laut China Selatan.

4.2.2 Upaya mengamankan Akses Energi di Laut China Selatan.

India merupakan salah satu negara dengan defisit energi yang cukup tinggi di dunia, hampir menyaingi defisit energi yang dialami oleh China. Defisit energi yang

¹⁶⁹ The New Indian Express. 2013. *India-Vietnam ink pact to expand oil exploration in South China Sea*. Diakses dari <http://www.newindianexpress.com/nation/India-Vietnam-ink-pact-to-expand-oil-exploration-in-South-China-Sea/2013/11/21/article1902209.ece> [1 April 2015]

¹⁷⁰ Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton: Princeton University Press. Hal. 78

melanda dua negara “*emerging economy*” ini kemudian menyebabkan kontestasi dalam dunia energi yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut cukup masuk akal mengingat untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi India dan China berada pada level tertinggi, mereka harus memberikan pasokan energi yang cukup untuk mendukung aktivitas perekonomian negaranya.

Paul D. Williams menjelaskan bahwa kompleksitas peradaban manusia akan menuntut manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka yang paling dasar yaitu energi. Dalam konteks kehidupan yang lebih modern kebutuhan akan energi lebih sering diidentikkan dengan kebutuhan penting yang sangat dibutuhkan dalam menunjang maksimalnya output yang akan dikeluarkan oleh industri-industri di sebuah negara. Output yang maksimal dari industri-industri tentunya akan membawa pendapatan yang tinggi bagi industri-industri sehingga dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat.¹⁷¹

India merupakan negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terlebih setelah adanya reformasi ekonomi dalam sistem perekonomian India sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II. Untuk menunjang perekonomiannya tetap berjalan pada level tertinggi, India memiliki kewajiban untuk dapat mencukupi kebutuhan energi warga negaranya. Hal tersebut diperlukan sebagai langkah India dalam memberikan jaminan ketersediaan energi yang cukup dan mudah diakses bagi warga negaranya.

Kesadaran pemerintah India akan pentingnya energi telah tertuang dalam tujuan kebijakannya di bidang energi. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa konsekuensi dari kurangnya stok energi akan dapat menghambat pembangunan ekonomi bagi India, sehingga prioritas utama pemerintahan India dalam jangka panjang adalah menyediakan akses energi bagi seluruh warga negara.¹⁷² Keseriusan

¹⁷¹ Paul D. Williams. *Op. Cit*

¹⁷² Sun-Joo Ahn & Dagmar Graczyk. *Op. Cit*. Hal. 16

pemerintah India dalam permasalahan energi ini dibuktikan dengan dibentuknya IEP maupun NELP yang menangani permasalahan energi India dari segi kebijakan.

Kerjasama eksplorasi minyak India dengan Vietnam merupakan salah satu kebijakan luar negeri India yang berada dalam kerangka kebijakan LEP maupun NELP. Jika diklasifikasikan lebih spesifik, maka kebijakan LEP dalam kerjasama eksplorasi minyak ini akan merepresentasikan esensi komersial yang dilakukan India di wilayah Vietnam, sedangkan kebijakan NELP mewadahi kebijakan India dalam permasalahan eksplorasi energi hidrokarbon yang juga dilakukan dalam wilayah Vietnam.

4.2.3 Memperjuangkan Kebebasan Navigasi di Laut China Selatan.

Laut China Selatan merupakan kawasan strategis yang mewakili kepentingan geopolitik berbagai negara, termasuk India. India menjadikan Laut China Selatan sebagai kawasan strategis dalam kawasan Asia Tengah karena Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan yang cukup vital bagi India. Tercatat bahwa 92-95 persen total perdagangan India yang melewati Samudera Hindia, terdapat 25 persen transaksi perdagangan yang melewati jalur perdagangan Laut China Selatan.¹⁷³ Inilah yang kemudian menjadikan Laut China Selatan menjadi wilayah yang cukup vital bagi perekonomian India.

Jika memperhatikan ambisi China pada kawasan ini, maka wajar apabila India memiliki kekhawatiran terhadap ambisi China tersebut. India merupakan salah satu pengguna jalur perdagangan Laut China Selatan yang tidak menginginkan China untuk menguasai kawasan tersebut. India khawatir bahwa jika China menguasai jalur perdagangan tersebut maka China akan leluasa untuk mengendalikan lalu lintas perdagangan dalam kawasan ini.¹⁷⁴ China akan memiliki senjata geopolitik (*geopolitical weapon*) yang sangat menentukan stabilitas perdagangan banyak negara,

¹⁷³ Munmun Majumdar. *Op. Cit.* Hal. 243

¹⁷⁴ Munmun Majumdar. *Op. Cit.* Hal. 243

terutama India, apabila China berhasil menguasai kawasan Laut China Selatan. India tentunya tidak akan senang ketika China berhasil mengakuisisi senjata geopolitik ini, kepemilikan atas Laut China Selatan dapat merugikan India dalam sektor ekonomi terlebih jika mencermati hilir-mudik kapal-kapal India dalam kawasan ini ataupun potensi energi yang terdapat dalam kawasan ini.

Kepentingan nasional India dalam wilayah Laut China Selatan merupakan kepentingan yang sepenuhnya berada pada aksesibilitasnya di bidang perekonomian serta energi. Salah satu upaya India memaksimalkan kepentingan nasionalnya adalah dengan memaksimalkan letak geografis dari Laut China Selatan. Melalui letak geografis, India dapat mengakumulasi kekuatannya secara ekonomi maupun politik untuk dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan geopolitik India tersebut kemudian terwujud dalam kerjasama eksplorasi minyak antara India dengan Vietnam dalam blok 128. India berupaya mengakumulasi kekuatan politiknya dengan letak geografis Vietnam yang berada di wilayah Laut China Selatan sebagai jalan untuk mengimplementasikan LEP.

Kebijakan yang membawa India pada kerjasama eksplorasi minyak dengan Vietnam merupakan upaya kongkrit yang dilakukan oleh India dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya secara geopolitik. Walaupun mendapat protes keras dari China terkait aktivitas eksplorasinya dengan Vietnam dalam kawasan yang diklaim oleh China, India tetap mempertahankan keberadaannya dalam kawasan tersebut. Upaya India mempertahankan keberadaannya dalam wilayah Laut China Selatan terlihat dalam kebijakannya mempertahankan blok 128 yang pada tahun 2012 sempat dikembalikan oleh India kepada Vietnam, namun atas pertimbangan geopolitik India kemudian bersedia untuk mengelola kembali blok tersebut.¹⁷⁵ Kebijakan ini merupakan langkah India dalam menerapkan *soft balancing* kepada China dengan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Vietnam.

¹⁷⁵ David Scott. 2013. India' Role in the South China Sea: Geopolitics and geoeconomics in play. *India Review*. 12:2, 51-69. Hal. 65.

Persetujuan India terhadap penawaran kerjasama yang ditawarkan oleh Vietnam sangat jelas terdapat kepentingan politik yang memotivasi persetujuan tersebut. Hal ini terlihat dalam persetujuan India yang telah mengetahui bahwa sebenarnya dalam blok 128 tidak terdapat cukup energi yang menguntungkan India, namun India tetap mempertahankan kawasan tersebut. India berdalih bahwa aktivitasnya bersama Vietnam merupakan aktivitas yang bersifat komersil dan tidak bermaksud mengganggu kedaulatan dari China.¹⁷⁶

Berdasarkan Ensiklopedia Brittanica, Geopolitik merupakan analisa pengaruh geografis terhadap hubungan kekuatan dalam hubungan internasional.¹⁷⁷ Permasalahan sengketa di Laut China Selatan adalah salah satu fenomena yang dapat menjelaskan pengaruh kekuatan dalam kawasan tersebut. Definisi kekuatan memiliki berbagai Indikator bagi sebuah negara, baik kekuatan secara ekonomi, politik maupun militer. Konflik yang terjalin antara India, Vietnam dengan China adalah konflik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan masing-masing negara. Vietnam yang dalam hal ini memiliki kapabilitas secara ekonomi tidak sebanding dengan China tentunya tidak akan cukup mampu untuk mengimbangi China untuk dapat menyelesaikan permasalahan. India menjalin kerjasama dengan Vietnam melalui kerjasama minyak adalah salah satu langkah yang dilakukan India dengan memanfaatkan kekuatan ekonominya yang mengacu pada kebijakan LEP. Oleh karena itu, dengan hadirnya India yang diundang oleh Vietnam maka pemetaan kekuatan dalam ranah sengketa di wilayah Laut China Selatan akan lebih merata.

Geopolitik merupakan pertempuran antara ruang dan kekuatan yang dimainkan dalam letak geografis yang didalamnya mencakup geopolitik militer, diplomasi geopolitik, dan juga geopolitik energi. Menurut Robert D. Kaplan, saat ini tatatan internasional dalam peradaban yang lebih modern sangat ditentukan oleh sumber

¹⁷⁶ Harsh V. Pant. *China. Op. Cit.*

¹⁷⁷ Encyclopedia Brittanica. *Op. Cit*

daya energi.¹⁷⁸ Permasalahan yang terjadi dalam kerjasama India dengan Vietnam merupakan salah permasalahan yang dapat dipahami dengan konsep geopolitik. India dengan China berusaha memainkan ruang dan kekuatan mereka dengan menggunakan sarana geografis yang mendukung kepentingan mereka masing-masing. Ruang yang dimaksud adalah sengketa eksplorasi minyak ini adalah Laut China Selatan, tepatnya dalam ZEE Vietnam, sedangkan kekuatan yang dimaksud adalah penggunaan kekuatan dari masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan geopolitiknya. Perlawanan geopolitik India secara resmi dapat dilihat dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri India yang telah menyatakan sikap atas upaya China menguasai Laut China Selatan.

"Kami telah mengikuti perkembangan terakhir di Laut Cina Selatan. Kami percaya bahwa pemeliharaan perdamaian, stabilitas, pertumbuhan dan kemakmuran di kawasan itu adalah kepentingan vital bagi masyarakat internasional. Kami ingin melihat penyelesaian masalah melalui damai yang berarti sesuai dengan prinsip yang diakui secara universal oleh hukum internasional. dalam konteks ini, kami juga mempertahankan bahwa kebebasan navigasi di laut Cina Selatan tidak boleh dihalangi dan panggilan untuk kerjasama dalam menjamin keamanan jalur laut dan penguatan keamanan maritim."¹⁷⁹

India memiliki kepentingan geopolitik dalam wilayah ZEE Vietnam sebagai jalan untuk membuka kebebasan navigasi mereka dalam kawasan Laut China Selatan. Hal tersebut dilakukan India untuk mengantisipasi agar hegemoni yang diinginkan China dalam kawasan Laut China Selatan tidak kemudian mempengaruhi jalur perdagangan mereka yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomiannya. Sedangkan China memiliki kepentingan geopolitik di kawasan Laut China Selatan sebagai upaya untuk mengamankan deposit energi dalam kawasan ini. China kemudian menolak kerjasama India dengan Vietnam dengan berusaha membuka

¹⁷⁸ Robert D. Kaplan. 2014. *The Geopolitics of energy*. Diakses dari <http://www.forbes.com/sites/stratfor/2014/04/04/the-geopolitics-of-energy/> [13 Agustus 2014]

¹⁷⁹ Ministry of External Affairs, Government of India. 2011. *Incident involving INS Airavat in South China Sea*. Diakses dari <http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/3040/Incident+involving+INS+Airavat+in+South+China+Sea> [4 April 2015]

sembilan blok minyak dalam kawasan kerjasama yang sedang dieksplorasi oleh India. Inilah yang kemudian menjelaskan bagaimana kepentingan antara ketiga negara saling berbenturan hanya untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing.

4.3 Prospek Kerjasama Eksplorasi Minyak India-Vietnam di Laut China Selatan dalam fungsinya sebagai resistensi atas klaim China di Laut China Selatan.

Kepentingan India dalam wilayah Laut China Selatan merupakan kepentingan yang sepenuhnya terletak dalam keamanan maritim, keselamatan negara serta kebebasan dalam hak-hak tiap negara untuk mengakses sumber daya di Laut Timur (Termasuk Laut China Selatan) sesuai dengan hukum internasional. India juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Vietnam dalam permasalahan minyak dan gas dan menyerukan pihak terkait untuk menghormati prinsip-prinsip hukum internasional.¹⁸⁰ Oleh karena itulah, maka Kerjasama yang dijalin India dengan Vietnam bukanlah kerjasama yang dijalin untuk jangka waktu yang singkat, melainkan kerjasama yang dipersiapkan untuk jangka waktu yang panjang.

Perjalanan kerjasama India dengan Vietnam dapat dikatakan merupakan jejak rekam kerjasama yang memiliki unsur dialogis dalam pembentukannya. Sebelum kerjasama eksplorasi minyak antara India dengan Vietnam menjadi polemik bagi China pada tahun 2011, India dengan Vietnam telah terlebih dahulu menjalin kemitraan strategis yang dijalin pada 2007 hingga kemudian bermuara pada MoU tahun 2011 dan tahun 2013. Pasca kemitraan strategis yang dijalin pada 2007, kerjasama yang dijalin India dengan Vietnam secara substantif memiliki tujuan dalam berbagai sektor yang salah satunya memiliki fokus dalam kerjasama eksplorasi minyak. India berusaha mempertahankan kehadirannya dalam wilayah Laut China

¹⁸⁰ Vietnam Embassy. 2015. *Prime Minister India visit to improve strategic partnership*. Diakses dari http://www.vietnamembassy-denmark.vn/en/nr070521165843/nr070521170351/news_object_view?newsPath=/vnemb.vn/tin_hd dn/ns141027154447 [12 Januari 2015]

Selatan melalui kerjasama eksplorasi minyak dengan Vietnam yang diteken India pada tahun 2011.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, Kerjasama Internasional merupakan Persetujuan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih adalah dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.¹⁸¹ India dengan Vietnam merupakan representasi dari kerjasama internasional secara bilateral. India dengan Vietnam menghadapi isu yang sama secara regional, khususnya dalam menangani pengaruh China dalam kawasan Laut China Selatan. Persamaan kepentingan tersebut kemudian diwujudkan melalui kerjasama eksplorasi minyak yang tercantum dalam MoU pada tahun 2011 serta kemudian disusul oleh MoU tahun 2013. Komitmen Vietnam untuk menjaga peran India dalam kawasan Laut China Selatan terlihat dalam MoU yang dijalin kedua negara pada tahun 2013. Vietnam menginginkan India untuk tetap memainkan perannya dalam kawasan Laut China Selatan dengan menawarkan beberapa blok minyak yang berada dalam wilayah Vietnam. Hal ini kemudian dikuatkan oleh pernyataan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung:

"India sangat menghargai peran aktif Vietnam dan kontribusinya di ASEAN dan di wilayah tersebut. Vietnam menegaskan kembali dukungannya terhadap Kebijakan Melihat ke Timur India menuju Asia Tenggara serta peran India yang semakin penting di kawasan tersebut dan dunia pada umumnya."¹⁸²

¹⁸¹ Kalevi Jaakko Holsti. 1988. *Politik Internasional. Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*. Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga. Hal. 652-653

¹⁸² Ministry of External Affairs Government of India. 2014. *Media Statements by Prime Minister of India and Prime Minister of Vietnam in New Delhi* Diakses dari <http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/24143/Media+Statements+by+Prime+Minister+of+India+and+Prime+Minister+of+Vietnam+in+New+Delhi+October+28+2014> [12 Januari 2015]

Kerjasama India dengan Vietnam adalah kerjasama yang dapat dikatakan sebagai kerjasama yang prospektif mengingat kedua negara ini memiliki jejak rekam kerjasama yang baik. Kerjasama India dengan Vietnam dikatakan prospektif mengingat kedua belah pihak memiliki kesamaan kepentingan serta kesamaan ancaman yang mendasari kerjasama mereka. Penawaran tujuh blok minyak baru dari Vietnam kepada India merupakan bukti konkrit bahwa Vietnam menginginkan keterlibatan India dalam permasalahan eksplorasi minyak. Untuk meyakinkan keseriusan Vietnam terhadap India dalam kerjasama di bidang energi, Vietnam bahkan menawarkan India untuk terlibat dalam eksplorasi blok minyak dari Vietnam yang berada di luar kawasan Vietnam. Keterlibatan India dalam eksplorasi minyak di kawasan Vietnam tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi India, terlebih dalam menanggulangi keterbatasan energi yang dialami oleh India.

4.4 Sikap Politik China atas kerjasama India-Vietnam.

China merupakan negara yang memiliki ambisi untuk dapat menguasai Laut China Selatan dan berbagai sumber daya alam di dalamnya. Ambisi China sangat berdasar mengingat China merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat progresif. Konsekuensi dari progresivitas perekonomian China tersebut tentu saja membawa konsekuensi kepada China untuk dapat mencukupi kebutuhan energi domestiknya. Hal tersebut mutlak diperlukan China untuk dapat menjamin legitimasi politik serta stabilitas sosial dari masyarakatnya. Untuk dapat memenuhi eskpektasi tersebut China harus dapat menjaga pertumbuhan PDB pada level 8% serta menjaga level inflasi dibawah 5%.¹⁸³.

Ambisi China kemudian melahirkan berbagai protes dari banyak negara terutama di sekitar wilayah Laut China Selatan yang merasa dirugikan atas klaim China di Laut China Selatan yang merupakan perwujudan ambisi dari China.

¹⁸³ Sigfrido Burgos Caceres. 2014. *China's Strategic Interest in The South China Sea*. New York: Routledge. Hal. 45

Momentum ini pun dimanfaatkan dengan baik oleh India sebagai salah satu negara yang memiliki kepentingan dalam kawasan Laut China Selatan, terlebih ketika momentum itu datang dari penawaran kerjasama yang ditawarkan oleh Vietnam. Berdasarkan atas persamaan kepentingan di Laut China Selatan dengan Vietnam, India kemudian menyetujui proposal kerjasama tersebut yang kemudian melahirkan protes dari China. Letak Vietnam yang berada di tepi Asia Tenggara menjadikan negara ini sebagai salah satu aset berharga bagi India untuk menyeimbangkan pengaruh China di kawasan Laut China Selatan.

Kerjasama eksplorasi minyak India dengan Vietnam dianggap oleh China merupakan provokasi politik yang dapat melahirkan segala upaya pragmatis yang dilakukan China untuk dapat menghentikan kerjasama kedua negara tersebut.¹⁸⁴ China sempat mengajukan *demarche* kepada India atas kerjasama yang mereka lakukan yang dianggap melanggar kedaulatan dari China, namun India tetap menjalankan aktivitasnya di Laut China Selatan. Menteri Luar Negeri India berpendapat bahwa kerjasamanya di Vietnam telah memiliki legalitas yang sah menurut hukum internasional

*"China memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi kita akan tetap dengan apa yang pemerintah Vietnam telah katakan kepada kami, dan telah menyampaikan hal ini kepada China."*¹⁸⁵

Setelah pengajuan *demarche* atas kerjasama eksplorasi minyak India dengan Vietnam yang kemudian diabaikan oleh India, China terus memperingatkan India agar tidak turut campur dalam permasalahan di Laut China Selatan. China bahkan mengancam bahwa jika kerjasama India dengan Vietnam tetap dilakukan, maka China akan mengirim pasukan non-militer yang akan mengganggu aktivitas mereka di

¹⁸⁴ Ananth Khrisnan. 2011. *South China Sea Project a "Serious Political Provocation," Chinese Paper Warns India*. Diakses dari <http://www.thehindu.com/news/international/south-china-sea-project-a-serious-political-provocation-chinese-paper-warns-india/article2459736.ece> [14 Januari 2015]

¹⁸⁵ 2 Point 6 Billion. 2011. *Beijing Demands India and Vietnam Stop Oil Joint Venture in South China Sea*. Diakses dari <http://www.2point6billion.com/news/2011/09/16/beijing-demands-india-and-vietnam-stop-oil-joint-venture-in-south-china-sea-10165.html> [11 Januari 2015]

Laut China Selatan.¹⁸⁶ Mengingat pentingnya sirkulasi perdagangan dalam Laut China Selatan bagi China serta India, segala konflik yang terjadi akan merugikan bagi kedua negara.

Sikap politik China terhadap kerjasama India dengan Vietnam juga terkesan ragu-ragu dalam melawan agresivitas India dalam mengembangkan kerjasama dengan Vietnam. Hal ini terlihat dari berbagai pernyataan resmi dari pemerintah China yang tidak menginginkan adanya keterlibatan negara-negara lain dalam sengketa Laut China Selatan, namun China tidak berani menyebutkan India sebagai negara-negara yang terlibat sengketa. Berikut adalah pernyataan Jiang Yu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China:

"Posisi kami yang konsisten adalah bahwa kami menentang negara manapun yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas di perairan di bawah yurisdiksi China. Untuk negara-negara di luar regional tersebut, kami berharap mereka akan menghormati dan mendukung negara-negara di kawasan itu untuk memecahkan sengketa ini melalui pembicaraan secara bilateral."¹⁸⁷

"China menentang pengembangan minyak dan gas secara sepihak di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Kami berharap bahwa negara-negara yang bersangkutan menghormati posisi dan hak-hak Cina, dan upaya penghormatan dilakukan melalui perundingan bilateral untuk menyelesaikan sengketa."¹⁸⁸

Dari pernyataan Juru Bicara Kemeterian Luar Negeri China tersebut, terlihat bahwa China belum cukup berani untuk secara terang-terangan terprovokasi oleh Kerjasama India dengan Vietnam hingga kemudian menuduh India terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. China memang menentang keras terkait adanya campur

¹⁸⁶ Global Times. 2011. *India-Vietnam Joint work must be halted*. Diakses dari <http://www.globaltimes.cn/content/679263.shtml> [12 Januari 2015]

¹⁸⁷ Ananth Khrisnan. *Op. Cit.*

¹⁸⁸ Zachary Keck. 2012. *India's South China Sea Gambit*. Diakses dari <http://thediplomat.com/2012/12/indias-south-china-sea-gambit/> [13 Januari 2015]

tangan India dalam permasalahan sengketa Laut China Selatan, namun sampai saat ini pertentangan keras dari China tersebut hanya terhenti pada pernyataan semata. China justru bereaksi atas kerjasama Vietnam dengan India dengan membuka sembilan blok minyak baru yang berada dalam wilayah ZEE Vietnam. Jika dianalogikan, maka kasus pembukaan sembilan blok minyak China dalam wilayah ZEE Vietnam sama dengan publikasi “*The nine-dashed line*” milik China secara resmi kepada publik pada tahun 1936. Jika masuknya India ke dalam wilayah Laut China Selatan merupakan fenomena “memancing di air keruh”, maka pembukaan Sembilan blok minyak China dalam kawasan ZEE Vietnam adalah fenomena yang sama dengan masuknya India dalam kawasan Laut China Selatan.

Bagi China, melawan India tentunya sangat riskan jika merujuk pada perspektif China yang menganggap India sebagai kekuatan besar baru yang harus dirangkul demi kepentingan strategis China. Melawan India bagi China, sama saja dengan merusak tatanan kebijakan *positive engagement*¹⁸⁹ yang telah dibuat oleh China. Rusaknya kebijakan ini tentunya akan berdampak pada persepsi China yang pada awalnya memandang India sebagai negara besar yang dapat menjadi mitranya dalam mewujudkan kepentingan strategis China.

¹⁸⁹ Kebijakan Positive engagement China merupakan kebijakan yang menjadikan India sebagai mitra strategis dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, lingkungan, dan kebudayaan. Lihat dalam Byung Kwang Park. 2013. *China Perceptions and Policies Toward India*. East Asia Institute. Issue Briefing Middle Power Initiative 2013-01. Hal. 3.

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian dari penulis pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa klaim China terhadap Laut China Selatan telah memicu reaksi khususnya dari India dan Vietnam untuk menjalin kerjasama eksplorasi minyak. Jalinan kerjasama India dan Vietnam ini dapat disimpulkan sebagai upaya penolakan atau resistensi atas klaim China tersebut. Bentuk resistensi India adalah memperkuat blok 128 dengan cara memperpanjang masa eksplorasinya yang telah disepakati oleh Vietnam sehingga China tidak melakukan eksplorasi minyak dalam blok tersebut yang berada dalam kawasan Laut China selatan. Kerjasama eksplorasi minyak antara India dengan Vietnam merupakan upaya resistensi yang dilakukan kedua negara tersebut dalam membendung ambisi China menguasai kawasan Laut China Selatan. Upaya tersebut dilakukan India dan Vietnam dengan semakin mempererat kerjasama terutama di bidang eksplorasi minyak yang bersentuhan langsung dengan kawasan Laut China Selatan.

India menyetujui kerjasama dengan Vietnam sebagai langkah untuk melindungi aset-aset dari India di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam. Upaya India mempertahankan keberadaannya dalam wilayah Laut China Selatan terlihat dalam kebijakannya mempertahankan blok 128 yang pada tahun 2012 sempat dikembalikan oleh India kepada Vietnam, namun atas pertimbangan geopolitik India kemudian bersedia untuk mengelola kembali blok tersebut. Kebijakan ini merupakan langkah India dalam menerapkan *soft balancing* kepada China dengan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Vietnam.

Persetujuan India atas tawaran kerjasama dari Vietnam juga merupakan salah satu kebijakan yang selaras dengan kebijakan luar negeri India yang termaktub dalam *Look East Policy* (LEP) India. Persetujuan India dalam kerjasama eksplorasi minyak dengan Vietnam di Laut China Selatan juga dapat dipahami sebagai langkah India

yang ingin mempererat hubungan di wilayah Asia Timur baik secara ekonomi maupun politik. India menindaklanjuti penawaran tersebut dengan berusaha mengakomodir kepentingan Vietnam dalam mewujudkan hubungan yang semakin erat dengan India. Hal ini juga sesuai dengan Kebijakan *Look East Policy* (LEP) India yang menjadikan ASEAN sebagai inti dari kebijakan tersebut dimana Vietnam termasuk salah satu negara bagian dari ASEAN.

India melakukan eksplorasi dalam wilayah yang ditawarkan oleh Vietnam juga sebagai upaya untuk menjamin keamanan energinya.. Untuk menunjang perekonomiannya tetap berjalan pada level tertinggi, India memiliki kewajiban untuk dapat mencukupi kebutuhan energi warga negaranya. Kesadaran pemerintah India sendiri akan pentingnya energi telah tertuang dalam tujuan kebijakannya di bidang energi. Keseriusan pemerintah India dalam permasalahan energi ini telah dibuktikan dengan dibentuknya *Integrated Energy Policy* (IEP) maupun *New Exploration Licensing Project* (NELP) yang menangani permasalahan energi India dari segi kebijakan.

Kerjasama India dengan Vietnam dari segi geopolitik juga dapat dipahami sebagai upaya India dalam memberikan perlawanan kepada China. Hal ini dilakukan agar tidak mengancam kebebasan navigasi India di Laut China Selatan yang dapat berdampak bagi jalur perdagangan India. Kepentingan geopolitik India tersebut kemudian terwujud dalam kerjasama eksplorasi minyak antara India dengan Vietnam dalam blok 128. India berupaya mengakumulasi kekuatan politiknya dengan letak geografis Vietnam yang berada di wilayah Laut China Selatan juga sebagai jalan untuk mengimplementasikan *Look East Policy* (LEP). Kebijakan yang membawa India pada kerjasama eksplorasi minyak dengan Vietnam merupakan upaya kongkrit yang dilakukan oleh India dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya secara geopolitik.

Prospek India dalam meraih akses keamanan energi dengan menjalin kemitraan bersama Vietnam dapat dikatakan cukup prospektif mengingat Vietnam cenderung memiliki dependensi yang tinggi terhadap India. Dependensi Vietnam tersebut terbukti dari adanya tawaran yang dilakukan Vietnam kepada India dengan menawarkan tujuh blok yang dimiliki oleh Vietnam baik blok minyak dalam negeri maupun luar negeri. India sendiri telah mengambil keputusan untuk meneliti lebih lanjut blok-blok minyak yang ditawarkan oleh Vietnam, Hal tersebut dilakukan India untuk menanggulangi ketiadaan sumber daya minyak seperti yang telah terjadi pada blok 127.

India sendiri merupakan negara yang tidak lepas dari kekhawatiran dalam memandang agresivitas China di Laut China Selatan. India khawatir bahwa jika kontrol dari Laut China Selatan sepenuhnya dipegang oleh China maka dapat mengganggu lalu lintas perdagangannya di kawasan ini. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan India dengan Vietnam merupakan langkah yang ditempuh India untuk memperjuangkan kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahn, S, J. & Graczyk, D. 2012. *Understanding Energy Challenges*. France: International Energy Agency.
- Bava, U. S. 2007. *New Powers for Global Change? India's Role in the Emerging World Order*. New Delhi: Friedrich Ebert Stiftung.
- Burchill, S. & Linklater, A. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Terjemahan oleh M. Sobirin. 1996. Bandung: Nusa Media.
- Caceres S. B. 2014. *China's Strategic Interest in The South China Sea*. New York: Routledge.
- Center for Strategic & International Studies. (Tanpa Tahun). *Asean and The South China Sea: A Security Framework Under Siege*. Washington DC: Center for Strategic & International Studies.
- Hara, A. E. 2011. *Pengantar Analisa Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.
- Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton: Princeton University Press.
- Goh, E. 2005. *Meeting The China Challenge: The U.S in Southeast Asian Regional Security Strategies*. Washington: East West Center
- Hiscock, G. 2012. *Earth Wars: The Battle for Global Resources*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- Holsti, K. J. 1988. *Politik Internasional. Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*. Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Instituto Brasileiro de Geografia. 2010. *Joint Statistical Publications by BRIC Countries. Brazil, Russia, China, India*. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia.

- Irawan, A. 2012. *Penakluk Badai (Novel Biografi KH. Hasyim Asy'ari)*. Depok: Global Media Utama.
- Jackson, R. & Sorensen, G. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono, K. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Khambatta, P. & Inderfurth, K. F. 2013. *The Emerging Indian Economy*. Washington: Center for Strategic & International Studies.
- Kumar, D. 2012. *Securing India's Energy Future*. Australia Defence College: Vice Chief of The Defence Force.
- Lindert., Peter H., Charles P., dan Kindleberger. 1993. *Ekonomi Internasional: Edisi Kedelapan*. Terjemahan Burhanuddin Abdullah. Erlangga: Jakarta.
- Marin, D. C. 2010. *The Strategies of BRICS' National Oil Companies for Energy Security: Joint Ventures Bargaining and Vertical Integration*. Paris: Paris Dauphine University.
- Mas' oed, M. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mas' oed, M. 2003. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Mc.Clelland, C. A. 1986. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Jakarta: CV. Rajawali,
- Ministry of External Affairs Government of India. 1992. *Annual Report 1991-92*. New Delhi: Ministry of External Affairs.
- Ministry of Power. (Tanpa Tahun). *The Action Plan for energy Efficiency*. Bureau of Energy Efficiency: Ministry of Power, Government of India.
- Oatley, T. 2004. *International Political Economy: Interest and Institution in The Global Economy*. London: Longman.
- Organization of the Petroleum Exporting Countries. 2014. *World Oil Outlook 2014*. Vienna: Organization of the Petroleum Exporting Countries.

- Panda J. P. 2013. *BRICS and The China-India Construct: A New World Order in Making*. New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses.
- Plano, J. C. 1992. *The International Relation Dictionary*. Santa Barbara: California Press.
- Pontoh, H. C. 2014. “Tantangan Jokowi dalam Realisasi Kebijakan Ekonominya”. Dalam Coen Husain Pontoh. *Membedah Tantangan Jokowi-JK*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri
- Rogers, W. 2013. *Finding Common Ground: Energy, Security, and Cooperation in the South China Sea*: Center For A New American Security
- Seppala, T. 2010. *Globalizing Resistance against War ? A Critical Analysis of the Theoretical Debate through a Case Study of the New Anti-War Movement in Britain*. Rovaniemi: Lapland University Press.
- Sikri, R. 2009. *Challenge and Strategy (Rethinking India’s Foreign Policy)*. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd.
- Singh, Y. 2007. *India-Vietnam Relations The Road Ahead*. India. Institute of Peace and Conflict Studies.
- United States Geological Survey. 2012. *An Estimate of Undiscovered Conventional Oil and Gas Resources of the World*. U.S Geological Survey.
- Williams, P. D. 2008. *Security Studies An Introduction*. London. Routledge.

JURNAL

- Hagan, C. B. Geopolitics. *The Journal of Politics*: Vol. 4. No. 4. 1942.
- Majumdar, M. 2013. India Stake’s in the South China Sea. *International. Journal of Humanities and Social Science.*, 2 (1): Vol. 3 No. 13

INTERNET

- 2 Point 6 billion. 2011. *Beijing Demands India and Vietnam Stop Oil Joint Venture in South China Sea*. Diakses dari

<http://www.2point6billion.com/news/2011/09/16/beijing-demands-india-and-vietnam-stop-oil-joint-venture-in-south-china-sea-10165.html> [11 Januari 2015]

American Shale Oil Corp. (Tanpa Tahun). *Oil Shale Extraction Methods*. Diakses dari <http://amso.net/about-oil-shale/oil-shale-extraction-methods/> [17 Desember 2014]

Astalavista. 2012. *Vietnam Energy Report*. Diakses dari <http://www.endofcrudeoil.com/2012/06/vietnam-energy-report.html> [16 Mei 2014]

British Petroleum. 2014. *BP Statistical Review of World Energy June 2014*. Diakses dari <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf> [23 September 2014]

Bertelsmann Stiftung. 2014. *Vietnam Country Report*. Diakses dari http://www.bti-project.de/uploads/tx_itao_download/BTI_2014_Vietnam.pdf [23 Agustus 2014]

Business Maps of India. 2012. *Economic Developmet of India*. <http://business.mapsofindia.com/india-economy/ecodevelopment.html> [12 September 2014]

Chakravorty, PK. 2013. *China's Assertiveness in South China Sea: Vietnam's Response and Implications for India*. <http://www.vifindia.org/article/2013/november/19/china-s-assertiveness-in-south-china-sea-vietnam-s-response-and-implications-for-india> [22 Maret 2014]

Chakravorty, PK. 2012. *Dispute in South China Sea*. Diakses dari <http://www.indiandefencereview.com/news/disputes-in-the-south-china-sea/> [30 September 2014]

Chand, M. 2014. *India & Vietnam: Old Friends, New Vistas*. Diakses dari <http://www.mea.gov.in/in-focus-article.htm?23947/India+amp+Vietnam+Old+Friends+New+Vistas> [16 November 2014]

China Daily. 2012. *China Launches electronic passport*. Diakses dari http://usa.chinadaily.com.cn/china/2012-05/15/content_15301461.htm [8 Desember 2015]

- Das, R. N. 2013. *India in the South China Sea: Commercial Motives, Strategic Implications*. Diakses dari [http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews\[tt_news\]=41473&tx_ttnews\[backPid\]=688&no_cache=1#.VAv9DqPVtH0](http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews[tt_news]=41473&tx_ttnews[backPid]=688&no_cache=1#.VAv9DqPVtH0) [24 September 2014]
- Dikshit, S. 2013. *India Offers Vietnam seven oil blocks in south china sea*. www.thehindu.com/news/national/vietnam-offers-india-seven-oil-blocks-in-south-china-sea/article5372744.ece [14 Agustus 2014]
- DNA India. 2013. *India-Vietnam ink pact to expand oil exploration in South China Sea*. <http://www.dnaindia.com/india/report-india-vietnam-ink-pact-to-expand-oil-exploration-in-south-china-sea-1922248> [24 Maret 2014]
- DNA India. 2014. *India, Vietnam to sign deal for oil exploration in South China Sea despite protest by China*. Diakses dari <http://www.dnaindia.com/india/report-india-vietnam-to-sign-deal-for-oil-exploration-in-south-china-sea-despite-protest-by-china-2029677> [14 Desember 2014]
- Durns, S. 2014. *5 energy problems confronting India*. Diakses dari <http://globalriskinsights.com/2014/03/20/5-energy-problems-confronting-india/> [17 September 2014]
- Ebinger, C. K. 2011. *Securing the Future*. Diakses dari <http://www.financialexpress.com/news/securing-the-future/854712/0> [18 November 2014]
- Economic Times. 2013. *ONGC Videsh Ltd eyes Chevron's gas block in Vietnam*. Diakses dari http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-11-25/news/44413333_1_gas-block-chevron-ongc-videsh-ltd [1 Desember 2014]
- Energy Information Administration. 2012. *Country Analysis Note*. Diakses dari <http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=VM> [16 September 2014]
- Energy Information Administration. 2013. *Country Analysis Note* diakses dari <http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=VM> [14 April 2014]
- Energy Information Administration. 2013. *The South China Sea is a critical world trade route and a potential source of hydrocarbons, particularly natural gas, with competing claims of ownership over the sea and its resources* diakses dari <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS> [29 September 2014]

- Energy Information Administration. 2014. *Country Analysis Brief Overview*. diakses dari <http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=in> [16 September 2014]
- Encyclopedia Britannica. 2010. *Geopolitics*. Diakses dari *Encyclopædia Britannica Online*. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/229932/geopolitics> [13 Agustus 2014]
- Expose India Live. 2012. *OVL acquired Block 6.1 in Vietnam offshore : R.P.N. Singh*. Diakses dari <http://exposeindialive.com/eil/?p=20114> [11 April 2014]
- Global Times. 2011. *India-Vietnam Joint work must be halted*. Diakses dari <http://www.globaltimes.cn/content/679263.shtml> [12 Januari 2015]
- Government of India, 2006. *Integrated Energy Policy: Report of the Expert Committee*. Diakses dari http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_intengy.pdf [25 November 2014]
- Hidayat, Rahmat. (Tanpa Tahun). *Serpih Minyak Menuju Sumber Energi Global*. Diakses dari http://geomagz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=379:serpih-minyak-menuju-sumber-energi-global&catid=81:artikel-geologi-populer&Itemid=457 [15 Desember 2014]
- Hindustan Times. 2013. *India Approves policy for oil shale gas and oil exploration*. Diakses dari <http://www.hindustantimes.com/india-news/newdelhi/india-approves-policy-for-shale-gas-and-oil-exploration/article1-1126658.aspx> [15 Desember 2014]
- Hunt, L. 2014. *Indian Trade seen Booming with ASEAN*. <http://thediplomat.com/2014/08/indian-trade-seen-booming-with-asean/> [15 September 2014]
- India Energy Sector. (Tanpa Tahun). *NELP-New Exploration Licensing Policy*. Diakses dari <http://www.indianenergysector.com/oil-gas/nelp-new-exploration-licensing-policy> [16 Desember 2015]
- Infraline. (Tanpa Tahun). *ONGC Videsh Limited's activities in Sakhalin (Asia Pacific)*. Diakses dari <http://www.infraline.com/ong/players/ovl/Sakhalin.aspx> [2 Desember 2014]

- Jayaswal, Rajeev. 2013. *Cabinet's new policy: Only ONGC and OIL are eligible for shale oil and gas exploration.* Diakses dari http://articles.economicstimes.indiatimes.com/2013-09-25/news/42362315_1_shale-recourses-conventional-oil-and-gas-gas-exploration [16 Desember 2014]
- Jenny, Nicolas. 2014. *Forget Oil and Gas, the South China Sea Just Got More Complicated.* <http://www.internationalpolicydigest.org/2014/03/18/forget-oil-gas-south-china-sea-just-got-more-complicated/> [14 Agustus 2014]
- Kaplan, R D. 2014. *The Geopolitics of energy.* Diakses dari <http://www.forbes.com/sites/stratfor/2014/04/04/the-geopolitics-of-energy/> [13 Agustus 2014]
- Keck, Z. 2012. *India's South China Sea Gambit.* Diakses dari <http://thediplomat.com/2012/12/indias-south-china-sea-gambit/> [13 Januari 2015]
- Khrisnan, A. 2011. *South China Sea Project a "Serious Political Provocation," Chinese Paper Warns India.* Diakses dari <http://www.thehindu.com/news/international/south-china-sea-project-a-serious-political-provocation-chinese-paper-warns-india/article2459736.ece> [14 Januari 2015]
- Liputan 6. 2014. *AS Swasembada Energi, Asia Makin Keranjingan Impor.* Diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/802326/as-swasembada-energi-asia-makin-keranjingan-impor>. [8 Mei 2014]
- Macro Economic. (Tanpa Tahun). *Ekonomi ASEAN: Pertumbuhan Melambat, Perbaikan Tidak Secepat Harapan.* Diakses dari <http://macroeconomicdashboard.com/index.php/id/asean/152-ekonomi-asean-pertumbuhan-melambat,-perbaikan-tidak-secepat-harapan> [19 Januari 2015]
- Marathon Oil. (Tanpa Tahun). *About Us.* Diakses dari <http://www.marathonoil.com/About Us/> [4 November 2014]
- Mayilvaganan, M. 2013. *Examining India's Look East Policy 3.0.* <http://www.internationalpolicydigest.org/2013/11/21/examining-indias-look-east-policy-3-0/> [16 September 2014]
- Ministry of External Affairs Government of India. 2011. *Fact Sheet on MoUs/Treaty/Work Plan/signed during the visit of President of Vietnam.* Diakses dari <http://www.mea.gov.in/bilateral->

[documents.htm?dtl/5347/Fact+Sheet+on+MoUsTreatyWork+Plan+signed+du
ring+the+visit+of+President+of+Vietnam](#) [15 November 2014]

Ministry of External Affairs, Government of India. 2011. *Incident involving INS Airavat in South China Sea*. Diakses dari [http://www.mea.gov.in/media-
briefings.htm?dtl/3040/Incident+involving+INS+Airavat+in+South+China+S
ea](http://www.mea.gov.in/media-briefings.htm?dtl/3040/Incident+involving+INS+Airavat+in+South+China+S
ea) [4 April 2015]

Ministry of External Affairs, Government of India. 2011. *Joint Statement on the Occasion of the visit of the President of Vietnam*. Diakses dari [http://mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/5341/Joint+Statement+on+the+occasion+of+the+visit+of
+the+President+of+Vietnam](http://mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/5341/Joint+Statement+on+the+occasion+of+the+visit+of
+the+President+of+Vietnam) [22 November 2014]

Ministry of External Affairs, Government of India. 2014. *Media Statements by Prime Minister of India and Prime Minister of Vietnam in New Delhi* Diakses dari [http://www.mea.gov.in/Speeches-
Statements.htm?dtl/24143/Media+Statements+by+Prime+Minister+of+India+and+Prime+
Minister+of+Vietnam+in+New+Delhi+October+28+2014](http://www.mea.gov.in/Speeches-
Statements.htm?dtl/24143/Media+Statements+by+Prime+Minister+of+India+and+Prime+
Minister+of+Vietnam+in+New+Delhi+October+28+2014) [12 Januari 2015]

National Geographic. 2014. *Oil Shale*. Diakses dari [http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/oil-
shale/?ar_a=1](http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/oil-
shale/?ar_a=1) [17 Desember 2014]

Nguyen, T. 2012. *Uncertainty And Insecurity Generated By Claimants In South China Sea – Oped*. Diakses dari [http://www.eurasiareview.com/22082012-
uncertainty-and-insecurity-generated-by-claimants-in-south-china-sea-oped/](http://www.eurasiareview.com/22082012-
uncertainty-and-insecurity-generated-by-claimants-in-south-china-sea-oped/)
[2 April 2015]

OECD. 2002. *Solid Biomass*. Diakses dari <http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4603> [29 September 2014]

ONGC. (Tanpa Tahun). *Assets*. Diakses dari <http://www.ongcvidesh.com/Assets.aspx?tab=0> [2 Dersmber 2014]

ONGC. 2014. *ONGC is FORTUNE World's Most Admires Company, again*. Diakses dari [http://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/ongcindia/home/media/press_re
lease/ongc-is-fortune-world](http://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/ongcindia/home/media/press_re
lease/ongc-is-fortune-world) [15 Desember 2014]

- Panda, A. 2013. *Why Does India Have So Many 'Strategic Partners' and No Allies?*. Diakses dari <http://thediplomat.com/2013/11/why-does-india-have-so-many-strategic-partners-and-no-allies/> [4 November 2014]
- Perlez, J. 2012. *China, Vietnam, and India Fight Over Energy Exploration in South China Sea*. Diakses dari http://www.nytimes.com/2012/12/05/world/asia/china-vietnam-and-india-fight-over-energy-exploration-in-south-china-sea.html?_r=0 [8 Januari 2015]
- PR Newswire. (Tanpa Tahun). *ONGC-India's Oil and Natural Gas Corporation Deploys Paradigm Software Tools Nationwide*. Diakses dari <http://www.prnewswire.com/news-releases/ongc---indias-oil-and-natural-gas-corporation-deploys-paradigm-software-tools-nationwide-58586492.html> [2 Desember 2014]
- PVEP. 2012. *Vietnam PVEP to Complete drilling First well in Uzbekistan Kossor block in Aug*. Diakses dari <http://pvep.uz/en/news/vietnam-pvep-to-complete-drilling-first-well-in-uzbekistan-kossor-block-in-aug/> [25 Desember 2014]
- Reischer, R. 2012. *India's Look East Policy in the South China Sea*. Diakses dari <http://thediplomat.com/2012/08/indias-look-east-policy-in-the-south-china-sea/> [5 Januari 2015]
- Reyes, F. 2012. *PH, Vietnam set to hold joint bilateral cooperation in meeting next year*. Diakses dari <http://globalnation.inquirer.net/59605/ph-vietnam-set-to-hold-joint-bilateral-cooperation-meeting-next-year/> [17 Januari 2015]
- Riches, D. .2014. *BTU*. diakses dari <http://bbq.about.com/od/gasgrills/g/gbtu.htm> [16 September 2014]
- Schlumberger. 2014. *participating interest* http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/p/participating_interest.aspx [11 April 2014]
- Sinha, Y. 2003. *Resurgent India in Asia: Speech by External Affairs Minister Shri Yashwant Sinha at Harvard University*. Diakses dari <http://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/4744/Speech+by+External+Affairs+Minister+Shri+Yashwant+Sinha+at+Harvard+University> [8 November 2014]

- Shoikat Roy. 2013. *Understanding India's Role in South China Sea*. Diakses dari <http://broadmind.nationalinterest.in/2013/11/05/understanding-indias-role-in-the-south-china-sea/> [30 September 2014]
- Shukla, A. 2012. *Oil's not well in South China Sea*. <http://www.thehindubusinessline.com/opinion/oils-not-well-on-south-china-sea/article3380669.ece> [12 April 2014]
- Suryamurthi, R. 2012. *Tug of war over BP Vietnam asset*. http://www.telegraphindia.com/1101121/jsp/business/story_13202433.jsp [11 April 2014]
- The New Indian Express. 2013. *India-Vietnam ink pact to expand oil exploration in South China Sea*. Diakses dari <http://www.newindianexpress.com/nation/India-Vietnam-ink-pact-to-expand-oil-exploration-in-South-China-Sea/2013/11/21/article1902209.ece> [1 April 2015]
- Times of India. 2012. *Vietnam gas exploration extension offer to India may rile China*. <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Vietnam-gas-exploration-extension-offer-to-India-may-rile-China/articleshow/15024051.cms>. [11 April 2014]
- United Nations. 1982. *United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS)*. Diakses dari http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf [12 Desember 2014]
- United States Department of State, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. 2014. *Limit in the Seas*. Diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/234936.pdf> [2 April 2015]
- Vietnam Embassy. 2015. *Prime Minister India visit to improve strategic partnership*. Diakses dari http://www.vietnamembassy-denmark.vn/en/nr070521165843/nr070521170351/news_object_view?newsPath=/vnemb.vn/tin_hddn/ns141027154447 [12 Januari 2015]
- World Bank. 2013. *An Update on Vietnam's Recent Economic Development July 2013: Key Findings*. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/07/12/taking-stock-july-2013-an-update-on-vietnams-recent-economic-development-key-findings> [19 Januari 2015]

ZEE News. 2013. *ONGC Videsh gets 5 oil and gas blocks offer from Vietnam*. Diakses dari http://zeenews.india.com/business/news/companies/ongc-videsh-gets-5-oil-and-gas-blocks-offer-from-vietnam_89195.html [25 Desember 2014]

SUMBER LAIN

Chaturvedy, R. R. 2014. Is India Making Waves in South China Sea. *ISAS Working Paper* No. 185-26.

Do, T. M. & Sharma, D. 2011. Vietnam's Energy Sector: A Review of Current Energy Policies and Strategies. *Elsevier Energy Policy*. 39 (2011) 5770-5777.

Ghosh, P. K. 2013. Binding Vietnam and India: Joint Energy Exploration in South China Sea. *RSIS Commentaries*. No. 228/2013.

Gupta, S. 2013. Growing Tensions in South China Sea. *Institute of Peace and Conflict Studies*. Issue Brief No. 213 (May 2013).

Haokip, T. 2011. India's Look East Policy: Its Evolution and Approach. *South Asian Survey*. 18 (2) 239-257.

Khandekar, G. 2011. Central Asia on New Delhi's Geostrategic Radar. *FRIDE Commentary*. No. 18 (October 2011).

Khrisnan, R. 2009. India's energy security: imperatives for change. *Energy Security Insights, The Energy and Resources Institute (TERI)*. Vol. 4, No. 4. (October-Desember).

Mishra, R. 2014. India-Vietnam: New Waves of Strategic Engagement. *Indian Council of World Affairs Issue Brief*.

Mohan, C. R. 2009. Is India East Asian Power ? Explaining New Delhi 's Security Politics in the Western Pasific. *ISAS Working Paper National University of Singapore*. No. 81.

Muni, S. D. 2011. The Turbulent In South China Sea Waters: India, Vietnam, and China. *ISAS Insight*. No. 140 (October 2011).

Ott, M. C. 2010. China's Ambitions in South China Sea. *Asia Pacific Bulletin*. No. 71 (29 September 2010).

- Pant, H. V. China Rises, India Ponders: India 'Look East' Policy Gathers Momentum. *Australia-India Institute*. Vol. 1 (Spring 2013).
- Park, K. B. 2013. China Perceptions and Policies Toward India. *East Asia Institute*. Issue Briefing Middle Power Initiative 2013-01
- Pode, R. 2010. Adressing India's Energy Security and Options for Decreasing Energy Dependency. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. Volume 14 Issue 9.
- Scott, D. 2013. India' Role in the South China Sea: Geopolitics and geoeconomics in play. *India Review*. 12:2, 51-69.
- Singh, J. & Gu, Sai. 2010. Biomass Conversion in India-A Critique. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. (14) 1367-1378.
- Suharna, K. 2012. *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya bagi ketahanan Nasional*. Majalah Tannas. Edisi 94.
- Szczudlik-Tatar, J. 2013. China's New Silk Road Diplomacy. *Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych The Polish Institute of International Affairs*. No. 34 (82).
- Wiley, J. 2010. India steps up search for energy Security. *Oil and Energy Trends*. Volume 35 issue 12. Blackwell Publishing.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea

The Governments of the Member States of ASEAN and the Government of the People's Republic of China,

REAFFIRMING their determination to consolidate and develop the friendship and cooperation existing between their people and governments with the view to promoting a 21st century-oriented partnership of good neighbourliness and mutual trust;

COGNIZANT of the need to promote a peaceful, friendly and harmonious environment in the South China Sea between ASEAN and China for the enhancement of peace, stability, economic growth and prosperity in the region;

COMMITTED to enhancing the principles and objectives of the 1997 Joint Statement of the Meeting of the Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and President of the People's Republic of China;

DESIRING to enhance favourable conditions for a peaceful and durable solution of differences and disputes among countries concerned;

HEREBY DECLARE the following:

1. The Parties reaffirm their commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the Five Principles of Peaceful Coexistence, and other universally recognized principles of international law which shall serve as the basic norms governing state-to-state relations;
2. The Parties are committed to exploring ways for building trust and confidence in accordance with the above-mentioned principles and on the basis of equality and mutual respect;
3. The Parties reaffirm their respect for and commitment to the freedom of navigation in and overflight above the South China Sea as provided for by the universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;

4. The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;

5. The Parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features and to handle their differences in a constructive manner.

Pending the peaceful settlement of territorial and jurisdictional disputes, the Parties concerned undertake to intensify efforts to seek ways, in the spirit of cooperation and understanding, to build trust and confidence between and among them, including:

- a. holding dialogues and exchange of views as appropriate between their defense and military officials;
- b. ensuring just and humane treatment of all persons who are either in danger or in distress;
- c. notifying, on a voluntary basis, other Parties concerned of any impending joint/combined military exercise; and
- d. exchanging, on a voluntary basis, relevant information.

6. Pending a comprehensive and durable settlement of the disputes, the Parties concerned may explore or undertake cooperative activities. These may include the following:

- a. marine environmental protection;
- b. marine scientific research;
- c. safety of navigation and communication at sea;
- d. search and rescue operation; and

e. combating transnational crime, including but not limited to trafficking in illicit drugs, piracy and armed robbery at sea, and illegal traffic in arms.

The modalities, scope and locations, in respect of bilateral and multilateral cooperation should be agreed upon by the Parties concerned prior to their actual implementation.

7. The Parties concerned stand ready to continue their consultations and dialogues concerning relevant issues, through modalities to be agreed by them, including regular consultations on the observance of this Declaration, for the purpose of promoting good neighbourliness and transparency, establishing harmony, mutual understanding and cooperation, and facilitating peaceful resolution of disputes among them;

8. The Parties undertake to respect the provisions of this Declaration and take actions consistent therewith;

9. The Parties encourage other countries to respect the principles contained in this Declaration;

10. The Parties concerned reaffirm that the adoption of a code of conduct in the South China Sea would further promote peace and stability in the region and agree to work, on the basis of consensus, towards the eventual attainment of this objective.

Done on the Fourth Day of November in the Year Two Thousand and Two in Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia.

For Brunei Darussalam



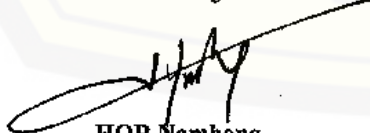
Mohamed Bolkiah
Minister of Foreign Affairs

For the People's Republic of China



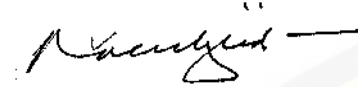
Wang Yi
Special Envoy and
Vice Minister of Foreign Affairs

For the Kingdom of Cambodia



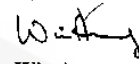
HOR Namhong
Senior Minister and Minister of
Foreign Affairs and International Cooperation

For the Republic of Indonesia



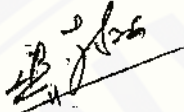
Dr. Hassan Wirayuda
Minister for Foreign Affairs

For the Union of Myanmar



Win Aung
Minister for Foreign Affairs

For the Lao People's Democratic Republic



Somsavat Lengsavad
Deputy Prime Minister and
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of the Philippines

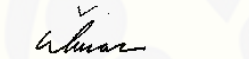

Blas F. Ople
Secretary of Foreign Affairs

For Malaysia



Datuk Seri Syed Hamid Albar
Minister of Foreign Affairs

For the Republic of Singapore

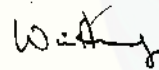

Prof. S. Jayakumar
Minister for Foreign Affairs

For the Kingdom of Thailand



Dr. Surakiart Sathirathai
Minister of Foreign Affairs

For the Union of Myanmar



Win Aung
Minister for Foreign Affairs

For the Socialist Republic of Viet Nam



Nguyen Dy Nien
Minister of Foreign Affairs

B. United Nations Convention on the Law of the Sea

PART V EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

Article 55

Specific legal regime of the exclusive economic zone

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.

Article 56

Rights, jurisdiction and duties of the coastal State in the exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, the coastal State has:

- (a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;
- (b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:
 - i) the establishment and use of artificial islands, installations and structures;
 - ii) marine scientific research;
 - iii) the protection and preservation of the marine environment;
- (c) other rights and duties provided for in this Convention.

2. In exercising its rights and performing its duties under this Convention in the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard to the rights and duties of other States and shall act in a manner compatible with the provisions of this Convention.

3. The rights set out in this article with respect to the seabed and subsoil shall be exercised in accordance with Part VI.

Article 57

Breadth of the exclusive economic zone

The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

Article 58

Rights and duties of other States in the exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with

the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention.

2. Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this Part.

3. In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive economic zone, States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this Part.

Article 59

Basis for the resolution of conflicts regarding the attribution of rights and jurisdiction in the exclusive economic zone

In cases where this Convention does not attribute rights or jurisdiction to the coastal State or to other States within the exclusive economic zone, and a conflict arises between the interests of the coastal State and any other State or States, the conflict should be resolved on the basis of equity and in the light of all the relevant circumstances, taking into account the respective importance of the interests involved to the parties as well as to the international community as a whole.

Article 60

Artificial islands, installations and structures in the exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, the coastal State shall have the exclusive right to construct and to authorize and regulate the construction, operation and use of:

- (a) artificial islands;
- (b) installations and structures for the purposes provided for in article 56 and other economic purposes;
- (c) installations and structures which may interfere with the exercise of the rights of the coastal State in the zone.

2. The coastal State shall have exclusive jurisdiction over such artificial islands, installations and structures, including jurisdiction with regard to customs, fiscal, health, safety and immigration laws and regulations.

3. Due notice must be given of the construction of such artificial islands, installations or structures, and permanent means for giving warning of their presence must be maintained. Any installations or structures which are abandoned or disused shall be removed to ensure safety of navigation, taking into account any generally accepted international standards established in this regard by the competent international organization. Such removal shall also have due regard to fishing, the protection of the marine environment and the rights and duties of other States. Appropriate publicity shall be given to the depth, position and dimensions of any installations or structures not entirely removed.

4. The coastal State may, where necessary, establish reasonable safety zones around such artificial islands, installations and structures in which it may take appropriate measures to ensure the safety both of navigation and of the artificial islands, installations and structures.

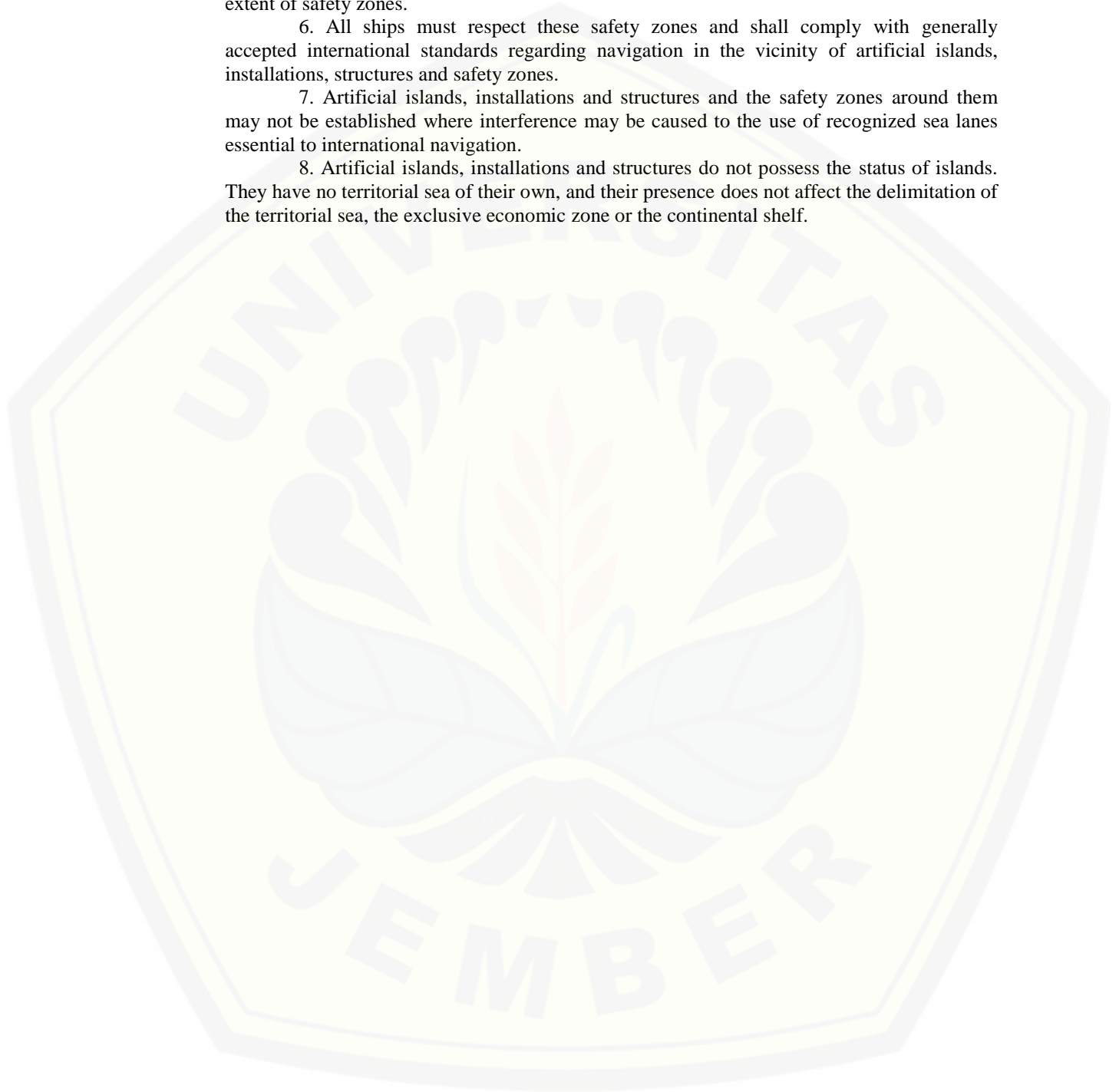
5. The breadth of the safety zones shall be determined by the coastal State, taking into account applicable international standards. Such zones shall be designed to ensure that they are reasonably related to the nature and function of the artificial islands, installations or structures, and shall not exceed a distance of 500 metres around them, measured from each

point of their outer edge, except as authorized by generally accepted international standards or as recommended by the competent international organization. Due notice shall be given of the extent of safety zones.

6. All ships must respect these safety zones and shall comply with generally accepted international standards regarding navigation in the vicinity of artificial islands, installations, structures and safety zones.

7. Artificial islands, installations and structures and the safety zones around them may not be established where interference may be caused to the use of recognized sea lanes essential to international navigation.

8. Artificial islands, installations and structures do not possess the status of islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the continental shelf.



C. Agreements signed during the visit of President of Vietnam



Ministry of External Affairs
Government of India

Documents

Home > Documents > Bilateral/Multilateral Documents

Agreements signed during the visit of President of Vietnam

October 12, 2011

No.	Name of the MOU/agreement	Vietnam Signatory	Indian Signatory
1.	Treaty of extradition between Republic of India and Socialist Republic of Vietnam.	MR. LE QUY VUONG Deputy Minister of Public Security	Shri S.M. KRISHNA Minister of External Affairs
2.	Memorandum of Understanding between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Republic of India on the "Vietnam India Friendship Year 2012".	MR. DOAN XUAN HUNG Deputy Minister of Foreign Affairs	Shri Sanjay Singh Secretary (East), MEA
3.	Work Plan for the years 2011-2013 between the Indian Council of Agricultural Research of the Republic of India and Ministry of Agriculture and Rural Development of the Government of Socialist Republic of Vietnam in the field of Agriculture and Fishery Research And Education	MR. BUI BA BONG Deputy Minister of Agriculture and Rural Development	DR. S. AYYAPPAN Secretary, Deptt. Of Agricultural Research & Education
4.	Agreement on Cooperation between Vietnam Oil and gas Group (Petro Vietnam) and ONGC Videsh Limited (ONGC-VL) in oil and gas sector.	DR. PHUNG DINH THUC Acting Chairman, President & CEO of Petro, Vietnam	SHRI D. K. SARRAF, Managing Director, OVL

No.	Name of the MOU/agreement	Vietnam Signatory	Indian Signatory
5.	Memorandum of Understanding on Cultural Co-operation between the culture Sports & Tourism of the Socialist Republic of Vietnam and the Indian Council for Cultural relation of the Republic of India.	MR. HUYNH VINH AL, Vice Minister of Culture, Sport and Tourism	SHRI SURESH K. GOEL Director General, ICCR
6.	Memorandum of Understanding on the Cultural Exchange Program between Ministry of Culture of the Republic of India and the Ministry of culture, Sports and Tourism of the Socialist Republic of Vietnam for the year 2011-2014	MR. HUYNH VINH AL, Vice Minister of Culture, Sport and Tourism	SHRI JAWHAR SIRCAR Secretary, Ministry of Culture

New Delhi

October 12, 2011

© Content Owned by Ministry of External Affairs, Government of India.

D. Agreements signed during the visit of President of Vietnam



Ministry of External Affairs

Government of India

Documents

Home > Documents > Bilateral/Multilateral Documents

List of documents signed during the State Visit of Nguyen Phu Trong, General Secretary of Communist Party of Vietnam to India

November 20, 2013

List of documents signed during the State Visit of Nguyen Phu Trong, General Secretary of Communist Party of Vietnam to India

No	Name	Vietnamese Signatory	Indian Signatory	Remarks
1.	Air Service Agreement	Mr. Dinh Thang Minister for Transport	La Shri Ajit Singh Minister for Civil Aviation	The ASA seeks to promote international air services, including direct flights between the two countries and also to promote an international aviation system based on competition among airlines. The ASA will ensure the highest degree of safety and security in international air services and reaffirms the grave concern about acts or threats against the security of aircraft, which jeopardize the safety of persons or property and adversely affects the operation of air services.
2.	MOU for setting up of the Indira Gandhi Hightech	Lieutenant General Le Quy Vuong Deputy Minister for Public Security		The MoU reaffirms the desire to further strengthen and consolidate the cooperation between the two countries in the field of crime investigation, counter terrorism and other transnational organized

No	Name	Vietnamese Signatory	Indian Signatory	Remarks
.	Crime Lab (IGHCL) in Hanoi			crime, and other relevant areas. India shall provide financial grant towards procurement of technical equipment for IGHCL, teaching aids, training programmes for staff members and deputation of experts and Vietnam shall provide a permanent venue and related infrastructure to establish the IGHCL in Hanoi.
3.	Agreement on Protection of Classified Information	Senior Lieutenant General Nguyen Chi Vinh Deputy Minister for Defence	Shri Radha Krishna Mathur Defence Secretary	The MoU is based on the principles of the MoU on Defence Cooperation signed between the two countries in November 2009 to recognise the benefits of sharing of information and to confirm mutual interest in protection of such information in accordance with the respective national laws and relevant provisions.
4.	MOU between two Ministries of Finance	Mdm. Vu Thi Mai Deputy Minister for Finance	Dr. Arvind Mayaram, Secretary, Dept. of Economic Affairs	The MoU will permit the parties to strengthen exchanges and share experiences in the fiscal policies for transitional economies, macro economic management, budget management process, financial policies to support high technology and software technology development. Exchange of financial policies would be used to develop policies in related areas as mutually agreed by the Parties.
5.	Cooperation Agreement between Hanoi National University and Indian Council for Scientific and	Prof. Phung Xuan Nha President of Vietnam National University, Hanoi	Prof Samir K Brahmachari D G CSIR & Secretary, Dept. of Scientific & Industrial Research	The purpose of the Agreement is to promote Scientific and Technical Cooperation between the two institutions aimed at developing a long term S&T collaboration between the two countries and also promoting friendly relations. This would include exchange of Scientists, Research Scholars and Specialists etc. for the purpose of research,

No	Name	Vietnamese Signatory	Indian Signatory	Remarks
.				Industrial Research training and consultation.
6.	MoU on Cooperation between India Institute of Management (IIM) Bangalore and HCM National Academy of Public Administration	Prof. Truong Thi Thong Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Public Administration	Prof. Devanath Tirupati Director (In-Charge), IIMB	The MoU shall focus on the activities and programmes such as exchange of faculty members and students, joint research activities, participation in seminars and academic meetings, exchange of academic materials and other information, special short-term academic programmes, training programmes and study tours. The cooperation will initially be focused on Public Policy, Entrepreneurship, Corporate Governance, Training for executives from public and private sector enterprises, Social Sciences and Student & Faculty Exchanges.
7.	MoU between Vietnam Oil and Gas Group and ONGC Videsh Limited (OVL)	Mr. Nguyen Vu Truong Son Vice President of Petro Vietnam	Mr. D. K. Saraf Managing Director, OVL	The MoU provides for association in the field of exploration, development and production of petroleum resources between the two countries for new investments by OVL in oil and gas blocks in Vietnam for oil and gas exploration and production. Petro Vietnam is also invited to participate in open blocks in India and in third countries.
8.	MOU between Vietnam Ministry of Industry and Trade and Tata Power Ltd. on development of Long Phu 2	Mr. Nguyen Khac Tho Deputy Director General of the Energy Department	Shri Anil Sardana Chief Executive Officer, Tata Power	The MoU approves TATA Power belonging to TATA Group to act as Investor to develop Long Phu 2, coal-fired Power Plant Project of 2x660 MW capacity. The Project will be designed, engineered, procured, contracted, constructed, owned, operated and maintained through a BOT Company owned by TATA Power and additional investors, with TATA Power as the lead

No	Name	Vietnamese Signatory	Indian Signatory	Remarks
.	Thermal Power Project in Soc Trang, Vietnam			member and will reach commercial operation in accordance with Agreements with the Vietnam side.

New Delhi
November 20, 2013

© Content Owned by Ministry of External Affairs, Government of India.